Fahrurrozi, M.E.I., dkk.

PRENADA

EKONOMI HIJAU

Potensi dan Strategi

EKONOMI HIJAU

Potensi dan Strategi

EKONOMI HIJAU

Potensi dan Strategi

Fahrurrozi, M.E.I., dkk.

Penyunting:
Ridan Muhtadi, M.SEI., AWP.

PRENADA

EKONOMI HIJAU: POTENSI DAN STRATEGI
Edisi Pertama

ISBN 978-602-383-177-7
15,5 x 23 cm
xiv, 216 hlm
Cetakan ke-1, Mei 2023

Prenada. 2023.0209

Penulis
Fahrurrozi, M.E.I.
Abd. Rohman Al Hadifi
Shaumil Badri
Safrianto
Firmansyah
Robiatul Adawiyah
Fitriyana Agustin
Faridatur Rosyidah
Anisatul Jannah
Novi Daniyatun Nikmah
Nur Aisatus Sholehah
Nuri Firdausiyah
Laily Yatul Ulien Nikmah R.

Penyunting
Ridan Muhtadi, M.SEI., AWP.

Desain Sampul
Irfan Fahmi

Tata Letak
Ria & Iam Maher

Penerbit
P R E N A D A
Jl. Tambra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220
Telp: (021) 4786-4657 Faks: (021) 475-4134

Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP
e-mail: pmg@prenadamedia.com
www.prenadamedia.com
INDONESIA

Gagal dalam merencanakan artinya
“merencanakan kegagalan, sehingga lebih baik
bersimbah keringat di saat latihan daripada
bersimbah darah di medan perang.”

Kata Sambutan

Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Bismillairahmanirrahim

Segala puji bagi Allah Swt., dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dan saya atas nama pimpinan IAIN Madura sangat bangga sekali terhadap karya mahasiswa secara kolektif bersama dosen, tentang buku ajar yang berjudul *Ekonomi Hijau: Potensi dan Strategi.* Buku ini merupakan buku yang ketiga dari proses kegiatan organisasi bernama UKK FPM FEBI IAIN Madura, di mana kawan-kawan berusaha mengupas bagaimana seharusnya potensi pengembangan ekonomi yang berwatak dengan *tagline* "Ekonomi Hijau", buku ini diharapkan mampu mengeksplorasi potensi dan juga strategi-strategi secara khusus. Kita tahu bahwa Pamekasan dengan *tagline* "Pamekasan Hebat". Program-program dengan guna untuk pengembangan wirausaha baru dan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan juga setiap lapisan masyarakat atau segenap kelompok masyarakat mampu mengembangkan dan mampu menggali diri setiap potensi-potensi yang ada di Kabupaten Pamekasan yang mulai saat ini tumbuh dan juga berkembang sehingga menghasilkan produk-produk yang bisa kita lihat di Wamiramart.

Maka dalam rangka pengembangan ekonomi, perlunya disampaikan pada setiap *stakeholder* menggunakan pendekatan ekonomi hijau di Pamekasan ini, yang harus dipikirkan adalah tidak hanya sekadar

eksploitasi seperti potensi yang dimiliki oleh Pamekasan, contohnya adalah Galian C., yang selama ini menjadi eksploitasi massal, tentunya perlu dipikirkan secara matang bagaimana generasi yang akan datang tetap merasakan potensi yang masih kita rasakan hari ini, oleh karena itu perlunya menjaga dan memelihara potensi-potensi ekonomi Pamekasan agar menjadi lebih baik, perlu adanya regulasi-regulasi yang dapat mempertahankan potensi ekonomi tersebut. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca dan pengambil kebijakan dalam mengelola potensi ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan, sekian terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Dr. H. Saiful Hadi, M.Pd.

Rektor IAIN MAdura

Prakata

Pertama-tama kami panjatkan puji syukur terhadap Allah Swt. sehingga memberikan nikmat yang luar biasa sehingga kami dapat menyumbangkan karya yang berjudul *Ekonomi Hijau: Potensi dan strategi.*

Tak lupa pula selawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Akhiruzzaman Muhammad *Shalallahu alaihi wasallam*, semoga kita semua dapat senantiasa memperjuangkan dakwah Islam terutama dalam bidang ekonomi.

Sungguh, ini merupakan suatu kebanggaan dan juga kehormatan yang luar biasa ketika kami dapat menyumbangkan karya di bidang perbukuan yang berjudul *Ekonomi Hijau: Potensi dan strategi,* buku yang ditulis dengan literatur ilmiah dan riset ini diharapkan menjadi pintu baru dalam bidang ekonomi serta menambahkan khazanah keilmuan yang nantinya dapat menjawab segala tantangan yang ada dalam bidang ekonomi terutama dalam ekonomi Islam. Memang benar, bahwa ekonomi hijau dapat memberikan kebermanfaat terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan serta dari segi sosial-ekoomi juga memberikan dampak positif yang luar biasa kepada segala aspek atau lapisan di masyarakat, terlebih lagi di Kota Pamekasan yang memiliki modal alam serta modal sosial-budaya yang penulis yakini bahwa jika dikelola dengan strategi tepat-guna maka akan tercipta ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya ada pada tataran normatif

belaka tapi justru dapat memiliki proporsisi yang signifikan dalam perekonomian nasional maupun daerah.

Kami menyadari bahwa dalam pembuatan buku ini masih jauh dari kata sempurna, baik secara konteks maupun konten, maka kami membuka diri serta menerima saran dan kritik demi memperbaiki ke depan.

Maka dengan kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para tim penulis, mentor, penyunting yakni Ridan Muhtadi, M.SEI., AWP, Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta kepada seniorias di organisasi UKK FPM FEBI, yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, semoga Allah Swt. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Penulis

Daftar Isi

BAB I
Pendahuluan: Sejarah dan Pengertian Ekonomi Hijau

Isu pembangunan berkelanjutan digagas pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) Bumi tahun 1992 di Rio De Janeiro, KTT ini mendeklarasikan 3 komitmen utama internasional. *Pertama*, diwajibkan bagi negara maju untuk memperhatikan lingkungan dalam pembangunannya. *Kedua*, diizinkan bagi negara berkembang untuk melanjutkan pembangunannya seperti biasa, akan tetapi harus menerapkan model pembangunan hijau. *Ketiga*, diwajibkan negara maju untuk membantu negara berkembang demi menerapkan pembangunan yang ramah lingkungan, baik melalui dukungan pendanaan maupun alih teknologi.[1] KTT Bumi 1992 sebenarnya merupakan reaksi terhadap beberapa masalah kerusakan lingkungan yang mengandung tiga prinsip utama yaitu; pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan pengelolaan wilayah untuk kehidupan manusia.[2]

Setelah KTT Bumi 1992 dilanjutkan KTT Bumi kedua di Johannesburg tahun 2002 yang dikenal dengan Rio+10, di KTT Bumi 2 ini merupakan inisiatif internasional dalam mencapai MDGs (*Millenium Development Goals*).[3] KTT 3 kembali dilakukan pada tahun 2012 di Rio,

[1] Lisbet, "Green Economy dan Konferensi Tingkat Tinggi Rio+20," *Info Singkat Hubungan Internasional* Vol. IV, No. 12/II/P3DI (Juni 2012): 6, https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-IV-12-II-P3DI-Juni-2012-69.pdf.

[2] Syamsuri, *Pengembangan Teknologi Terapan Berwawasan Lingkungan, Menjawab Tantangan 4.0* (Malang: Ma Chung Press, 2020), 209.

[3] Surjono, *Bumi Yang Lestari (Kajian Literatur dan Empiris Tentang Perencanaan Pemba-*

Brazil (KTT Rio+20), di mana nama tersebut diambil karena bertepatan dengan 20 tahun terselenggaranya United Nations Conference on Environment and Development (UNCED) yang mendeklarasikan konsep *green economy* (ekonomi hijau atau ekonomi ramah lingkungan), di mana konsep tersebut merupakan kesepakatan internasional untuk pembangunan berkelanjutan sebagai alternatif penurunan angka kemiskinan yang dihadiri 192 negara.[4]

Pada KTT Rio+20 tersebut mendeklarasikan dokumen *The Future We Want* sebagai perbaikan dokumen lama Our Common Future yang diluncurkan pada KTT Bumi 1992. Dokumen tersebut merupakan dokumen yang berisi visi bersama para pemimpin negara yang menghadiri KTT Rio+20 untuk memperbaiki komitmen terhadap pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*), perekonomian, sosial dan lingkungan hidup bagi dunia dan generasi mendatang.[5] Pada KTT 3 tersebut menghasilkan:

1. Merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan (*Suistainable Development Goals*), sasaran dari pembangunan yang berkelanjutan dengan 17 tujuan.
2. Upaya untuk menopang UN Enviromental Program (UNEP) untuk menjadikannya sebagai otoritas lingkungan global terdepan dengan penetapan delapan rekomendasi utama termasuk memperkuat tata kelola melalui keanggotaan universal meningkatkan sumber daya keuangan dan memperkuat ikatan dengan koordinasi utama yang ada di PBB.
3. Negara-negara sepakat mencari alternatif dari PDB sebagai ukuran kemakmuran dan memperhitungkan faktor lingkungan dan sosial dalam upaya menilai dan memberikan kompensasi terhadap lingkungan (perlindungan satwa, fauna dan melindungi lingkungan).
4. Pengakuan bahwa "cara masyarakat mengonsumsi dan mengha-

---

ngunan Berkelanjutan Skala Makro-Mikro) (Malang: UB Press, 2018), 13.

[4] Sani Malik Ibrahim <sanimalikibrahim[at]gmail.com>, "KTT BUMI DAN POSISI KEMENHUB," diakses 19 April 2022, http://dephub.go.id/post/read/ktt-bumi-dan-posisi-kemenhub-13473.

[5] Lisbet, "Green Economy dan Konferensi Tingkat Tinggi Rio+20," 6.

silkan sangat diperlukan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan secara global."

5. Menggarisbawahi kondisi untuk mengembalikan stok laut ke level keberlangsungan sudah pada level "mendesak" dan meminta semua negara untuk mengembangkan dan menerapkan pengelolaan laut berbasis *sains*.
6. Semua negara menegaskan kembali menghapus subsidi bahan bakar berbasis fosil.[6]

Komitmen internasional memberikan dampak yang besar terhadap perencanaan penerapan ekonomi hijau untuk meminimalisasi polusi dan penggunaan sumber daya secara efisien dalam kegiatan ekonomi, menghapus kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang, dan meminimalisasi emisi GRK. Oleh karena itu, ekonomi dan lingkungan tidak dapat dipisahkan agar keberhasilan ekonomi hijau dapat terealisasikan secara optimal.

Perubahan iklim dan kerusakan lingkungan menjadi tantangan terbesar umat manusia. Terlebih lagi, Indonesia sebagai negara yang memiliki iklim tropis terbesar di dunia, sehingga Indonesia rentan sekali tertimpa dampak dari perubahan iklim, baik karena fenomena alam sendiri maupun karena ulah manusia seperti longsor, kebakaran hutan, banjir, kekeringan, penurunan kualitas air bersih, dan peningkatan prevalensi penyakit. Untuk menanganinya pun tidak dapat dilakukan secara individu, diperlukan kerja sama dan partisipasi yang optimal dari berbagai pihak, efektivitas perubahan iklim tergantung pada kebijakan dan implementasinya di semua tingkat, baik di tingkat sub regional, regional, nasional, dan internasional.

Komitmen Indonesia dalam meratifikasi perjanjian Paris di New York dengan aksi menurunkan emisi gas dengan mengoptimalkan potensi hutan. Kementerian Lingkungan dan Kehutanan sebagai *focal point* pengendali perubahan iklim di Indonesia telah membuat suatu wadah yang dikemas dalam bentuk *knowledge centre* yang berisi pengetahuan tentang penyebab, dampak dan potensi perubahan iklim

---

[6] Surjono, *Bumi Yang Lestari (Kajian Literatur dan Empiris Tentang Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Skala Makro- Mikro)*, 13–14.

di Indonesia.[7] Hal tersebut bertujuan untuk memberikan edukasi tentang perubahan iklim dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menanggulangi kerusakan lingkungan dan perubahan iklim.

Perubahan iklim dapat terjadi karena emisi gas rumah kaca (GRK) sehingga terjadinya pemanasan global akibat meningkatnya jumlah GRK di atmosfer.[8] Berdasarkan laporan inventarisasi gas rumah kaca (GRK) dan monitoring, pelaporan dan verifikasi (MPV) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hasil penghitungan inventarisasi GRK nasional mencapai 1.866.552 Gg CO2e yang terbagi ke beberapa sektor, sektor energi sebesar 638.808 Gg CO2e, proses industri dan penggunaan produk sebesar 60.175 Gg CO2e, pertanian sebesar 108.598 Gg CO2e, kehutanan dan kebakaran gambut sebesar 924.853 Gg CO2e, dan limbah sebesar 134.119 Gg CO2e.[9] Hasil inventarisasi GRK nasional dalam tahun 2000- 2019 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1. Tabel Hasil Inventarisasi GRK Nasional dalam Tahun 2000-2019

Tahun	Energi	IPPU	Pertanian	FOLU	Peat Fire	Limbah	Total
2000	317.609	42.883	99.314	500.019	161.571	64.832	1.186.228
2001	341.919	48.269	97.124	-144.329	50.885	67.602	461.470
2002	349.485	41.688	98.381	-119.030	301.753	70.063	742.340
2003	378.050	41.402	99.652	-130.833	132.075	73.061	593.407
2004	380.434	43.146	102.083	17.062	232.018	75.225	849.968
2005	376.988	42.296	103.227	33.119	258.887	77.216	891.733
2006	386.100	38.641	103.517	53.411	510.710	82.578	1.174.957
2007	402.989	35.919	105.991	161.799	62.747	83.933	853.378
2008	391.784	36.499	99.949	157.343	81.744	85.023	852.342
2009	405.653	37.546	105.087	259.880	299.920	89.326	1.197.412
2010	453.235	36.033	108.318	73.343	51.383	87.670	809.982
2011	507.357	35.910	107.520	122.414	189.026	91.852	1.054.079

[7] "Knowledge Centre Perubahan Iklim - Komitmen Indonesia," diakses 19 April 2022, http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia. 6.

[8] "Knowledge Centre Perubahan Iklim - Komitmen Indonesia."

[9] *Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verivikasi (MPV)* (Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi, 2021), 50.

Tahun	Energi	IPPU	Pertanian	FOLU	Peat Fire	Limbah	Total
2012	540.419	40.078	112.058	249.442	207.050	95.530	1.244.577
2013	496.030	39.164	112.882	377.747	205.076	100.514	1.331.413
2014	531.142	47.489	112.801	215.318	499.389	102.834	1.508.973
2015	531.142	47.489	117.160	742.843	822.736	106.061	2.374.403
2016	538.025	49,297	122.185	417.385	90.267	112.352	1.335.521
2017	562.244	55.395	127.503	476.005	12.512	120.191	1.353.850
2018	595.665	59.262	110.055	602.188	121.322	127.077	1.615.569
2019	638.808	60.175	108.598	468.425	456.427	134.119	1.866.552

Sumber: Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca dan MPV 2020, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Di tahun 2019, sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap emisi GRK nasional adalah sektor kehutanan dan kebakaran gambut sebesar 50%, sektor energi sebesar 34%, limbah sebesar 7%, pertanian sebesar 6%, dan IPPU sebesar 3%. Oleh sebab itu, banyak dampak dan fenomena yang terjadi di Indonesia seperti gagal panen akibat kekeringan di Riau, cuaca tidak menentu, terjadinya kemarau yang berkepanjangan, berkurangnya kualitas dan kuantitas air, dan sebagainya. Upaya pemerintah mengatasi dampak perubahan iklim merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia untuk menjawab tantangan perubahan iklim melalui kebijakan Pembangunan Ketahanan Iklim (PBI). Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Januari 2020, Pembangunan Ketahanan Iklim (PBI) menjadi salah satu dari enam (enam) prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 untuk membangun lingkungan, meningkatkan ketahanan dan perubahan iklim. PBI fokus pada 4 (empat) sektor yang terkena dampak perubahan iklim, yaitu sektor kelautan dan pesisir, sektor perairan, sektor pertanian, dan sektor kesehatan.[10]

Dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan pesisir ialah kemiringan lingkungan pantai karena banjir, kerusakan ekosistem pesisir dan laut, membahayakan keselamatan pelayaran, dan jarak jelajah yang berkurang untuk kapal nelayan kecil <10GT. Di sektor air

[10] Pramudita Mahyastuti dkk., *Ringkasan Eksekutif Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020–2045*, (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021), 4.

berdampak banjir, kekeringan dan berkurangnya ketersediaan air. Di sektor pertanian berdampak pada produksi komoditas pertanian menurun. Dan di sektor Kesehatan berdampak pada perkembangan vektor penyakit dan cekaman panas di perkotaan.[11]

Dari dampak yang telah disebutkan di atas, perubahan iklim juga dapat menjadikan krisis lingkungan sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem akibat perubahan gaya hidup masyarakat masa kini yang ingin mempermudah segalanya. Dengan cepat, pengemasan dan pembongkaran massal sekali pakai oleh bumi dapat memakan waktu puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun. Pembuangan limbah pabrik dan rumah tangga yang mencemari sungai dan lautan berdampak pada ekosistem perairan, kesehatan manusia, bahkan permintaan yang tinggi terhadap industri seperti permintaan bahan bakunya terbuat dari kayu tanpa upaya penghijauan.

Oleh karena itu, untuk melindungi lingkungan dan mencegah perubahan iklim, transformasi ekonomi hijau perlu diterapkan di semua sektor. Pemerintah juga telah menerapkan langkah-langkah penanggulangan perubahan iklim dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 melalui Kementerian Keuangan dan kementerian lainnya, dengan aspek perubahan iklim menjadi prioritas nasional keenam dengan tiga prioritas.[12] *Pertama,* meningkatkan kualitas lingkungan dengan tujuan mencapai Indeks Kualitas Lingkungan (IKLH) mencapai 73,2575,25 pada tahun 2024. *Kedua*, peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim yang bertujuan untuk menurunkan rasio kerugian ekonomi akibat bencana dan bahaya iklim terhadap PDB sebesar 0,21% pada tahun 2024. *Ketiga*, pembangunan rendah karbon yang ditujukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 27,3% pada tahun 2024.[13]

Contoh yang terjadi pada November 2021 terjadi 2.431 bencana, 98% di antaranya merupakan bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh faktor alam seperti banjir, tanah

[11] Pramudita Mahyastuti dkk., 4.

[12] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, "Ekonomi Hijau Untuk Masa Depan Peradaban," 2021, https://www.kemenkeu.go.id/media/17380/mk-w1-maret-up.pdf..

[13] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 11.

longsor dan angin topan. Frekuensi bencana hidrometeorologi pada tahun 2020 meningkat hampir delapan kali lipat dibandingkan tahun 2005. Tren peningkatan bencana di Indonesia akibat peningkatan curah hujan yang ekstrem dan dampak perubahan iklim global saat ini.[14]

Transisi ke pertumbuhan hijau memiliki biaya jangka pendek, tetapi secara keseluruhan biaya ini memiliki banyak manfaat. Pertumbuhan hijau membutuhkan berbagai teknologi baru untuk melindungi lingkungan, lembaga yang kompeten, tindakan pemerintah yang efektif, dan keterlibatan sektor swasta yang konsisten dalam transisi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (Bappenas RI) memperkirakan pada tahun 2045 akan terjadi cuaca ekstrem baik dalam kondisi basah maupun kering, yang akan memengaruhi sektor ekonomi.[15] Berdasarkan hasil survei, kerugian ekonomi akibat perubahan iklim akan mencapai Rp 112,2 triliun pada tahun 2023. Penyesuaian sukarela (terkait program penyesuaian sektor per sektor) dapat mengurangi kerugian hingga Rp 95,7 triliun (pengurangan sekitar 15%). Namun, jika langkah-langkah yang direncanakan dan optimal diambil untuk mengembangkan ketahanan iklim, kerugian yang ditimbulkan diperkirakan akan berkurang menjadi Rp 58,3 triliun (pengurangan hampir 50%).[16]

Strategi pemerintah Indonesia dalam transformasi ekonomi menengah panjang, yaitu melalui pendekatan ekonomi hijau.[17] Ekonomi hijau dapat mewujudkan rencana aksi global yang harus dicapai pada tahun 2030, target di tahun 2030 untuk pembangunan dikenal dengan *Suistainable Development Goals* (SDGs) yang merupakan kesepakatan antarpemimpin negara untuk merealisasikan pembangunan baru yang

[14] "Pencegahan Dini Bencana Hidrometeorologi di Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan," diakses 19 April 2022, https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-dini-bencana-hidrometeorologi-di-Indonesia.

[15] Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Kaleidoskop 2021*, khusus, vol. XIV (Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021), 13.

[16] Pramudita Mahyastuti dkk., *Ringkasan Eksekutif Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020-2045*, 12.

[17] "Pencegahan Dini Bencana Hidrometeorologi di Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan."

mendorong perubahan menuju ke arah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia, kesetaraan sosial dan ekonomi serta perlindungan lingkungan yang terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target.[18]

Menurut Fauzi dalam Bappeda, ada sebab utama pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. *Pertama*, karena alasan moral, tidak boleh mengeksploitasi sumber daya alam dan lingkungan dalam mengonsumsi barang dan jasa, masyarakat memiliki kewajiban moral dengan tidak menghabiskannya. *Kedua*, alasan ekologi, setiap kegiatan ekonomi tidak memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan sehingga mengancam keberadaan ekologi. *Ketiga*, alasan ekonomi, di mana dari sisi ekonomi menjadi perdebatan, karena tidak diketahui apakah aktivitas ekonomi selama ini sudah atau belum memenuhi kriteria berkelanjutan, dimensi ekonomi berkelanjutan sangatlah kompleks, sehingga aspek keberlanjutan hanya diukur kesejahteraan antargenerasi.[19]

Terdapat banyak kesempatan bagi Indonesia untuk mewujudkan ekonomi hijau, banyak segmen yang terlibat dalam upaya mewujudkan ekonomi hijau, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi, dan perusahaan. Indonesia di tahun 2030 merupakan negara yang dapat mencapai target SDGs, oleh karena itu pembangunan ekonomi yang keberlanjutan lingkungan dengan membatasi polusi, melindungi lingkungan dan menjaga sungai dan laut merupakan komitmen Indonesia agar menjadi negara makmur, sejahtera dan menciptakan ekonomi berkelanjutan. Sebaliknya, jika pertumbuhan ekonomi tidak ramah lingkungan, merusak ekosistem laut, dan tidak menangani gas rumah kaca, maka menyebabkan perubahan iklim yang berdampak terhadap semua sektor baik keuangan, ekonomi, maritim, pertanian, dan lain-lainnya sehingga Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak berkelanjutan dan bahkan mengalami kerugian di berbagai sektor.

---

[18] "TENTANG x |," diakses 19 April 2022, https://sdgs.bappenas.go.id/tentang-3/. 9

[19] "Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah," diakses 24 September 2022, https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68.

Yusuf telah menyampaikan dari beberapa hasil penelitian dan pemodelan, bahwasanya inisiatif ekonomi hijau dapat diimplementasikan tanpa memberikan dampak negatif terhadap tujuan pembangunan. Melalui implementasi tersebut, maka akan diperoleh potensi manfaat ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan modal. Selain itu, pemodelan dampak pajak karbon terhadap perekonomian menunjukkan bahwa target penurunan emisi 10% pada tahun 2020 dapat dicapai tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap upaya pengentasan kemiskinan.[20] Oleh sebab itu, ekonomi hijau memiliki potensi untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan tanpa menggerogoti sumber daya alam dan tanpa degradasi lingkungan.

---

[20] Sayaka, "Ekonomi Hijau Untuk Pemulihan Sumber Daya Alam dan Lingkungan."

BAB II
Nilai Ekonomi, Etika, dan Lingkungan

A. Nilai Dasar Ekonomi

Nilai-nilai dasar ekonomi lingkungan adalah nilai yang tidak dapat diubah. Dalam pengimplementasiannya, dana tiga hal yang menjadi konsep dalam ekonomi lingkungan, yaitu.[21]

1. Konsep Analisis Materi (*Material Balance Concept*)

Dalam ekonomi lingkungan konsep ini ditekankan pada gambaran fisis sumber daya alam pada lingkungan (material atau bahan). Artinya, pada konsep ini akan membahas secara detail tentang keseimbangan benda dalam satuan energi dan hukum termodinamika.

Gambaran fisis sumber daya alam diukur secara kuantitas, misalnya jumlah pohon jati di sebuah lingkungan hutan. Sebenarnya yang bisa diukur secara kuantitas bukan hanya jumlahnya saja melainkan bagian-bagian dari pohon jati seperti daun, batang, dan akar. Kuantitas sumber daya alam berbanding lurus dengan kualitas fungsi atau perannya dalam lingkungan.

Apabila jumlah pohon jati di sebuah lingkungan hutan banyak, maka kualitas fungsi yang ditawarkan semakin tinggi. Adapun jika jumlahnya sedikit, maka kualitas fungsinya semakin rendah. Besar kecil

[21] Yunhendri Danhas dan Bustari Muchtar, *Ekonomi Lingkungan* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 15-30.

populasi pohon jati di sebuah lingkungan hutan dapat menentukan sedikit banyaknya peranan pohon jati tersebut. Hal ini juga berlaku pada bagian-bagian dari pohon jati yang sudah kita bicarakan, pohon jati mempunyai fungsi atau peran yang berbanding lurus dengan fungsinya terhadap lingkungan.

Perlu dipahami, saat menjawab pertanyaan berapa jumlah, maka bisa dilakukan dengan cara menghitung sehingga akan mengetahui kuantitasnya. Namun, jika pertanyaannya tentang fungsi atau peran, tentu tidak bisa menghitungnya dengan angka, melainkan nantinya disebut dengan kualitas. Jadi, apabila melihat telah terjadinya penurunan fungsi dari komponen suatu lingkungan, maka bisa dikatakan telah menurunnya kualitas lingkungan tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila melihat jumlah komponen suatu lingkungan telah menurun secara drastis, maka bisa dinyatakan bahwa di lingkungan tersebut kuantitasnya menurun.

Dari sudut pandang ekonomi lingkungan terhadap fungsi sumber daya tidak ditekankan untuk memenuhi kebutuhan manusia, melainkan pada fungsi dari sumber daya itu sendiri bagi lingkungan. Keseimbangan alam ialah keseimbangan alami. Sistem dalam lingkungan bekerja dengan sendirinya untuk mempertahankan keseimbangan tersebut. Jika di dalamnya terdapat campur tangan manusia, maka lingkungan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai bentuk keseimbangan. Itulah konsep dari keseimbangan material di alam, karena alam senantiasa mengondisikan semua komponen materialnya agar berada pada titik keseimbangan. Artinya keseimbangan itu terbentuk berdasarkan fungsi dan peran beserta jumlah masing-masing komponen material. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk me-*recorvery* semua yang telah dieksploitasi dari lingkungan guna tidak terjadi ketidakseimbangan.

2. Konsep Analisis Biaya dan Manfaat (*Cost and Benefit Analyze Concept*)

Manfaat diartikan sebagai nilai yang ada di dalam barang atau jasa bagi konsumen. Adapun biaya merupakan hilangnya manfaat dari pemenuhan suatu barang/jasa (*opportunity cost*). Prinsip konsep ini adalah metode dalam hal menilai layak (*feasible*) tidaknya suatu perilaku atau kegiatan manusia. Dikatakan hal itu layak atau tidak, didasarkan

pada hasil analisis. Apabila biaya lebih besar daripada manfaat maka kegiatan tersebut tidak layak dilakukan, sebaliknya apabila analisis menunjukkan bahwa manfaat yang diperoleh lebih besar daripada biaya maka kegiatan tersebut layak untuk dilakukan.

Salah satu prinsip dalam ilmu ekonomi "untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan modal minim." Artinya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita semampu mungkin melakukan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dalam ekonomi lingkungan, usaha dan biaya yang dikeluarkan bukan hanya dihitung dalam jumlah uang yang dikeluarkan oleh sekelompok orang untuk mendapatkan keuntungan untuknya sendiri melainkan juga memasukkan bagian lingkungan melalui penjabaran penentuan dana dan utilitas.

Segala sesuatu yang berhubungan dengan aspek lingkungan seperti untuk menentukan manfaat dan biaya sukar dilakukan. Masyarakat telah mencoba menentukan biaya pembuangan sampah atau limbah rumah tangga atau perusahaan. Biaya yang dimaksud adalah biaya pencegahan polusi dan biaya polusi. Biaya pencegahan polusi merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, individu, dan pemerintah sebagai akibat dari aktivitas yang dilakukan seperti produksi dan konsumsi untuk mencegah sebagian atau keseluruhan polusi. Polusi mempunyai biaya yang dipecah menjadi dua, yaitu:

a. Biaya yang dikelontorkan pemerintah atau swasta akibat polusi yang timbul dari kerusakan relatif mudah untuk mengukur dan menghitungnya.

   Contohnya, untuk menghindari kerusakan akibat dari polusi pada suatu wilayah, maka dibangunlah sebuah instalasi pengolahan limbah pada sumber polusi. Biaya pembangunan tersebut bisa dihitung dan dapat juga menghitung biaya yang akan dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan yang akan tercemar, seperti halnya kerusakan dinding gedung. Hal itu bisa dengan mudah ditentukan pilihan antara keduanya mana biaya yang lebih sedikit untuk dilakukan.

b. Biaya kerusakan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat polusi, namun untuk mengukur dan menghitungnya sangatlah sulit.

   Contohnya, dalam suatu wilayah yang mengalami kerusakan akibat polusi, sangat tidak mudah untuk menentukan berapa orang

terdampak (sakit). Parahnya, apabila terdapat satu kepala keluarga yang sakit karena polusi, maka ia tidak bisa bekerja produktif untuk menghidupi keluarganya. Sehingga untuk menghitung berapa jumlah keluarga yang terdampak tidaklah mudah. Meskipun demikian, tetaplah dibutuhkan untuk melakukan pendekatan dan formulasi untuk menentukan kerusakan kesejahteraan akibat dari polusi tersebut.

Pada dasarnya konsep analisis biaya dan manfaat dalam ekonomi lingkungan ini diterapkan dalam upaya menghadapi segala permasalahan lingkungan. Namun, masalah yang paling utama yaitu menanggulangi pencemaran lingkungan. Hakikatnya, konsep yang diterapkan dalam menanggulangi pencemaran lingkungan merupakan pengiraan sistematika terhadap kerugian daan kuntungan dari seluruh perubahan dalam kegiatan pembuatan dan kudapan (konsumsi).

3. Konsep Perlindungan Lingkungan (*Environment Protection Concept*)

Konsep perlindungan lingkungan merupakan suatu konsep yang bertujuan memperoleh kualitas lingkungan yang optimal, artinya kualitas tersebut baik untuk saat ini dan juga untuk masa datang.

Lingkungan yang tidak optimal merupakan suatu lingkungan yang sumber daya yang sudah ada memberikan manfaat besar untuk sekelompok orang, namun dalam waktu yang relatif singkat. Kemudian setelah itu, lingkungan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain karena sudah tercemar dan rusak untuk jangka waktu yang panjang.

Misalnya, terdapat sekelompok orang melakukan penambangan timah secara liar di suatu wilayah yang mana juga merupakan lingkungan tempat tinggal orang lain. Penambangan timah tersebut dimanfaatkan untuk tujuan ekonomis sehingga menyebabkan kondisi tanah menjadi berlubang akibat dari penggalian. Kondisi yang seperti ini dinamakan kerusakan lingkungan. Artinya, lingkungan tersebut telah berubah dari segi bentuk dan struktur material awalnya sehingga kualitas dan fungsi dari komponen yang terdapat di lingkungan tersebut menurun. Selain kerusakan lingkungan, penambangan timah ini juga

menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Untuk mempercepat proses penambangan timah, biasanya penambang menambahkan zat *aditif* seperti *mercury* air sehingga menyebabkan sumber daya mineral timah dengan mudah dan cepat didapatkan serta *mercury* air tersebut ditinggalkan yang berakibat pada menurunnya kualitas lingkungan. Artinya, sekelompok orang mendapatkan keuntungan dalam waktu relatif singkat, sementara orang lain mendapatkan kerugian pada lingkungan yang sama.

Banyak upaya dan strategi guna mencapai kualitas lingkungan yang optimal. Upaya dan strategi yang ditujukan untuk perlindungan lingkungan membutuhkan instrumen. Pada bidang hukum, instrumen yang disusun untuk perlindungan melalui aspek hukum (*legalitas*) sudah ada sejak lama. Begitu juga di bidang sipil dan perencanaan seperti terapan teknologi Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) berupa infrastruktur untuk perlindungan lingkungan.

B. Etika Manusia dengan Lingkungan

Etika berasal dari bahasa Yunani "*ethikos*" (kata sifat) yang artinya "muncul dari kebiasaan", dan "*ethos*" (kata benda) yang artinya "watak kesusilaan atau adat". Etika berkaitan dengan sistem kehidupan dengan indikator benar atau salah sehingga dapat menilai perbuatan sehari-hari. Etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat dalam menjalani hidup.[22]

Menjaga kelestarian lingkungan pada hakikatnya merupakan salah satu tugas wajib setiap manusia guna menjaga keberlangsungan makhluk hidup. Untuk itu, sangat penting membina wawasan dan kepedulian lingkungan di kalangan masyarakat. Selain itu, setiap orang juga seharusnya mengerti dan memahami konsep etika lingkungan.

Secara umum, etika lingkungan merupakan nilai-nilai keseimbangan dalam kehidupan manusia dengan interaksi dan interpedensi terhadap lingkungan hidupnya baik itu dari aspek biotik, abiotik, dan

[22] Rahmatullah, Inanna, dan Mustari, *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture* (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 56.

kultur. Dengan demikian, perlu adanya norma atau aturan yang melindungi sumber daya alam agar manusia tidak sewenang-wenang dalam mengeksploitasi.[23]

Etika lingkungan berfungsi dalam dua hal, *pertama,* sebagai pengimbangan atas hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. *Kedua*, membatasi tingkah laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap berada dalam batas kepentingan lingkungan.[24] Bentuk perilaku terhadap lingkungan hidup mencakup lingkungan alam fisik (tanah, air, udara) dan biologis (tumbuhan dan hewan), lingkungan buatan (sarana dan prasarana), dan lingkungan manusia (hubungan sesama manusia, baik aspek sosial maupun budaya). Dengan demikian, etika lingkungan pada dasarnya tidak hanya untuk kepentingan manusia tetapi untuk keberlanjutan ekologi.

[23] Rahmatullah dan Inanna, *Ekonomi Berkarakter Eco-Culture* (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2017), 44.

[24] Atok Miftachul Hudha, Husamah, dan Abdulkadir Rahardjanto, *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019), 64.

BAB III
Islam dan Ekonomi Hijau: Perspektif Maqashid Syariah dan Fiqh al-Biah

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan tentang lingkungan dan keberlanjutan kehidupan di dunia. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan al-Hadis yang menganjurkan dan mewajibkan setiap manusia sebagai khalifah *fil-ard* (pemimpin di bumi) untuk menjaga kelangsungan hidupnya dan kehidupan makhluk lain di bumi. Konsep yang berkaitan dengan penyelamatan dan konservasi lingkungan (alam) menyatu tak terpisahkan dengan konsep keesaan Tuhan (tauhid), syariah, dan akhlak.[25]

Bagi seorang Muslim, tauhid harus berdampingan dengan seluruh aspek kehidupan dan perilakunya. Berarti, tauhid adalah sumber etika pribadi dan kelompok, etika sosial, ekonomi dan politik, termasuk etika dalam mengembangkan sains, teknologi dan juga alam. Oleh sebab itu, setiap manusia di bumi memiliki tanggung jawab penuh untuk menjaga lingkungan dan makhluk lain yang ada di bumi.

Allah Swt. telah mengatur tentang kewajiban penjagaan lingkungan hidup, dan larangan merusak bumi, akan tetapi manusia mengingkarinya. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an surah *al-Baqarah* [2]: 12:

[25] "View of Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim Melalui Bank Sampah," 106, diakses 19 April 2022, http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4350/3280.

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi!" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan." (QS. *al-Baqarah* [2]: 11).

Sebab terjadi bencana alam dan kerusakan di muka bumi akibat perbuatan tangan manusia karena keserakahannya dan mengabaikan petunjuk Allah dan mengingkarinya. Allah Swt. berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. *ar-Rum*: 41)

Wakil Presiden Indonesia, K.H. Ma'ruf Amin juga mendukung program ekonomi hijau dan mengajak umat Islam Indonesia untuk menjadi pelopor konsep ini. Menurut beliau, konsep ekonomi hijau merupakan sebuah model ekonomi yang telah dicontohkan dalam Al-Qur'an. Sambutan wapres pada Peringatan Nuzulul Qur'an secara virtual pada Kamis, tanggal 29 April 2021. Beliau mengatakan:

> "Kita sebagai umat Islam sudah semestinya menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan *green economy*. Saya berharap ulama menjadi pelopor dan penggerak konsep ekonomi hijau."

Berdasarkan dawuh dari Wapres Indonesia, umat Islam terkhususnya ulama dapat menjadi *support* dalam merealisasikan ekonomi hijau dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang ekonomi, pertanian, maritim dan lain sebagainya, karena hal tersebut pengaruh terhadap keberlangsungan ekologi dan bencana alam yang timbul.

Untuk lebih memahami siginifikansi relasi nilai-nilai Islam dan penerapan konsep ekonomi hijau, maka di sini akan dipaparkan studi kasus dengan mengambil wilayah kajian di Madura, terutama di Pamekasan. Untuk itu akan diuraikan secara ringkas situasi Madura secara umum untuk memahami latar belakang objek penelitian ini.

Indonesia memiliki wilayah yang sangat kental dengan keagamaannya yakni agama Islam, salah satunya ialah Pulau Madura. Islam di Madura dikenal sejak runtuhnya kerajaan Majapahit dan mulainya kekuasaan Kerajaan Demak. Dengan mulainya kekuasaan Demak, maka Walisongo berdakwah memasuki pulau garam tersebut. Pada saat itu, Sunan Giri mengutus ahli agama ke Madura untuk mengenalkan Islam di lingkungan keraton yang berada di Madura.[26]

Sayyid Yusuf al-Anggawi berperan berdakwah di Madura bagian timur (Sumenep dan pulau-pulau di sekitarnya), sedangkan Sayyid Abdul Mannan al-Anggawi berdakwah di Madura bagian barat (Bangkalan, Sampang, dan Pamekasan). Di Madura, pembauran agama Islam terjadi di kalangan elite keraton, dengan maksud jika penguasa beragama Islam dan mengesahkan dirinya sebagai raja yang beragama Islam serta memasukkan syariat Islam ke dalam daerah kerajaannya, maka rakyatnya akan lebih mudah untuk memeluk agama Islam.[27]

Rencana tersebut berhasil direalisasikan, sehingga beberapa elite keraton Madura yang lain juga telah memeluk agama Islam sekaligus menjadi penyebar ajaran Nabi Muhammad saw., seperti Jokotole (penguasa Sumenep), Lembu Petteng (penguasa Sampang), Arya Menak Sunoyo (penguasa Proppo), Bonorogo (penguasa Pamekasan), dan Ki Arya Praghalba (penguasa Bangkalan).[28] Proses itulah terjadinya islamisasi di Pulau Madura.

Madura oleh Kuntowijoyo disebut sebagai "pulau seribu pesantren", karena memiliki banyak pesantren dan kiai.[29] Di Kabupaten Pamekasan sendiri pada tahun 2019, terdapat 218 pesantren dengan jumlah santri 55.001 yang tersebar di tiga belas kecamatan yang ada di kabupaten pamekasan.[30] Dan memiliki banyak tokoh agama, dan memiliki berpengaruh terhadap masyarakat, namun tergantung pada asal usul ketu-

[26] Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi Sosial Elite Politik, Tentang Perda Syariat* (Ponorogo: Stain Po Press, 2014), 113.

27 "ISLAM DI MADURA | Islamuna: Jurnal Studi Islam," 61, diakses 19 April 2022, http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/654/0.

[28] "ISLAM DI MADURA | Islamuna: Jurnal Studi Islam," 62.

[29] "Gerakan-Gerakan Sosial Keagamaan Di Madura Pada Tahun 1857-1945 - Institutional Repository," 23, Diakses 19 April 2022, Https://Digilib.Uin-Suka.Ac.Id/Id/Eprint/38749/.

[30] "Pangkalan Data Pondok Pesantren," diakses 19 April 2022, https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35.

runan, kedalaman ilmu Agama Islam, dan kesetiaan menyantuni umat.

Bagi orang Madura, yang menjadi elite utama adalah kiai, karena beliau memiliki keahliannya dalam ilmu agama dan jasanya dalam membina masyarakat dan santri. Pengaruh kiai melampaui batas pengaruh institusi-institusi kepemimpinan lainnya, termasuk pemerintah.[31] Oleh karena itu, masyarakat lebih mengadu terhadap kiai ketika ada urusan dalam kehidupan sehari-hari. Ketundukan umat kepada kiai kadang kala melampaui batas kewajaran, masyarakat acapkali menganggap setiap ucapan dan perbuatan kiai sebagai sesuatu kebenaran sehingga tidak berani melawan dan mengoreksi kiai.[32]

Masyarakat berpendapat jika melawan kiai bisa kuwalat dan kemarahan kiai dipandang sebagai sesuatu hal yang sangat ditakuti masyarakat. Karena sifat religiusnya, sehingga kiai memiliki pengaruh yang besar terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat Pamekasan, termasuk juga dalam kegiatan ekonomi.

Di samping banyaknya pondok pesantren dan takdimnya masyakarat terhadap kiai, kereligiusannya masyarakat Pamekasan juga ditandai dengan banyaknya lembaga pendidikan madrasah diniyah, yang merupakan lembaga pendidikan yang menggunakan sistem pengajaran yang berfokus pada ilmu agama seperti fikih, tauhid, bahasa Arab, dan kitab kuning.[33] Dan bukan hanya pendidikan madrasah diniyah, masyarakat Pamekasan juga dibekali pendidikan agama di masjid, yang berfokus pada pemahaman hukum tajwid dan kelancaran membaca Al-Qur'an.[34]

Di dalam kegiatan tradisi lokal Kabupaten Pamekasan seperti pelet kandung, kolom samman, dan sarwah, kiai dan nyai menjadi penyokong atas eksistensi tradisi lokal tersebut.[35] Tradisi-tradisi tersebut memiliki

---

[31] "KIAI DAN BLATER (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura) | Karsa: Journal of Social and Islamic Culture," 162, diakses 19 April 2022, http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/139.

[32] "KIAI DAN BLATER (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura) | Karsa: Journal of Social and Islamic Culture," 163.

[33] Agus Purnomo, *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi Sosial Elite Politik, Tentang Perda Syariat*, 123.

[34] Agus Purnomo, 24.

[35] Nor Hasan, "MELACAK PERAN ELITE NU DALAM PERTEMUAN ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI PAMEKASAN," *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan*

nilai-nilai agama Islam, yang secara tidak langsung melaksanakan tradisi akan tetapi juga melakukan kegiatan yang dianjurkan dalam Islam. Karena Islam dan tradisi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, namun tetap dapat dibedakan satu sama lain. Tradisi Islam Pamekasan tetap dipertahankan hingga saat ini, namun ada beberapa perubahan yang menunjukkan dinamisme budaya Islam yang tumbuh dan berkembang di Pamekasan.

Sehingga sebagai kabupaten yang memiliki nilai-nilai religius sangat tinggi dalam kehidupan, maka konsep ekonomi hijau dapat diimplementasikan secara optimal karena sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan tentunya juga melibatkan peran tokoh agama Islam. Akan tetapi peran pemerintah Pamekasan juga sangat diperlukan dalam pengimplementasian ekonomi hijau, untuk memberikan aturan, pendampingan dan pendanaan dalam setiap aspek pembangunan ekonomi hijau.

Detail lebih lanjut tentang Pamekasan dari segi kondisi geografis, sosial budaya dan keagamaan serta pemerintahan daerah dapat dilihat di Lampiran I buku ini.

Ekonomi Hijau dalam Perspektif Maqashid Syariah dan Fiqh al-Biah

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *al-maqasid* dan *al-shariah*. *Al-maqasid* adalah bentuk plural dari kata *al-maqsad* dari akar *kata al-qasd.* Secara etimologi, *al-qasd* mempunyai beberapa makna, di antaranya jalan yang lurus dan tujuan yang paling utama.[36]

Ulama modern seperti Ibnu Asyur (w. 1393) mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai hal-hal yang dikehendaki syar'i (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.[37]

Islam 8, no. 2 (5 Juli 2011): 206, https://doi.org/10.19105/nuansa.v8i2.13.

[36] Musolli, "MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORETIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER," Juni 2018, 63.

[37] Ahmad Sarwat, *MAQASHID SYARIAH* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 18.

Maqashid syariah sangat penting, para ahli teori hukum menjadikan *maqashid syariah* sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh mujtahid yang melakukan ijtihad. Inti dari teori *maqashid syariah* adalah untuk mendapatkan kebaikan dan menghindari kejahatan. Perlu diketahui bahwa Allah Swt. tidak hanya semata-mata menciptakan hukum, tetapi hukum dan aturan itu diciptakan dengan tujuan dan maksud tertentu. Sifat syariat adil, penuh rahmat, dan mengandung hikmah.[38]

Para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqashid syariah,* yaitu bahwa *maqashid syariah* harus bertumpu pada lima pokok kemaslahatan yaitu: kemaslahatan agama (*hifz al-din),* kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aql*), kemaslahatan keturunan (*hifz al-nasl*), dan kemaslahatan harta (*hifz al-maal*). Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, yaitu peringkat primer (*dharuriyyat*), peringkat sekunder (*hajjiyaat*) dan peringkat tersier (*tahsiniyyat*). Dalam penetapan hukumnya, urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya manakala bertentangan dalam kemaslahatannya.[39]

Dalam *maqashid syariah* peringkat *dharuriyyat* menduduki tempat pertama, kemudian *hajjiyat* mendahului peringkat *tahsiniyyat*. Masyarakat Indonesia untuk mencapai kebutuhan pokok masih mengalami kesulitan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Garis kemiskinan September 2021 adalah Rp486.168/orang/bulan, yang terdiri dari garis kemiskinan makanan adalah Rp360.0007 (74,05%), dan garis kemiskinan non-makanan adalah Rp126.161 (25,95%).[40] Hal ini menjadi tantangan kita bersama agar persoalan kemiskinan dapat dihapuskan dari Indonesia.

Masalah ekonomi tidak terlepas dari padatnya jumlah penduduk diiringi dengan terbatasnya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang sekarang dihadapi manusia

[38] Ghofar Shidiq, "Teori Maqashid Al-syari'ah dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (Agustus 2009): 117–18.

[39] "Kemenag Papua," diakses 19 April 2022, https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage.

[40] "Badan Pusat Statistik," diakses 19 April 2022, https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html.

secara umum disebabkan oleh dua hal, *pertama*, karena proses alam itu sendiri, kejadian ini bersifat alami. *Kedua*, sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melakukan intervensi terhadap alam, baik yang direncanakan (pembangunan) maupun yang tidak direncanakan. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, harusnya mengimplementasikan *fiqh al-biah* dalam melakukan interaksi dengan alam.[41]

Fiqh al-biah atau *fiqh* lingkungan hidup adalah ketentuan atau hukum agama Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan.[42] Wacana *fiqh al-biah* dalam kalangan ulama merupakan paradigma untuk menggiatkan mengelola dan menjaga lingkungan melalui sebuah ajaran agama Islam dan sebagai solusi alternatif dalam pengelolaan dan meminimalisasi masalah-masalah lingkungan. Indonesia yang notabene masyarakatnya umat Islam kesadaran kelestarian lingkungan hidup ditentukan oleh peran dan strategi para ulama dan kiai yang berperan serta dalam menjaga lingkungan.[43]

Sayyed Hossein Nasr, dalam Muhammad Harfin Zuhdi, membahas tentang krisis lingkungan akibat krisis spiritual manusia modern. Karena orang-orang saat ini percaya pada sains dan teknologi, tanpa disadari, integritas kemanusiaan mereka berkurang dan mereka terjebak dalam jaringan sistem rasionalitas teknis yang sangat tidak manusiawi. Beliau menggunakan dua istilah pokok yaitu *axis* dan *rim* atau *center* dan *periphery*. Menurut beliau, manusia modern telah berada di pinggiran (*rim/periphery*) eksistensinya dan bergerak menjauhi pusat (*center/axis*) eksistensinya

Rusaknya alam akibat ulah manusia sering kali diremehkan, dan menganggap bahwa semua bencana alam datangnya dari Allah, padahal tangan-tangan manusialah yang melakukannya sehingga bencana

---

[41] Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, "FIQH BI'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN," *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab* 1 (Februari 2019): 24, https://journal.uii.ac.id/thullab/article/download/13246/9636.

[42] Jamaluddin Jamaluddin, "Fiqh Al-Bi'ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah Dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih," *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (31 Juli 2018): 331–32, https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600.

[43] Ridan Muhtadi dkk., "Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh al-Bi'ah dalam Green Economy," *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (3 Desember 2019): 224.

alam menjadi langganan di Indonesia. Kondisi ini disebutkan dalam Al-Qur’an, di mana manusia acap kali menjadi penyebab terjadinya kerusakan alam, sebagaimana firman Allah dalam QS. *ar-Rum* ayat 41 dan QS. *al-Mu’minun*:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). (QS. *ar-Rum* ayat 41)

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ اَهْوَآءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ۗ بَلْ اَتَيْنٰهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُوْنَ ۗ

Dan seandainya kebenaran itu menuruti keinginan mereka, pasti binasalah langit dan bumi, dan semua yang ada di dalamnya. Bahkan Kami telah memberikan peringatan kepada mereka, tetapi mereka berpaling dari peringatan itu. (QS. *al-Mu’minun* ayat 71)

Konsep ekonomi hijau menjadi alternatif dalam menerapkan *fiqh al-biah* dalam mewujudkan hukum Islam atau *maqhashid syariah*, oleh karena itu implementasi ekonomi hijau di semua sektor perlu digiatkan agar menciptakan sistem ekonomi yang ramah lingkungan dan mewujudkan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

BAB IV
Kebijakan Pembangunan Ekonomi Hijau

A. Konsep Ekonomi dan Modal Alam

Ekonomi merupakan sesuatu yang tidak terlepaskan dari kehidupan manusia. Ekonomi atau perekonomian adalah sekumpulan kegiatan menghasilkan dan konsumsi barang atau jasa yang saling berkaitan serta membantu dalam menentukan pengalokasian sumber daya alam yang terbatas. Produksi dan konsumsi barang dan jasa bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang hidup. Perekonomian mencangkup semua aktivitas yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi di suatu daerah. Ekonomi berlaku untuk semua elemen mulai dari individu hingga entitas seperti perusahaan dan pemerintah.

Prinsip ekonomi merupakan upaya setiap orang yang terlibat di dalamnya mendapatkan sebuah hasil dari usahanya. Prinsip ekonomi memberikan pemahaman pada kita bahwa tidak ada di dunia ini yang benar-benar gratis dibutuhkan timbal balik atas apa yang diberikan sehingga untuk mendapatkan barang atau jasa kita harus berkorban atau membayar sesuatu sebagai gantinya. Berikut ciri-ciri prinsip ekonomi:

a. Bersikap rasional dalam menentukan pengeluaran berdasarkan barang yang dibutuhkan.
b. Menerapkan prinsip hemat agar kebutuhan terpenuhi tanpa berfoya-foya.
c. Menghindari *over budget* dengan berpikir secara ekonomis.

d. Menggunakan skala prioritas dengan mengedepankan kebutuhan primer sebelum kebutuhan lainnya.
e. Membandingkan antara pendapatan dan pengeluaran yang akan direalisasikan.

Adapun modal alam adalah sumber daya alam dunia yang meliputi geologi, tanah, udara, air, dan semua organisme hidup. Beberapa aset modal alami memberikan barang dan jasa secara percuma untuk manusia. Modal alam menggambarkan unsur-unsur alam yang memberikan manfaat penting disebut layanan ekosistem atau *ecosystem service*. Alam memberikan manfaat sosial yang penting bagi individu dan komunitas di seluruh dunia. Kombinasi tanah, spesies, komunitas, dan habitat dan benteng tanah yang menyediakan layanan ekosistem ini sering disebut aset.

1. Hubungan Ekonomi dengan Modal Alam

Pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan berbeda dari produk pengelola sumber daya tradisional, sebagian besar didasarkan pada partisipasi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Ini bukan hanya tentang produksi produk, tetapi juga konservasi lokal, skala spasial dan berkelanjutan ekosistem, estetika, dan fasilitas lainnya dalam jangka panjang. Penggunaan otonomi yang kompetitif memperumit penilaian ekonomi, penggunaan nonkonsumen, seperti pariwisata berbasis alam, sering kali bersaing dengan barang-barang manufaktur. Dari instansi pemerintah hingga industri yang berbeda, tenaga kerja, LSM, komunitas lokal dan warga, berbagai pemangku kepentingan mewakili kepentingan dan nilai dari sumber daya alam serta ekosistem yang bermacam.

Mengelola sumber daya alam perlu kolaborasi dan koordinasi antarorganisasi, yang semuanya harus dilakukan dalam konteks tujuan strategis bersama yang mencakup tujuan ekonomi dan lingkungan. Mengingat bahwa sumber daya alam kadang-kadang menyediakan layanan yang bersaing dan tumpang-tindih bagi banyak pengguna, dan bahwa keputusan dan kebijakan manajemen mencakup waktu dan skala geografis seperti hutan masyarakat bersarang dalam area ekosistem

hutan yang lebih besar, dan bahwa sumber daya tersebut sering menjangkau seluruh batas yurisdiksi di negara-negara, baik kerja sama vertikal maupun horizontal dan koordinasi antara pengguna sangat penting. Kemauan politik, kapasitas (misalnya, pelatihan dan sumber yang sesuai di semua tingkatan), dan kekuasaan terbuka daya budaya musyawarah dan pembagian semuanya diperlukan untuk kerja sama antara pemerintah yang efektif dan tata kelola multi-pemerintah dapat menggunakan berbagai alat. Komite antar menteri sering digunakan untuk mencapai kerja sama antar-kementerian. Komite-komite ini bertugas untuk mengembangkan dan mengoordinasikan kebijakan, menyelesaikan konflik, dan sebagainya. Tata kelola multi-level bertujuan untuk mencapai kohesi kebijakan dan inovator kebijakan.

2. Hubungan Ekonomi dengan Lingkungan

Lingkungan yang hidup dan berkembang lebih lebih dari satu komunitas, dan terjadi interaksi antara komponen yang ada, baik komponen biotik dan abiotik. Manusia menjadi pengguna utama dari lingkungan.[44] Lingkungan menyediakan sumber daya yang menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Ekonomi dengan lingkungan memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Segala aktivitas ekonomi akan dipengaruhi dan berdampak pada lingkungan sekitar. Baik dampak positif maupun dampak positif.

Berikut ini merupakan uraian tentang korelasi antara ekonomi dengan lingkungan, yaitu:

a. Manusia dalam hidupnya selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam lingkungan hidup manusia, terdapat komponen berupa makhluk hidup dan benda mati.
b. Manusia membutuhkan sumber daya lingkungan. Sumber daya adalah alat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, baik secara langsung maupun melalui proses produksi terlebih dahulu.
c. Keinginan manusia yang tidak terbatas, akan dibenturkan dengan keterbatasan sumber daya yang tersedia. Sehingga manusia akan

[44] Marulam MT Simarmata dkk., *Ekonomi Sumber Daya Alam* (Yayasan Kita Menulis, 2021), 110.

berupaya untuk memaksimalkan kepuasan dan membuat keputusan atas pilihan-pilihan dalam pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

d. Lingkungan dapat menimbulkan kerugian pada manusia apabila terjadi perubahan ekosistem yang kemudian memberikan dampak pada kualitas kehidupan manusia.[45]

B. Kebijakan Instrumen untuk Mendorong Ekonomi Hijau pada Tingkat Nasional

Pemerintah Indonesia dan Global Green World Institute (GGGI) telah menyusun program kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan dan mendukung penuh visi Rencana Pembangunan Ekonomi Hijau Indonesia. Tujuannya adalah untuk menunjukkan dan menggunakan contoh nyata dari pembangunan Indonesia dan perencanaan investasi di tingkat nasional. Melanjutkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan sosial, memaksimalkan nilai jasa ekosistem, mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK), dan melindungi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan dari guncangan ekonomi dan perubahan iklim.

Indonesia telah menikmati pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan konsisten sebesar sekitar 6% pertahun selama 15 tahun terakhir. Dengan cita-cita untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2030, Indonesia memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan berkesinambungan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berpusat pada masyarakat agar dapat memberikan standar kehidupan yang layak bagi segenap rakyat, di seluruh wilayah negara.

Ini adalah tantangan bagi Indonesia untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat sekaligus inklusif dalam mendukung tujuan sosial dan ekonomi yang ambisius seperti yang tercantum di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Rencana lima tahun tersebut menetapkan sasaran prioritas

---

[45] Yunhendri Danhas dan Bustari Muchtar, *Ekonomi Lingkungan* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), 10.

yang ambisius untuk pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya alam.

Semua prioritas ini mencerminkan kebutuhan pembangunan nasional Indonesia yang mendesak dan komitmen internasional Indonesia untuk berkontribusi pada tujuan pembangunan berkelanjutan dan berbagai langkah untuk mengatasi perubahan iklim. Gambaran atau ikhtisar ini adalah tentang bagaimana pertumbuhan hijau membantu Indonesia mencapai prioritas pembangunan sektor infrastruktur dalam konteks kawasan ekonomi khusus. Ringkasan kebijakan lain dalam seri ini berfokus pada peran pertumbuhan hijau di sektor energi. Pengelolaan hutan berkelanjutan dan penggunaan lahan serta ketahanan terhadap perubahan iklim. Untuk panduan lengkap tentang kebijakan, rencana dan jalur investasi, lihat Mewujudkan Pertumbuhan Hijau Indonesia Sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi hijau dirancang untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan standar penghidupan yang berkelanjutan dan adil, sekaligus mengurangi populasi, membangun infrastruktur bersih dan tangguh, menggunakan sumber daya secara lebih efisien, dan menghargai aset-aset alam yang sering kali tidak dapat dirasakan secara ekonomi, meskipun telah memberikan keberhasilan ekonomi dan kesejahteraan bagi umat manusia selama berabad-abad. Pertumbuhan ekonomi hijau berfokus pada kualitas pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dengan dampak sosial yang lebih baik, serta berkurangnya dampak buruk terhadap lingkungan dan sumber daya alam Indonesia. Meskipun terdapat biaya jangka pendek dalam peralihan menuju pertumbuhan ekonomi hijau, terdapat secara keseluruhan pengeluaran ini akan setimpal dengan banyaknya manfaat yang didapatkan.

Pertumbuhan ekonomi hijau memerlukan berbagai teknologi baru, institusi-institusi yang kompeten, dan kebijakan pemerintah yang efektif dalam melestarikan lingkungan, serta keterlibatan pihak swasta yang konsisten dalam peralihan menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia dan Global Green Growth Institute (GGGI) bekerja sama untuk mengerakkan program pertumbuhan ekonomi hijau, yang saat ini telah memasuki tahapan kedua. Meningkatkan akses pada kebutuhan dasar dan layanan kritis.

Meningkatkan efisiensi di sektor transportasi dan manufaktur yang padat energi akan membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu Indonesia mencapai tujuan perubahan iklimnya. Investasi jangka panjang di bidang infrastruktur juga perlu direncanakan dengan baik untuk memastikan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Prioritas utama pembangunan terkait infrastruktur dalam RPJMN saat ini adalah:[46]

1) Meningkatkan keamanan air, pangan dan energi dengan menyediakan air baku, perbaikan jaringan irigasi, pengendalian banjir dan penghematan air yang lebih efisien.
2) Mendukung konektivitas nasional untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing ekonomi dengan mengurangi waktu tempuh melalui perbaikan jalan dan pembangunan jalan untuk mendukung pembangunan daerah.
3) Meningkatkan kualitas hidup dan jangkauan pelayanan dasar melalui penyediaan air bersih, perumahan yang layak, akses terhadap sanitasi dan peningkatan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Prioritas-prioritas ini berkaitan erat dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development goals*/SDGs) dan kontribusi Indonesia yang ditetapkan secara nasional (*nationally determined contribution*/NDC) dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

GGGI mendukung Indonesia dengan Program Pertumbuhan Hijaunya dan kuat dan berkelanjutan di tiga sektor prioritas: energi berkelanjutan, lanskap berkelanjutan, dan infrastruktur berkelanjutan dalam konteks Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan sasaran akhir berikut:[47]

1) Instansi pemerintah di semua tingkatan mampu mengelola dan mendorong pertumbuhan hijau.
2) Peningkatan arus investasi hijau di sektor-sektor prioritas untuk memastikan ekosistem yang komprehensif, pengurangan emisi, lebih sehat dan lebih produktif.

---

[46] *Tentang Pertumbuhan Ekonomi Hijau*, (Jakarta, TT, 2017), hlm. 6.

[47] “Indonesia Green Growth Program,” diakses 20 April 2022, http://greengrowth.bappenas.go.id/tentang-kami/.

Berarti dukungan GGGI terhadap Indonesi memberikan peluang agar pertumbuhan ekonomi hijau dapat terealisasikan secara optimal. Seperti halnya kawasan perkotaan juga memerlukan investasi infra-struktur, yang penting untuk meningkatkan konektivitas dan manu-faktur serta untuk layanan dasar seperti air, sinitasi, dan pengelolaan limbah. Saat ini, lebih dari separuh penduduk Indonesia tinggal di perkotaan, sehingga pembangunan perkotaan menjadi prioritas bagi mayoritas penduduk.

Pembangunan di daerah pedesaan atau kepulauan juga dapat dioptimalkan seperti perbaikan konektivitas maritim dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, yang merupakan ciri dari pertum-buhan ekonomi hijau. Dukungan pemerintah saat ini berencana untuk membangun atau mengembangkan 24 pelabuhan laut dalam lima tahun, untuk meningkatkan transportasi antarpulau.

C. Kebijakan Instrumen untuk Mendorong Ekonomi Hijau pada Tingkat Daerah

Dengan prioritas pembangunan berkelanjutan yang demikian dirancang pemerintah dan dukungan dari GGGI dapat kita kaji bersama dalam pembentukan arah tujuan pembangunan dengan pembaruan yang dilakukan secara signifikan untuk perekonomian lebih maju di masa mendatang, pemerintah lebih menekankan pengelolaan hutan lestari dan penanggulangan bencana serta produktivitas upaya pe-ningkatan daya saing tinggi. Maka bukan hal baru bahwa peran sektor ekonomi menjadi lebih penting, dan *green economy* menjadi strategi pengembangan untuk sektor kehutanan.

Sebagaimana disebutkan di atas, pentingnya unsur lingkungan dalam sistem perekonomian untuk menjamin kelestarian lingkungan dan berfungsinya sumber daya alam sebagai unsur penting dalam sistem perekonomian. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama kinerja ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi berarti kinerja ekonomi yang baik dan kerusakan lingkungan tidak akan terpengaruh selama sumber daya alam melimpah dan tidak terbatas. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terha-dap perekonomian negara. Globalisasi sebagai salah satu terobosan

terpenting dalam sejarah Revolusi Industri, pengembangan sumber daya alam seperti pertambangan, dan pembangunan manusia.[48]

Dalam konteks kajian di Pamekasan ini, deskripsi usulan kebijakan *green economy* untuk Kabupaten Pamekasan dengan melihat kebijakan-kebijakan di beberapa daerah di antaranya sebagai berikut:[49]

a. Perencanaan Tata Wilayah Berdasarkan Utilitas yang Sinergis

Perencanaan tata wilayah sangat diperlukan demi tercapainya pemanfaatan ruang atau wilayah optimal. Oleh karena itu, dalam perencanaan tata wilayah harus didasarkan pada potensi wilayah atau penggunaan maksimal yang dapat diperoleh tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lingkungan. Dalam upaya pencapaian *green economy*, seluruh wilayah yang tergabung di dalamnya harus menyusun rencana tata wilayah secara bersama-sama untuk menghasilkan perencanaan yang bersinergi. Perencanaan tata wilayah yang bersinergi ialah perencanaan yang saling terkait antarwilayah atau adanya pendekatan kolaborasi di antara wilayah khusus pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut mengindikasikan faktor penentu batas, bukan hanya batas kabupaten, negara atau batas-batas administratif lainnya melainkan pertimbangan batas-batas ekosistem.

Fungsi zona khusus kawasan ekonomi khusus seperti kawasan pemukiman, pusat pemerintahan, kawasan industri dan kehutanan perlu direncanakan secara jelas. Tata ruang wilayah ini berfungsi sebagai tata guna lahan atau acuan wilayah. Hasil rencana tata ruang harus menjamin terselenggaranya pembangunan berkelanjutan di kawasan ekonomi khusus dan menjadi basis untuk pembangunan ekonomi hijau.

b. Percepatan Kawasan Industri yang Terpadu

Kawasan khusus memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi kawasan komersial yang maju. Industri yang tumbuh paling cepat saat ini adalah produksi minyak sawit dan produk pertambangan

[48] *Strategy For Developing HOB Trough a Green Economy*, (Jakarta), hlm. 40.

[49] *Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau)* (Jakarta: Kelompok Kerja Nasional (Pokjanas) Heart of Borneo, 2014), 74-80.

(khususnya untuk zona eksklusif). Sayangnya, selama ini Indonesia hanya dikenal sebagai produsen bahan baku, sehingga kemampuannya untuk menghasilkan produk olahan yang lebih bernilai masih rendah. Pemrosesan lebih lanjut mengikuti hasil bahan baku yang tinggi menjadikannya industri yang kuat, lebih efisien, dan lebih kompetitif. Pembangunan infrastruktur yang tepat diperlukan untuk mewujudkan konsep pengembangan industri yang terintegrasi.

Kawasan terpadu adalah kawasan yang semua sektornya terintegrasi dengan baik. Oleh karena itu, dalam hal ini sektor industri harus didorong untuk memperkuat integrasinya dengan jaringan atau seluruh sektor industri. Integrasi ini dapat menguntungkan karena dapat membatasi *double margin* sehingga konsumen dapat memperoleh produk dengan harga lebih murah dan menjadi produk yang lebih kompetitif. Administrator bisa mendapatkan keuntungan dari strategi ini dengan memanfaatkan efisiensi biaya transaksi sehingga keuntungan yang didapat secara keseluruhan lebih besar dibandingkan jika harus membeli barang dari administrator lain, saya bisa melakukannya. Selain keunggulan efisiensi, pasokan bahan baku juga aman.

c. Insentif, Disinsentif dan Kemudahan Produktivitas, Serta *Green Tax* bagi Pelaku Atas Kerusakan Lingkungan

Praktik ekonomi berkelanjutan yang menerapkan prinsip perlindungan terhadap lingkungan secara sadar akan sulit terlaksana *green economy* pada saat ini tanpa adanya insentif (*reward*) dan disinsentif (pajak tambahan). Pengelola dan penyuplai sekitar telah terbiasa dengan memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dari alam tanpa memperhatikan dampak buruk yang ditimbulkan.

Pemerintah harus membuat peraturan dan skema pemberian reward yang jelas bagi pengelola maupun penyuplai yang telah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan dan memberikan pajak tambahan kepada pihak-pihak yang melanggar prinsip ekonomi berkelanjutan. Pajak ini menjadi sanksi atas kegiatan-kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan, seperti solusi yang melebihi indikator lingkungan, populer dengan istilah *green tax*.

Dalam pemberian *reward* kepada pengelola yang telah lulus dari kriteria atau sertifikasi produksi yang ramah lingkungan dari pihak yang berkompeten dalam pemeliharaan lingkungan (lembaga sertifikasi dan LSM) dan kemudian mendapatkan sertifikat. Produsen yang lolos sertifikasi juga akan mendapatkan ekolabel pada produknya. Kemudian akan dihargai lebih tinggi sehingga perusahaan dapat memperoleh premi harga dan bersaing di pasar.

Ekolabel sebagai salah satu alat untuk memperluas akses pasar, terutama pasar luar negeri pada negara ekosensitif yang mensyaratkan produk-produk Indonesia memiliki ekolabel. Adapun pemerintah akan memberikan *reward* dalam bentuk kemudahan ekspor, kemudahan dalam perizinan, perpajakan, dan terkait birokrasi pemerintahan lainnya. Sehingga konsekuensi dari produsen yang tidak ramah lingkungan adalah mendapat disinsentif dari pemerintah maupun pihak eksternal dan akan mengalami kerugian terutama dalam jangka panjang ketika isu lingkungan semakin marak.

Insensitif finansial baru termasuk pembayaran untuk jasa ekosistem, pembayaran untuk kredit karbon yang dihasilkan melalui skema *Reducing Emissions from Deforestation* and *Forest Degradation* (REDD +) untuk sektor kehutanan dan proyek *Clean Development Mechanism* (CDM) untuk sektor kehutanan dan sektor tambang dapat memberikan bagi industri yang berbasis *Green Economy*.

Dana internasional harus disediakan untuk mengakui jasa atau insentif dari pengelolaan lingkungan yang disediakan secara internasional. Dana ditujukan kepada kelompok usaha masyarakat dan juga perusahaan atas upaya pengurangan emisi karbon melalui pengelolaan hutan yang baik seperti pengelolaan secara berkelanjutan (SFM), penebangan dengan dampak yang dikurangi (*Reduced Impact Logging*/ RIL), atau restorasi ekosistem dan konservasi hutan.

Model insentif dan *reward* hanya akan berhasil apabila terdapat skema yang jelas. Skema atas pemberian *reward* tersebut harus disusun secara jelas dalam sebuah peraturan ataupun dalam bentuk perjanjian. Seperti yang diterapkan di Kolombia untuk penambangan emas kecil yang berkelanjutan. Dari produksi yang berkelanjutan, emas menerima premium di pasar dan keuntungannya diteruskan ke produsen dan masyarakat, seperti pada contoh di bawah ini:

1) 10% diberikan kepada penambang yang bersertifikasi sebagai insentif ekonomi langsung untuk jasa lingkungan.
2) 30% memungkinkan sayap komersial dari program itu untuk dapat dipertahankan.
3) 60% diinvestasikan kembali di wilayah tersebut dalam proyek pembangunan.

d. Energi Alternatif yang Ramah Lingkungan

Bahan bakar minyak merupakan energi utama yang digunakan di mana pun termasuk semua sektor ekonomi. Pamekasan memiliki potensi untuk menggunakan energi alternatif dari air dan matahari. Meski biayanya cukup mahal, namun sebanding dengan dampaknya terhadap lingkungan. Sudah saatnya, pemerintah mengembangkan energi ramah lingkungan ini buat sektor ekonomi sebagai strategi pengembangan ekonomi hijau.[50]

Berikut kebijakan-kebijakan dalam mendorong ekonomi hijau pada daerah-daerah lain, yang bisa diterapkan di Pamekasan:

1) Desa Wisata Hijau

Desa Wisata Hijau didefinisikan sebagai pengembangan desa wisata berdasarkan model pemberdayaan masyarakat setempat, dan produk utamanya terkait dengan prinsip menjaga lingkungan alam, ekonomi, dan sosial budaya daerah.

Tujuan utama dari pengembangan desa *green tourism* adalah mengubah cara berpikir pembangunan dari serakah pariwisata menjadi pariwisata hijau. Perubahan pemikiran ini menjelaskan bahwa tujuan pengembangan Desa Wisata Hijau tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dalam jangka pendek, tetapi juga untuk melestarikan sumber daya alam dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Pengembangan desa wisata yang rimbun memiliki beberapa keunggulan, antara lain:[51]

1) Meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial budaya masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

[50] 41-43.

[51] Victoria Br. Simanungkalit, *Buku Panduan Pembangunan Desa Wisata,* (Jakarta Selatan: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah, t.th.), 23–24.

2) Mendukung pembangunan jangka panjang (prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan) dan mempromosikan kesadaran akan perlindungan lingkungan.
3) Melestarikan dan memajukan warisan budaya untuk kepentingan masyarakat.
4) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (prinsip pengembangan pariwisata berbasis masyarakat).
5) Kepada masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya, termasuk kepuasan dan kebahagiaan.
6) Menguntungkan masyarakat, lingkungan dan masyarakat lokal serta mendorong kunjungan wisatawan bukan sebaliknya.
7) Mempromosikan konsep keseimbangan antara kepuasan wisatawan dan kepuasan masyarakat untuk menghindari kejengkelan sosial di masyarakat.

Dalam mengimplementasikannya, kebijakan pengembangan desa wisata hijau meliputi prinsip-prinsip dasar sebagai berikut:

1) Melibatkan dan menguntungkan bagi masyarakat setempat.
2) Menerapkan pengembangan produk pariwisata perdesaan berbasis pelestarian.
3) Mendayagunakan sumber daya lokal berbasis pelestarian.
4) Berskala kecil untuk memudahkan terjadinya hubungan timbal balik dengan masyarakat setempat.
5) Memanfaatkan sarana dan prsarana masyarakat setempat.
6) Mendorong jejaring antarkawasan.

Atas dasar prinsip-prinsip tersebut di atas, maka pengembangan desa wisata hijau ditetapkan berdasarkan sebagai berikut:

1) Penghargaan atas kearifan lokal masyarakat desa.
2) Keaslian dan keunikan yang dipengaruhi oleh kondisi dan pengembangan ekonomi dan sosial budaya setempat, misalnya nilai ruang, sejarah dan budaya, pertanian, bentangan alam (saujana), jasa, pusaka (*heritage*), serta pengalaman yang unik dan eksotis khas daerah.
3) Dapat terus dan secara kreatif mengembangkan identitas atau ciri khas perdesaannya.

4) Dukungan penuh dari segala lapisan masyarakat desa untuk pembangunan desa wisata hijau.
5) Kerja sama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha serta meminimalkan adanya persaingan negatif antardesa yang dapat melemahkan iklim usaha yang ada.

Untuk melakukan hal ini, maka diperlukan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1) Komitmen kuat dari semua pemangku kepentingan untuk secara konsisten membangun desa wisata hijau terutama dari pihak pemerintah pusat dan daerah.
2) Mendorong masyarakat lokal sebagai pelaku utama pembangunan.
3) Para pihak selalu melakukan pendampingan dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia.
4) Mangaitkan rencana kegiatan dengan kebijakan pusat (K/L) dan daerah (SKPD) untuk keberlanjutannya.[52]

D. Manfaat Kebijakan Berbasis Ekonomi Hijau

Gerakan ekonomi hijau meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan standar hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan, sekaligus mengurangi polusi, membangun infrastruktur yang bersih dan tangguh, serta menggunakan sumber daya secara lebih efisien. Tujuannya untuk menilai sumber daya alam yang sering kali tidak layak secara ekonomi. Kemakmuran dan berabad-abad kemakmuran. Pertumbuhan hijau berfokus pada peningkatan kesejahteraan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi, dampak sosial yang lebih baik dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan dan sumber daya alam Indonesia.[53]

Kebutuhan kebijakan ekonomi hijau di Indonesia menjadi mendesak untuk mewujudkan cita-cita negara untuk mencapai pemerataan pembangunan antargenerasi di masa kini maupun masa mendatang.

---

[52] Victoria Br. Simanungkalit, *Panduan Pembangunan Desa Wisata*, (Jakarta Selatan, TT, 2017), hlm. 29.

[53] Global Green Growth Institute (GGGI), *BRIEF: iNFRASTRUKTUR, Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Membantu Indonesia Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah?*, 2017, 8.

Pendekatan ekonomi hijau dapat membawa kebermanfaatan di berbagai aspek sebagai berikut:

1. Melindungi sumber daya, pemanfaatan sumber daya alam untuk aktivitas produksi telah banyak dilakukan, namun dalam ekonomi hijau pemanfaatan sumber daya harus digunakan secara efisien dan tidak mengeksploitasi, karena jika defisit sumber daya alam akan berdampak ke berbagai sektor, baik ekonomi, pertanian, wisata dan keuangan. Kegiatan ekonomi dikatakan menggunakan pendekatan ekonomi hijau jika dalam proses produksi barang dan jasa menggunakan bahan baku efisien dan menggunakan energi yang rendah emisi dari BAU dan melalui proses produksi yang memenuhi kaidah-kaidah sesuai ketentuan (misalnya legalitas sumber bahan baku, sistem ketenagakerjaan).[54]
   Dengan demikian, bukan hanya lingkungan yang diuntungkan, namun juga masyarakat secara kesuluruhan di mana ongkos akibat pembakaran energi fosil yang berlebihan akan dapat ditekan dan dampak perubahan iklim terhadap risiko penurunan kesehatan dan risiko bencana dapat dikurangi. Di Kabupaten Pamekasan, penggunaan sumber daya alam dalam kegiatan ekonomi dapat memengaruhi keberlanjutan sumber daya yang digunakan. Contohnya dalam kegiatan industri, jika air tidak digunakan secara efisien maka hal tersebut dapat terjadinya krisis air di masa sekarang atau mendatang.
2. Pemanfaatan jasa lingkungan, konsep jasa lingkungan dalam pendekatan ekonomi hijau perlu disusunnya strategi pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang jelas menguntungkan ekonomi dan masyarakat.[55] Mekanisme PES (*payment for ecosystem services*) memungkinkan biaya jasa lingkungan yang belum dibayar tecermin sehingga membangun ekonomi yang efisien secara lingkungan. Kebijakan yang mendukung PES juga dapat melipatgandakan jumlah pemangku kepentingan yang dapat berinvestasi dalam

[54] *Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau)*, 44.

[55] *Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau)*, 47.

modal alam dan meningkatkan jumlah uang yang tersedia untuk mengelola jasa lingkungan utama.[56] PES dapat diimplemetasikan di berbagai sektor, salah satunya di sektor pariwisata, di mana Pamekasan merupakan kabupaten yang memiliki banyak jenis wisata, baik wisata religi, wisata budaya, dan wisata alam. Oleh karena itu, selain mendatangkan investor, masyarakat sekitar akan terdampak manfaat dan dapat menikmati nilai ekonomi dari kompensasi atas usaha mereka dalam menggunakan jasa lingkungan.

3. Pengembangan ekonomi rendah karbon, pengembangan ekonomi rendah karbon merupakan aktivitas yang berpotensi menurunkan dan menyerap emisi gas rumah kaca, penggunaan rendah karbon menempatkan tujuan SDGs ke 13 (aksi perubahan iklim).[57]
   Proyek ini mencakup lingkup sektor kehutanan, pertanian, dan perkebunan. Kementerian perencanaan dan pembangunan nasional memiliki 7 implementasi proyek pembangunan rendah karbon di Indonesia, di antaranya:[58]
   a) pemanfaatan biogas untuk pasokan energi rumah tangga,
   b) rehabilitasi hulu das berbasis masyarakat,
   c) konservasi ekosistem nipah dan hutan penyangga bagian timur suaka margasatwa sungai lamandau sebagai kawasan pencadangan hutan kemasyarakatan (HKM),
   d) ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat rentan melalui pertanian berkelanjutan,
   e) ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat rentan melalui pertanian berkelanjutan,
   f) model reforma agraria untuk peningkatan produktivitas sumber daya hutan,

[56] ESCAP, *Kebijakan sosial ekonomi inovatif untuk meningkatkan kinerja lingkungan: Imbal jasa lingkungan* (Bangkok: PBB, 2009), 6.

[57] Kementrian PPN, *7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia* (Jakarta: Sekretariat PPN, 2020), 4.

[58] Kementrian PPN, 6–7.

g) pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai taman wisata mangrove dalam upaya rehabilitasi ekosistem dan sekuestrasi karbon—Belitung Mangrove Park (BMP). Ketujuh implementasi proyek tersebut dapat diimplementasikan di Kabupaten Pamekasan dengan melihat potensi dan kebutuhan dari suatu daerah masing-masing daerah dan optimis berdampak ke ekonomi, lingkungan dan sosial di Kabupaten Pamekasan.

Contohnya, jika BAPPENAS mengimplementasikan proyek ketahanan pangan dan peningkatan ekonomi di Kabupaten Pamekasan melalui pertanian berkelanjutan dengan menggandeng beberapa *stakeholders* seperti dinas pertanian, dinas kelautan dan masyarakat, maka akan meningkatkan hasil padi, meningkatkan pendapatan, dan menurunkan serta menyerap GRK. Proyek-proyek tersebut secara tidak langsung mendukung dan mencapai tujuan SDGs. Dengan demikian, pengembangan ekonomi harus memperhatikan dampak teknologi yang digunakan terhadap lingkungan, untuk mengurangi dan menanggulangi kerugian di masa mendatang.

4. Mengurangi risiko lingkungan dan sosial. Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan ialah menghambat tujuan SDGs, dalam pendekatan ekonomi hijau dapat terhindar dari risiko lingkungan dan nilai manfaat ekonomi akan meningkat.[59] Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi di Kabupaten Pamekasan perlu mengurangi dan mengelola limbah dan polusi serta menerapkan kegiatan rendah karbon. Contohnya ialah produksi rokok di Pamekasan, industri rokok perlu mengendalikan polusi dan pencemaran limbah B3 (bahan berbahaya beracun) yang berdampak ke lingkungan dan masyarakat. Dengan pengurangan dan pengendalian tersebut maka meminimalisasi risiko lingkungan seperti tanah dan air tercemar, timbulnya penyakit, terganggunya ekologi dan terjadinya pemanasan global. Dalam kegiatan perkebunan dan pertanian, perlunya meminimalisasi penggunaan pestisida dan pupuk kimiawi, karena aktivitas tersebut berdampak terhadap kesuburan

[59] *Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau)*, 48.

tanah, penurunan produktivitas dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi hijau dapat mencegah terjadinya risiko lingkungan dan sosial dengan tetap menjaga lingkungan di dunia industri, pertanian, perkebunan, dan lain sebagainya

5. Optimalnya ekonomi berbasis keanekaragaman hayati.[60] Dalam pengimplementasiannya ekonomi berbasis keanekaragaman hayati akan bermanfaat bagi ekosistem karena terhindar dari kerusakan dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, artinya ekonomi berbasis keanekaragaman hayati ini diperlukan sinergi dari masyarakat sekitar untuk melestarikan sumber daya lokal. Dalam strategi ekonomi hijau untuk merealisasikan SDGs diperlukan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan strategi dan kebutuhan. Manfaat langsung yang dapat dirasakan masyarakat ialah melindungi dan meningkatkan produktivitas, penyerapan karbon, memanfaatkan jasa lingkungan, dan membangun sumber pencaharian lestari. Pamekasan dapat mengoptimalkan manfaat dan strategi ekosistem kehutanan, ekosistem pertanian dan ekosistem kelautan dalam mengimplementasikan pendekatan ekonomi hijau. Pada tahun 2021 Pamekasan memiliki luas lahan pertanian 17.927 ha.[61] Hal ini berpotensi untuk merealisasikan ekonomi hijau dengan cara meningkatkan produktivitas padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau jalar, dan sayuran.
6. Berdampak terhadap ekonomi secara makro dan regional.[62] Sebagaimana yang kita ketahui ekonomi hijau akan meningkatkan investasi hijau, dalam hal ini akan menggerakkan ekonomi lokal dengan pendayagunaan sumber daya alam yang efisien dan berkelanjutan. Kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya alam tanpa memperhatikan lingkungan juga akan menimbulkan

[60] *Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau)*, 49.

[61] “Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan,” 149, diakses 19 April 2022, https://pamekasankab.bps.go.id/publication/2022/02/25/0bf7afe45145290d21de0727/kabupaten-pamekasan-dalam-angka-2022.html.

[62] *Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau)*, 49.

masalah-masalah sosial. Di Pamekasan penggunaan sumber daya ilegal terjadi pada sektor pertambangan galian C yang tersebar di daerah Palengaan, Batumarmar dan Pasean, galian tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan, terjadinya banjir dan longsor, mengancam keberadaan populasi satwa di sekitarnya, serta merugikan negara. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan di daerah-daerah tersebut selain dibutuhkan perizinan juga perlu diterapkan ekonomi hijau.

7. Pemanfaatan bank sampah, bank sampah merupakan salah satu strategi dalam pengimplementasian 3R *(reduce, reuse,* dan *recycle)* pada pengelolaan sampah di tingkat masyarakat.[63] Program ini untuk memberikan solusi mengenai banyaknya sampah yang dihasilkan oleh masyarakat setiap harinya.
   Oleh karena itu, masyarakat harus memilah sampah, karena beberapa sampah juga memiliki nilai ekonomis. Sulit untuk mengubah perilaku masyarakat untuk memilah sampah serta mengubah paradigma kumpul—angkut—buang menjadi pengolahan yang bertumpu pada pengurangan sampah dan penanganan sampah.[64] Oleh karena itu, perlunya sosialisasi dan ketegasan dari pemerintah perihal pengelolaan sampah ini kepada masyarakat, dengan mengeluarkan regulasi dan kebijakan yang terkait dengan sampah, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
   Pengolahan sampah ini perlu dioptimalkan untuk mewujudkan program internasional yakni, pembangunan berkelanjutan. Maka perlu menghapus paradigma lama menganut konsep sampah dibuang,

[63] I. Nyoman Widnyana Wartama dan Ni Putu Sawitri Nandari, "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Desa Sidakarya Denpasar Selatan," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (23 Desember 2020): 41.

[64] "Strategi Pengembangan Bank Sampah di Wilayah Depok | Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)," 408, diakses 19 April 2022, https://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/view/13637.

ditimbun, atau dibakar.[65] Dan harusnya menganut paradigma mengurangi sampah dengan menggunakan kembali barang yang biasanya dibuang atau menjadikan sampah sebagai barang yang dapat dimanfaatkan, karena selain menjaga lingkungan juga menjadikan nilai ekonomi. Pengurangan dan pengelolaan sampah di pamekasan menjadi target dalam menggalakkan ekonomi hijau di pamekasan. Hingga saat ini, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan dengan pengurangan sampah sangat minim, sehingga semakin hari dalam memenuhi kebutuhan juga semakin meningkat pula jumlah sampah di Pamekasan. Untuk itu, diperlukan kesadaran pengolahan sampah melalui 3R.

[65] Teguh Usis, *Sampah, Amanah, Rupiah* (Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021), 9.

BAB V
Optimalisasi Ekonomi Hijau untuk Kesejahteraan

A. Sektor Pariwisata

Sudah tidak dimungkiri kembali bahwa sektor pariwisata telah berdampak besar bagi masyarakat dan pemerintah, dan telah menjadi penyumbang ekonomi pada Kabupaten Pamekasan. Objek-objek wisata di Kabupaten Pamekasan di antaranya Makam Ronggosukowati, Pasarean Batu Ambar, Talang Siring, Api Tak Kunjung Padam, Museum Mandhilaras, dan Pantai Jumiang. Tercatat pada tahun 2019 terdapat 158.084 pengunjung objek wisata di Kabupaten Pamekasan dan umumnya berasal dari Nusantara *domestik*.[66]

Destinasi wisata yang menjadi tempat favorit bagi pengunjung adalah Tepi laut Jumiang yang berlokasi di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, Tepi Laut Jumiang atau yang biasa kita sebut Pantai Jumiang merupakan pantai yang sondai dengan daerah pantai yang berpasir, berbatu, dan berlumpur, dengan kekayaan terumbu karang yang sangat melimpah.[67] Terdapat 48.651 pengunjung yang datang ke Pantai Jumiang (BPS Pamekasan, 2019: 209). Salah satu wisata Bahari yang menawarkan keindahan pantai adalah Talang siring, keasrian pada tempat tersebut yang menjadi daya tarik wisatawan dan cocok untuk liburan dengan pasangan dan keluarga. Terdapat

[66] *BPS* (Pamekasan: BPS Kabupaten Pamekasan, 2021), 199.

[67] Farid Ardyansyah, "Analisis Risiko Operasional Pada Kawasan Pantai Jumiang Pamekasan," Vol. 1 No. 1, (Januari 2022) 57.

sekitar 37.367 pengunjung yang berasal dari Nusantara *Domestic*, perlu diadakan renovasi dan inovasi dalam tata kelola pada Pantai Talang Siring tersebut agar nantinya menambah nilai tawar bagi pengunjung untuk datang pada tempat tersebut.

Wisata religi yang menjadi tujuan bagi para pengunjung adalah Pasarean Batu Ampar yang bertempatkan di Kecamatan Proppo, hal ini dilihat dari kultur masyarakat yang kental dengan religiusitas dan konstruksi sosial-budaya yang masih kuat. Sebagaimana tecermin dalam peribahasa lokal Madura setempat *buppa', babhu' ghuruh, ratoh* (bapak, ibu guru, dan ratu atau yang bisa sebut pemerintah) hal itu menjadi sistem hierarki yang sampai saat ini masih ada dan masih kuat dalam kalangan setempat.[68] Terdapat UMKM di sekitar wisata religi tersebut yang menyuguhkan kuliner khas Madura seperti rujak madura, Campor Lorju', dan beberapa oleh-oleh yang dapat dibawa pulang, pada tahun 2019 tercatat 52.115 pengunjung yang datang pada destinasi wisata religi Pasarean Batu Ampar tersebut.

Tabel 5.1 Jumlah Tamu Objek Wisata Menurut Objek Wisata dan Asal Pengunjung di Kabupaten Pamekasan 2019-2020

Objek Wisata	2019		2020	
	Mancanegara	Nusantara	Mancanegara	Nusantara
Api Tak Kunjung Padam	-	16.185	-	-
Pantai Jumiang	-	48.651	-	-
Pantai Talang Siring	-	37.367	-	-
Pasarean Batu Ampar	-	52.115	-	-
Makam Ronggosukowati	-	1.147	-	-
Museum Mandhilaras	-	2.169	-	-
Jumlah		158.084	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan.

Adapun wisata lain seperti api abadi atau yang biasa dikenal dengan api tak kunjung padam yang berkawasan di Asemanis Satu, Larangan Tokol, Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan menyuguhkan api abadi

[68] Abd. Hannan dan Fithriyah Rahmawati, "Strategi Pembangunnn Pariwisata Daerah Berkelanjutan Melalui Konsep Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal," Vol. 2, No. 1, (Juni 2020) 105

yang muncul secara alamiah dari dasar perut bumi, di sana pengunjung tidak hanya menikmati api abadi, namun bisa sambil menikmati ikan bakar yang bisa dimasak sendiri, adapula jagung yang bisa dibakar di tempat langsung, Makam Ronggosukowati merupakan makam raja dari keraton Mandhilaras yang ada di Pamekasan dan sudah menjadi destinasi wisata sejarah, dan menjadi identitas bagi Pamekasan itu sendiri, tepatnya di baratnya pasar Kolpajung, pengunjung makam Ronggosukowati pada tahun 2019 mencapai 1.147 dan ini masih minim dibandingkan dengan pengunjung Museum Mandhhilaras yang mencapai 2.619.[69] Adapun Museum Mandhilaras sendiri, telah menjadi destinasi tak tergantikan bagi penikmat wisata sejarah dan budaya, museum tersebut dikelola langsung oleh Pemerintah setempat dan tempatnya berada pada jantung Kota Pamekasan. Peluang untuk wisata-wisata tersebut sangat siginifikan, di samping menjadi *icon* Pamekasan, juga menjadi salah satu cagar budaya Pamekasan yang nantinya harus dijaga secara turun-temurun, serta menjadi sumber pendapatan masyarakat dan pemasukan kas Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Pariwisata telah menjadi salah satu pemasukan terbesar dalam setiap daerah khususnya di Kabupaten Pamekasan. Tak heran, masyarakat yang sadar wisata dengan memanfaatkan kearifan lokal yang berhasil memunculkan objek wisata baru, belakangan ini yang muncul objek wisata seperti Bukit Brukoh, Puncak Ratu, Toron Samalem, Pantai The Legend, Hutan Mangrove desa Lembung, dan wisata Tambak Garam menjadi agrowisata di Pamekasan.

Demi tercapainya pembangunan parawisata berkelanjutan perlu adanya korelasi dan koordinasi yang baik dengan masyarakat dan Pemerintah sehingga tercapainya relevansi yang kuat dengan militan pembangunan berkelanjutan di dukung adanya penjagaan, pelestarian, dan pemeliharaan kelestarian lingkungan (alam).[70] Pentingnya kesadaran ligkungan *(eco-culture)* harus dimiliki oleh setiap elemen, dengan memanfaatkan potensi alam, dan identitas budaya yang telah diwariskan seharusnya dapat menunjang aktualisasi kota menjadi

[69] *Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan*,

[70] *Ibid*., 111-112.

lebih terdepan, dan untuk mendukung perekonomian daerah yang ada di Kota Pamekasan. Adanya objek wisata yang beraneka ragam di Pamekasan diharapkan dapat menjadi ladang baru bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kapasitasnya dengan memanfaatkan wisatawan yang ada, dan tetap menjaga kebersihan lingkungan agar wisata tersebut dapat dilestarikan.

Setiap kabupaten yang ada di Madura mempunyai karakteristik kebudayaan yang berbeda, bonus geografi yang dimiliki setiap kabupaten yang menyebabkan objek wisata menjadi unik, seperti di Pamekasan sendiri, setiap kecamatan sudah sepantasnya mempunyai *positioning* produk pariwisata tersendiri dengan unik dan selaras dengan identitas masing masing. Menurut Teguh Hidayat Rachmad, setiap objek wisata adalah sebuah penerapan yang mesti ditentukan *postioning* produk dari setiap kabupaten secara teritorial.[71] Jadi, kalau dikaitkan dengan kecamatan yang ada di Pamekasan, maka setiap objek wisata harus juga ditentukan *product positioning* agar konsep yang ada pada setiap wisata dapat bertahan dan brand wisata akan selalu ada di setiap benak pengunjung sehingga nantinya pengunjung akan merasa ingin balik lagi kepada tempat tersebut.

Setiap objek wisata haruslah dipertajam dengan promosi-promosi yang ada di semua media, masuknya kita pada era 4.0 merupakan langkah awal untuk mem-*branding* objek wisata agar lebih dikenal luas oleh masyarakat, apalagi sampai internasional, dengan memanfaatkan sosial media dan menunjukkan ciri khas dan diferensiasi produk wisata, maka akan mempermudah wisatawan untuk datang dan mengetahui wisata apa yang akan mereka datangi nanti, baik *offline* dan *online* semua media promosi haruslah digunakan sebaik mungkin. Hal itu akan berdampak besar bagi wisata-wisata yang ada di Kabupaten Pamekasan karena pengembangan pariwisata sangat berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat lokal.

Objek wisata yang ada di Pamekasan, tidak keok terhadap pesaing dengan objek wisata di kabupaten lain khususnya di Madura seperti Sumenep, Sampang, Bangkalan. Namun perlu adanya koordinasi yang baik antara 3 kabupaten tersebut, agar dapat bersama-sama me-

[71] Amir Hamzah,dkk *Madura 2020* (Malang: Intelegensia Media, 2018), 120.

ngembangkan pariwisatanya. Melalui bantuan Pemerintah dengan adanya Dinas Kebudayaan dan Pariwista agar bisa menjadi jalan dan *support* demi tercapainya pariwisata berkelanjutan.[72] Melalui slogan Kabupaten Pamekasan, yaitu Gerbang Salam (Gerakan Pembangunan Masyarakat Islami) yang sekaligus menjadi *icon* Kota Pamekasan yang dikenal dengan kota religius didukung dengan adanya wisata religi seperti Pasarean Batu Ampar, hal itu menambah citra Pamekasan kepada masyarakat umum bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten dengan wisata religi yang berada di Pulau Madura.

Stigma yang timbul di luar Kabupaten Pamekasan, khususnya untuk Madura sendiri adalah budaya Carok. Budaya tersebut dinilai menjadi *bad value* bagi masyarakat Madura, bisa jadi yang menjadi penyebab terhambatnya pengunjung nasional datang ke Madura karena takut dengan budaya carok tersebut yang menyebabkan seakan-akan *attitude* orang Madura yang sangat keras dan kasar, padahal tidak demikian. Prasangka itu yang harus dieliminiasi dan menjadi tugas pertama kita untuk mengikis berbagai prasangka negatif tersebut. Madura dan warganya sesungguhnya secara faktual tidak seperti itu. Warga Madura adalah warga yang ramah, religius, memiliki empati dan senantiasa *welcome* terhadap tamu.[73]

Keberadaan pondok pesantren yang banyak tersebar di Pulau Madura khususnya di Kabupaten Pamekasan, dengan adanya pesantren tersebut diharapkan dapat menjadi *add value* wisatawan mellihat Kota Pamekasan bisa dikatakan kota religi, dan juga pemahaman akan nilai-nilai kearifan lokal yang ada di Kabupaten Pamekasan perlu ditingkatkan. Adapun wisata-wisata yang muncul, baik secara alamiah maupun buatan harus dikelola seoptimal mungkin dan upayakan kawasan wisata yang tersebar di seluruh Kabupaten Pamekasan haruslah menempatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama yang akan memperoleh *income* dari pendapatan tersebut.

Realistically, pariwisata yang ada di Pamekasan belum bisa dikatakan sebagai kata ideal, bukan menganggap remeh terhadap pembangunan pariwisatanya, namun kurang adanya pengawalan

[72] *Ibid*., 135.

[73] Iqbal Nurul Azhar, dkk., *Madura 2040,* (Malang: Intelegensia Media, 2019) 4.

dari pemerintah, dan tata kelola kurang baik, serta manajemen yang menurut saya masih kurang optimal, (kurang kesungguhan). Padahal bisnis pariwisata merupakan bisnis yang seksi dan menjadi sektor yang tumbuh pesat. Hal itulah yang menyebabkan kenapa pariwisata yang ada di Madura khususnya Kabupaten Pamekasan kurang dilirik oleh investor. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 pun menyebutkan bahwa negara menjadikan pariwisata bagian pembangunan nasional. Pilihan pariwisata pun kemudian berbasis pada nilai-nilai agama dan lokal sebuah masyarakat.[74]

B. Sektor Pertanian

Pertanian adalah kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan oleh manusia untuk menghasilkan suatu bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi serta yang digunakan untuk mengelola lingkungan hidupnya.[75] Sektor pertanian memiliki makna penting karena mengingat negara kita merupakan negara agraris yang menggantungkan sebagian besar perekonomian pada sektor pertanian. Sehingga tidak jarang setiap daerah di Indonesia tentu diperkaya dengan hasil alam yang beragam dan berbeda jenis.

Sektor pertanian memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi *pertama* sebagai sumber investasi sektor nonpertanian, surplus uang pada sektor pertanian akan menjadi sumber dana investasi di sektor lain. *Kedua*, yakni sebagai sumber bahan baku bagi sektor lainnya seperti agroindustri dan perdagangan. *Ketiga*, dengan peningkatan permintaan pasar output, sebagai sumber diversifikasi produksi di sektor ekonomi lainnya.[76] Peran pertanian menjadi dasar bagi proses terjadinya transformasi struktural. Sehingga sektor pertanian memiliki peran yang semakin penting karena sifatnya yang dinamis dan memiliki keterkaitan yang luas. Selain itu juga efek penting pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan industrialisasi.

---

[74] *Ibid*., 11.

[75] Zulkifli Sjamsir, *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal,* (Makassar: CV. Sah Media, 2017), 25.

[76] Lutfi Muta'ali, *Dinamika Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019), 13.

Pembangunan sektor pertanian termasuk media efektif untuk meminimalisasi kemiskinan dan memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian pedesaan memiliki kontributor kemiskinan paling besar. Dengan meningkatnya produktivitas pertanian akan secara simultan meningkatkan standar hidup petani, mengurangi kemiskinan, meningkatkan penyerapan pasar domestik terhadap produk industri serta dapat mendinamiskan kegiatan perdagangan.

Pamekasan termasuk salah satu kabupaten yang memiliki luas pertanian yang cukup tinggi. Total keseluruhan lahan pertanian di Kabupaten Pamekasan yaitu mencapai 64.919 Ha atau sekitar 82% dari total administratif Kabupaten Pamekasan. Di mana sebesar 28% dari wilayah pertanian tersebut merupakan lahan sawah yang terdiri atas sawah tadah hujan dengan luas 11.284 Ha dan sawah teknis seluas 7.500 Ha, sedangkan untuk lahan pertanian jagung seluas 6.038 Ha.[77]

Faktor alam memiliki peranan penting dalam pertanian. Pengaruh alam terhadap pertanian terdiri dari iklim, topografi, pengairan, angin, dan jenis tanah. Luas dan batas wilayah administrasi Kabupaten Pamekasan mempunyai luas daerah 79.230 Ha serta secara administrasi sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sedangkan untuk sebelah selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang, serta di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Kabupaten Pamekasan termasuk salah satu kabupaten di kawasan Madura yang secara astronomis berada pada 113019’-113058’ BT dan 6051’-7031’ LS.

Kondisi topografi Pamekasan dilihat atas ketinggian dan kelerangan, di mana ditinjau dari kondisi topografi ini Kabupaten Pamekasan terletak di ketinggian 0-340 meter di atas permukaan laut. Sementara itu, topografi luas lahan di Kabupaten Pamekasan memiliki tingkat kemiringan dan ketinggian yang berbeda di setiap kecamatan yang tentu saja memberikan potensi yang berbeda perihal tata guna lahan. Seperti Kecamatan Tlanakan yang memiliki kemiringan lahan 00-150 di mana meliputi seluruh luas lahannya sebesar 4.810 Ha. Kondisi

[77] Sayyidi Sayyidi dan Fawaid Akh., “Mewujudkan Desa Wisata, Melalui Penataan Kawasan Pertanian Untuk Peningkatan Ekonomi Desa,” *Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 6, No. 1 (2 Juni 2021): 18, Https://Doi.Org/10.36636/Dialektika.V6i1.574.

kemiringan lahan yang sama juga terdapat di Kecamatan Pademawu dan Galis. Selain itu, beberapa kecamatan lain ada yang mempunyai tingkat kemiringan lahan hingga 400.500 seperti kecamatan Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru, dan Batumarmar. Wilayah yang mempunyai tingkat kemiringan lahan yang tinggi ini rata-rata merupakan perbukitan yang merupakan dataran tinggi dengan potensi berupa area pertanian dan perkebunan.

Adapun geologi struktur tanah di Kabupaten Pamekasan, yaitu meliputi empat jenis, yaitu tanah aluvial, regosol, mediteran, dan litosol. Berdasarkan jenis lapisan tanah yang berbeda-beda, menjadikan Kabupaten Pamekasan memiliki berbagai potensi yang beragam. Adapun untuk jenis lapisan tanah aluvial banyak terdapat di Kecamatan Pademawu dan jenis tanah ini cocok digunakan sebagai area persawahan. Adapun untuk jenis lapisan tanah yang lain terdapat hampir di seluruh wilayah Kabupaten Pamekasan. Secara umum, hampir sebagian besar tanah di Kabupaten Pamekasan terdiri atas jenis regosol dengan luas sebesar 26.214 Ha. Jenis tanah regosol ini cukup subur dan cocok dimanfaatkan sebagai pertanian padi, palawija, kelapa, dan tebu. Adapun jenis tanah litosol juga tersebar hampir di seluruh wilayah, yaitu dengan luas sebesar 19.084 Ha.

Data indikator iklim meliputi curah hujan dan hari hujan. Curah hujan merupakan besarnya volume atau intensitas air hujan dalam kurun waktu tertentu yang diukur dengan alat penakar hujan dengan menggunakan satuan mm. Adapun hari hujan merupakan satu hari di mana terjadi hujan dalam satu tahun. Data curah hujan ini ditampilkan dalam bentuk intensitas curah hujan di setiap stasiun penakar hujan per bulan selama kurun waktu satu tahun pengamatan.

Adapun untuk potensi hasil pertanian berdasarkan Badan Pusat Statistik, yaitu dari data luas tanaman sayur-sayuran yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 yang mempunyai areal terluas adalah tanaman bawang merah, yaitu sebesar 2.726 Ha dengan hasil produksi sebesar 197.910 kuintal. Diikuti oleh luas areal tanaman cabai rawit 2.587 ha dengan produksi sebesar 130.004 kuintal.[78]

[78] *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2021*, 139.

Tabel 5.2 Produksi Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Pamekasan (Kuintal), 2018-2020

Jenis Tanaman	2018	2019	2020
Bawang Daun	1.155	1.284	1.147
Bawang Merah	186.948	157.113	197.910
Bawang Putih	-	-	-
Bayam	1.482	2.045	1.641
Blewah	300	-	-
Buncis	1.975	1.634	600
Cabai Besar	19.538	15.624	14.507
Cabai Rawit	246.856	156.211	130.004
Jamur	-	-	-
Kacang Merah	-	-	-
Kacang Panjang	7.286	4.833	2.800
Kangkung	2.910	3.737	3.035
Kembang Kol	-	5	-
Kentang	-	-	-
Mentimun	2.230	2.522	2.679
Kubis	-	10	205
Labu Siam	30	145	115
Sawi	880	1.005	909
Semangka	9.965	10.731	9.732
Terong	1420	3.373	2.693
Tomat	3.144	5.242	5.158

Sumber: BPS Kabupaten Pamekasan, sumber data diolah.

Potensi pertanian tanaman pangan Kabupaten Pamekasan yaitu:[79]

1. Potensi tanaman padi tersebar di Kecamatan Proppo, Larangan, Pademawu, Pegantenan, Pakong, Palengaan, Waru, Batumarmar, Kadur, dan Pasean.
2. Potensi jagung tersebar di Kecamatan Galis, Pademawu, Palengaan, Waru, Batumarmar, Kadur, dan Pasean.
3. Potensi kedelai di Kecamatan Pamekasan, Larangan, Pegantenan, Pakong, Palengaan, dan Batumarmar.

[79] *Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021*, t.th., 4.

4. Tanaman kacang tanah di Kecamatan Proppo, Galis, Larangan, Pakong, Palengaan, Waru, Batumarmar, dan Pasean.
5. Potensi Kacang hijau yaitu di Kecamatan Pamekasan, Proppo, Larangan, Pademawu, Pakong, Palengaan, Kadur, dan Pasean.
6. Ubi kayu di Kecamatan Pamekasan, Proppo, Galis, Larangan, Pademawu, Pegantenan, Pakong, Palengaan, Baturmarmar, dan Pasean.
7. Ubi jalar di Kecamatan Proppo, Tlanakan, Galis, Palengaan, dan Batumarmar.
8. Kacang panjang tersebar di Kecamatan Proppo, Tlanakan, Larangan, Pegantenan, Pakong, Palengaan, Waru, dan Batumarmar.

Dari data luas tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 yang mempunyai areal terluas adalah perkebunan tembakau, yaitu sebesar 29.875 Ha dengan hasil produksi sebesar 20.881 ton. Diikuti oleh luas areal perkebunan kelapa 5.613 Ha dengan produksi sebesar 4.648 ton. Adapun untuk produksi tanaman buah Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dengan nilai produksi dalam kuintal, potensi terbesar yaitu buah pisang sebanyak 105.990 kuintal dan wilayah dengan potensi pisang paling banyak berada di Kecamatan Pademawu, baru kemudian buah mangga sebanyak 75.079 kuintal dengan wilayah penghasil terbesar terletak di Kecamatan Proppo, serta buah jeruk sebesar 15.663 kuintal dengan wilayah penghasil terbanyak yaitu Kecamatan Larangan.

Kawasan industri pertanian memiliki luas sebesar 92,40 Ha dan tersebar di 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Tlanakan, Pegantenan, Pademawu, Galis, Pamekasan, Larangan, Kadur, Batumarmar, Pakong, dan Waru. Untuk kawasan terluas yaitu berada di Kecamatan Pademawu sebesar 32,4 Ha. Kawasan sawah terbagi menjadi tiga jenis yaitu sawah irigasi, drainase, dan tadah hujan.[80] Sawah irigasi memiliki luas sebesar 1.385,00 Ha, sawah semi irigasi seluas 5.213,03 Ha, dan yang paling luas, yaitu sawah tadah hujan seluas 8.569,00 Ha. Hal tersebut dikarenakan keadaan tanah yang tidak kedap air. Untuk sawah irigasi hanya terdapat di Kecamatan Proppo, Tlanakan, Pakong, Pegantenan,

[80] Sayyidi dan Akh., "Mewujudkan Desa Wisata, Melalui Penataan Kawasan Pertanian Untuk Peningkatan Ekonomi Desa," 20.

Pasean, dan Batumarmar. Berdasarkan luasnya lahan tersebut seharusnya bisa menjadi peluang agar lahan pertanian tidak hanya digunakan untuk konsumsi saja, akan tetapi juga dijadikan sebagai peluang agar dapat dimanfaatkan sebagai kawasan wisata pertanian. Sehingga keuntungan yang diperoleh tidak hanya dari hasil pertanian, akan tetapi juga dari retribusi wisata.

C. Sektor Maritim (Perikanan)

Perikanan merupakan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan hingga dengan pemasaran yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Secara geografis negara Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu dengan jumlah 17.502 pulau serta luas wilayah laut sekitar 5,8 juta km^2 yang terdiri dari perairan kepulauan dan teritorial seluas 3,1 juta km^2 serta perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dengan luas 2,7 juta km^2. Berdasarkan kondisi tersebut, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, yaitu mencapai 95.181 km. Sehingga dengan kondisi tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah populasi nelayan yang patut diperhitungkan dan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah. Dengan melimpahnya kekayaan maritim Indonesia akan berperan penting dan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan sektor ekonomi Indonesia.[81]

Salah satu ruang yang mempunyai potensi cukup besar dalam pengembangan wilayah yaitu wilayah pesisir dan laut. Wilayah pesisir memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, baik sumber daya yang dapat diperbarui ataupun sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Selain hal tersebut, wilayah ini juga memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti transportasi, pelabuhan, industri, permukiman, dan pariwisata. Akan tetapi pembangunan

[81] Agus Sulaiman Bolkiah, Muh. Ilham, dan Etin Indrayani, "Evaluasi Program Bidang Pemberdayaan Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur," *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 13, no. 2 (5 Agustus 2021): 364, https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.439.

wilayah pesisir juga harus tetap memperhatikan keseimbangan, baik antara tingkat pembangunan dan daya dukung lingkungan serta keseimbangan pembangunan antardaerah. Pengembangan wilayah harus menjadi suatu upaya untuk menumbuhkan perekonomian wilayah dan lokal sehingga suatu wilayah dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Adapun Sumber daya maritim yang dapat diperbarui terdiri atas hutan mangrove, terumbu karang, padang lamun dan rumput laut, sumber daya perikanan laut serta bahan-bahan bioaktif.

Di negara Indonesia, pengelolaan sumber daya yang berbasis masyarakat telah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut secara tegas menginginkan agar pelaksanaan penguasaan negara atas sumber daya alam khususnya sumber daya maritim diarahkan demi tercapainya manfaat yang besar bagi kemakmuran masyarakat banyak dan juga agar mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan sekaligus untuk memperbaiki kehidupan masyarakat. Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten di Pulau Madura yang mempunyai potensi cukup besar terhadap sektor perikanan. Salah satu daerah di Kabupaten Pamekasan yang memiliki potensi pengembangan agroindustri pengolahan ikan, yaitu Kecamatan Pademawu dan Tlanakan.[82]

Berdasarkan data Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, Kabupaten Pamekasan menyumbangkan 21% dari total volume produksi perikanan wilayah Madura.

Tabel 5.3 Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan 2017-2019 (ton)

No.	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
1.	Tlanakan	-	10.633,2	11.233,2
2.	Pademawu	-	5.015,4	3.226,8

[82] Nurrisalah Hayati dan Taufik Rizal Dwi Adi Nugroho, "Pengembangan Agroindustri Wilayah Pesisir Berbasis Komoditas Unggulan Ikan Hasil Tangkapan," *Agriekonomika* 7, no. 1 (1 April 2018): 2, https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i1.3590.

No.	Kecamatan	Tahun		
		2017	2018	2019
3.	Galis	-	166,6	591,5
4.	Larangan	-	2.492,8	794,8
5.	Kadur	-	0	105,5
6.	Batumarmar	-	1.352,9	856,2
7.	Pasean	-	2.028,1	2.746,1
Total			21.689	19.554,1

Sumber: BPS Kab. Pamekasan tahun 2017-2019.

Kabupaten Pamekasan merupakan kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang terbentang pada garis pantai sepanjang 52 km, pantai selatan sepanjang 34 km yang terdiri dari empat wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Tlanakan, Larangan, Pademawu, dan Galis. Adapun pantai utara sepanjang 18 km yang terdiri dari dua wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Batumarmar dan Pasean.[83]

Dengan adanya otonomi daerah, maka setiap pemerintah daerah diharapkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan segala potensi daerah yang ada secara maksimal. Sumber daya perikanan merupakan salah satu potensi sumber daya alam Kabupaten Pamekasan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku usaha perikanan.

Kabupaten Pamekasan mempunyai berbagai potensi sumber daya perikanan yang cukup besar baik sumber daya laut maupun darat dan memiliki prospek yang baik untuk dikembangkan di Kabupaten Pamekasan mencakup perikanan tangkap atau laut, perikanan budi daya serta pengolahan hasil perikanan. Komoditas perikanan yang potensial di Kabupaten Pamekasan di antaranya, yaitu ikan teri, garam, dan rumput laut. Selain itu komoditas yang juga cukup berpotensi yaitu budi daya udang vannamei pada lahan tambak dan budi daya air tawar khususnya ikan lele.

[83] Agus Sulaiman Bolkiah, Muh. Ilham, dan Etin Indrayani, "Evaluasi Program Bidang Pemberdayaan Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur," 370.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (3) dijelaskan bahwa adanya urusan pilihan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam melakukan proses pemerintahan. Salah satu urusan pilihan yang diambil oleh Kabupaten Pamekasan yaitu mengenai kelautan dan perikanan.

D. Sektor Perumahan

Secara geografi luas Kabupaten Pamekasan sebesar 792,30 Km², yang terpecah menjadi 13 kecamatan, dengan daerah bagian terluas adalah Kecamatan Batumarmar dengan Ibukota Kecamatan Tamberu dengan luas 97,05 Km², dan kecamatan dengan luas daerah kecil terletak di Kecamatan Pamekasan dengan Ibukota Patemon, yaitu sekitar 26,47 Km².[84] Namun, Kecamatan Pamekasan menjadi jantung kota Kabupaten Pamekasan karena dinilai strategis, mudah dijangkau, dan warisan-warisan budaya ada di jantung Kota Pamekasan. Melihat sektor perumahan sangat pas untuk didirikan di sekitar kota Pamekasan di antaranya Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, dan Pamekasan.[85] Karena jarak dari kecamatan ke ibukota di Pamekasan sangatlah cukup dekat hal ini banyak investor atau pemilik modal menamakan modanya untuk menjadi *passive income* dan mengambil peluang terhadap pertumbuhan masyarakat.

Indonesia sendiri, program pembiayaan perumahan terjangkau sudah tersedia dan berbentuk KPR atau kredit pemilik rumah, dan ini berlaku pada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Namun, menurut (Soeroto, 2018) program tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan efisien, di sisi lain keterjangkauan perumahan dalam bentuk pembiayaan belum terkelola dengan bijak, dan belum dirancang dengan baik; pasokan dan permintaan perumahan yang juga menjadi kendala dana segera diatasi.[86]

[84] *Badan Pusat Statistik* Kabupaten Pamekasan, hlm. 9.

[85] *Ibid*., 7.

[86] Neysa Dianesdhika Jasrul dan Ayomi Dita Rarasati, "Faktor-Fator Paling Berpengaruh Terhadap Penyediaan Perumahan Dan Aksebilitas Pembiayaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah," Vol. 7, No. 1 (Januari 2022) hlm. 331.

Dalam kawasan yang urban, masalah pun juga muncul pada alih fungsi lahan, dan ini biasa terjadi pada metropolis yang diakibatkan oleh pertumbuhan penduduk perkotaan yang semakin tinggi. Menurut (Santosa, 2011) konflik peralihan alih fungsi lahan sering terjadi dan sukar untuk dihilangkan, seperti alih fungsi lahan yang semula pertanian menjadi non-pertanian, faktor tersebut karena memiliki nilai rendah karena area tersebut dekat dengan perkotaan.[87] Peningkatan pertumbuhan penduduk menjadi salah satu faktor meningkatnya tempat hunian bagi masyarakat, ditinjau secara alamiah semakin menambahnya anggota keluarga dan didukung dengan urbanisasi yang terjadi pada daerah tersebut. Pemerintah harus memikirkan secara inklusif tata kelola ruang supaya tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan antarmasyarakat, jika dilihat pada studi kasus di atas, lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian harus dipikirkan ulang, karena lahan pertanian khususnya sawah sangat berperan penting dalam penyediaan kebutuhan sandang, pangan, dan papan pada masyarakat, sekaligus pengatur dalam penyerapan air dan penyerapan karbon di udara.

Kembali ke Pamekasan, *population growth* pada Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang stagnan, atau di bawah 1%. Tercatat laju pertumbuhan populasi penduduk per tahun dari tahun 2010-2020 sekitar 0,66%.[88] Hal ini disebabkan karena banyak perubahan tempat tinggal penduduk yang semula menjadi tempat tinggal, kini menjadi tempat usaha karena dinilai dapat menghasilkan pendapatan, dan juga tutupnya pesantren yang ada di daerah Kabupaten Pamekasan serta berkurangnya santri-santri pada pesantren-pesantren wilayah Kabupaten Pamekasan.

Melihat data tersebut, sektor perumahan yang terjadi pada Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dikarenakan laju pertumbuhan penduduk pada Kabupaten Pamekasan yang masih di bawah 1% mengakibatkan sektor perumahan tidak banyak dilirik oleh masyarakat. Hal tersebut masih menjadi minoritas

[87] Rizqi Wardiana Sari dan Eppy Yuliani, "Identifikasi Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian Untuk Perumahan," Vol. 1, No. 2 (September 2021).

[88] *Badan Pusat Statistik* Kabupaten Pamekasan, 57.

dari sektor lain seperti pariwisata dan pertanian. Didukung dengan masyarakat Pamekasan yang banyak merantau dan menetap pada daerah yang dirantau menyebabkan laju pertumbuhan penduduk sangatlah lambat.

Data menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia di Kabupaten Pamekasan, tercatat pada tahun 2020 Indeks Pembangunan Manusia adalah 66,26. Dan indeks tersebut tersusun dari beberapa indeks di antaranya Indeks Kesehatan sebesar 0,73; indeks pendidikan tercatat 0,60; dan Indeks PPP sebesar 0,66.[89] Dapat dilihat bahwa pembangunan Manusia di Kabupaten Pamekasan mengalami peningkatan jika dilihat dari tren 2010-2020, maka sangatlah menguntungkan dan justru menjadi peluang secara sosial dan teritorial Pamekasan dapat berkembang menjadi lebih progresif dengan menciptakan sumber daya manusia yang kompatibel dengan zaman.

Mari kita perhatikan indikator penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pamekasan 2010-2020 pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Pamekasan, 2010-2020

Indikator				
Tahun	**Usia Harapan Hidup (Tahun)**	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**	**Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)**	**Pengeluaran Perkapita Rill disesuaikan (Rp.000)**
2010	66,38	12,34	5,11	6 532
2011	66,43	12,52	5,30	6 922
2012	66,48	12,70	5,36	7 260
2013	66,53	13,05	5,68	7 445
2014	66,56	13,32	5,72	7 478
2015	66,86	13,34	5,73	7 679
2016	66,95	13,35	6,08	7 975
2017	66,05	13,61	6,25	8 311
2018	66,22	13,62	6,35	8 536
2019	66,45	13,63	6,40	8 834
2020	58	13,64	6,69	8 739

Sumber: BPS dalam Angka hlm.130.

[89] *Badan Pusat Statistik* Kabupaten Pamekasan 74.

Data tersebut menunjukkan bahwa Pembangunan manusia 10 tahun terakhir mengalami kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa penduduk Pamekasan memiliki keinginan dan terbuka untuk kemajuan yang lebih baik. Data terakhir pada tahun 2020 menunjukkan bahwa usia harapan hidup menduduki angka 67,58 dan ini bisa menjadi acuan akan kebutuhan rumah hunian dikarenakan semakin menambahnya populasi penduduk.

Kebutuhan akan hunian memang sangat dibutuhkan, lambat laun perumahan yang layak ditempati di Kabupaten Pamekasan akan menjadi incaran masyarakat khususnya mereka yang melakukan urbanisasi untuk melanjutkan karier atau pendidikan di daerah perkotaan. Namun perlu juga untuk memikirkan permasalahan yang terjadi pada sektor perumahan. Pemerintah pun juga ikut andil dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat di Indonesia, program "Sejuta Rumah" sebagai rencana program perumahan terjangkau dan layak huni di Indonesia merupakan program Kementerian PUPR yang telah terjadi dan dilaksanakan sejak tahun 2015, maksud program tersebut untuk menggerakkan *stakeholder* atau pemangku kepentingan di bidang perumahan untuk mengurangi *blacklog* (selisih antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan). Sasarannya pun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal tersebut didukung dengan dikeluarkan nya Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri PUPR No. 12 Tahun 2020 yang berbunyi:

> "Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran Masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu."[90]

Program tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah turut serta dalam mendukung masyarakat yang bertaraf hidup baik dan layak. Meskipun program tersebut masih ada beberapa permasalahan seperti bantuan pembiayaan yang ada tergolong belum terjangkau, dan alur pembiayaan yang masih simpang siur, perlunya memutar otak kembali

[90] Neysa Dianesdhika J., *Faktor-faktor Paling berpengaruh terhadap Penyediaan Perumahan,* hlm. 332.

agar permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik, didukung peran akademisi dengan menyumbangkan teori-teori serta ide-ide terbaru agar dapat meyelesaikan persoalan tersebut.

Pentingnya Lahan Hijau di Area Perumahan

Dampak perumahan terhadap lingkungan juga menjadi perhatian penting. Perubahan alih fungsi lahan dikarenakan pembangungan tersebut telah menyumbang emisi gas rumah kaca khususnya gas CO^2, CH4,N_2O, PFC, HFC, SF_6 dalam jumlah yang cukup besar. Terlebih lagi peralihan lahan dari pertanian menjadi non-pertanian dapat membuat hilangnya produksi oksigen yang terjadi dalam kawasan tersebut. Kejadian yang bisa kita rasakan saat ini adalah bergesernya siklus musim dilanjutkan pemanasan global yang cukup lama.[91] Tentunya ini menjadi PR bersama bagaimana menciptakan rumah layak huni dengan emisi karbon yang sangat minim.

Perumahan memang menjadi salah satu faktor peningkatan ekonomi dalam suatu daerah. Namun, perlu adanya satu sistem ekonomi berkelanjutan yang sumber daya alam di Indonesia dapat dirasakan oleh anak cucu nanti. Adanya program perumahan yang berkelanjutan perlu didukung dengan program kawasan yang asri, agar produksi O^2 atau oksigen tetap ada dampak pemanasan global yang terjadi dapat berkurang.

E. Sektor Pertambangan

Sudah tidak di elakan lagi bahwa sektor pertambangan merupakan unit yang *urgent* serta mempunyai pengaruh yang sangat signifikan. Pertambangan adalah sistem wirausaha ekstraktif di mana kita mengambil sumber daya (*Resouche*) kemudian mengelolahnya. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual, pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi dan di bawah permukaan air.[92] Dalam pertambangan terdapat peraturan-

[91] Siti Zubaidah Kurdi, "pengaruh Emisi CO_2 Dari Sektor Perumahan Perkotaan Terhadap Kualitas Lingkungan Global," (18 Desember 2017), hlm. 138.

[92] "Badan Pusat statistik Indonesia," https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.

peraturan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 1967 di dalamnya terdapat penggolongan bahan dan terbagi menjadi 3 golongan, yaitu:

1. Bahan galian golongan A, adalah bahan galian golongan strategis. Maksudnya strategis bagi pertahanan dan juga keamanan negara atau bagi perekenomian negara.
2. Bahan galian golongan B, merupakan bahan galian vital, adalah bahan galian yang dapat menjamin kebutuhan hidup banyak orang.
3. Bahan galian C, adalah bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B seperti Nitrat, Garam batu, Kaolin Dll.

Kemudian bahan galian tersebut diatur lebih perinci berdasarkan Pemerintah No. 27 Tahun 1980.[93] Kemudian, didapatkanlah bentuk-bentuk legalitas kewenangan pengelolaan dari undang-undang tersebut bahwa pemerintah mendapatkan kesempatan untuk melakukan pengelolaan bahan galian dengan landasan hukum. Legalitas kewenangan pengelola bidang pertambangan memberikan kesempatan bagi pihak swasta, baik swasta asing maupun nasional, wewenang tersebut telah ada pada saat berlakunya UU No. 11 Tahun 1967.[94]

Pada Kabupaten Pemekasan dilihat dari jumlah air didistribusikan sekitar 215.887 M^3, hal ini membuktikan bahwa pertambangan yang ada di Kabupaten Pamekasan sudah mengalami signifikasi yang cukup tinggi. Namun masih ada oknum-okunum yang menguasai sistem wirausaha ekstraktif tersebut, mafia-mafia yang ada di dalamnya menguasai daerah-daerah yang berpotensi ada mineral di dalamnya, seperti yang terjadi pada tahun 2020, sekitar 350 lebih titik Galian C yang belum memiliki legalitas atau perizinan oleh pemerintah. Dan juga dampak dari kegiatan tersebut sangatlah mengenaskan khususnya dari faktor lingkungan dan kesehatan pada masyarakat sekitar.[95] Pemerintah harus segera memberikan penegakan hukum pertambangan baik dari segi administrasi, dari perdata maupun pidana, agar oknum atau oligarki tersebut dapat menimbulkan efek jera

hlm. 2022.

[93] Nandang Sudrajat, *Teori dan praktik pertambangan Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013), 54.

[94] *Ibid*., 56.

[95] Moh Tamimi, "Mongabay: Situs Berita Lingkungan," https://www.mongabay.co.id/ 2020/ 07/02/kala-mahasiswa-protes-tambang-galian-c-di-pamekasan/, 2 Juli 2020.

agar cap atau kesan buruk terhadap kegiatan ektraktif tersebut yang mengatakan *zero value,* sebagai akibat dari penambang yang tidak memenuhi ketentuan dan kaidah teknis yang benar dan dihilangkan.

Persoalan persoalan yang kerap kali muncul dalam aktivitas usaha pertambangan tersebut di antaranya:

1. Terkorbankannya pemilik lahan. Bahwa kegiatan pertambangan tersebut lebih kepada ego atau kepentingan pemegang hak atas lahan tersebut dikarenakan sistem administrasi pertanahan yang masih kurang baik dan juga *legal standing* yang terdapat pada daerah tersebut. Keadaan tersebut sangat mudah dimanfaatkan oleh oknum dengan membuat surat tanah dari desa setempat.
2. Kerusakan lingkungan. Hal ini tentunya akan menimbulkan rusaknya lingkungan dan munculnya pencemaran dikarenkan ada perubahan permukaan bumi yang secara geologi. Oleh karenanya, perlu adanya perencanaan dan manajemen yang sangat matang karena hal tersebut akan berdampak kepada jangka panjang terutama pada lingkungan yang ada pada teritorial tersebut.

Konsep pengolahan bahan galian atau usaha pertambangan bukan hanya menjawab tudingan miring atau stigma yang ada pada masyarakat, namun cakupan tersebut lebih universal dan komprehensif, perlu juga memiliki semangat, maksud, dan tujuan yang jelas seperti:

1. Mengendalikan peyaluran pemanfaatan galian, dengan pengutamaan diberikan kepada bangsa dan negara.
2. Meningkatkan *meaning recovery* atau hasil galian semaksimal mungkin;
3. Pertambahan daya guna pemakaian bahan tambang sebagai solusi ekonomis pendayagunaan bahan dasar industri dengan ukuran berkelanjutan, disebabkan bahan galian adalah suatu energi yang tidak terbarukan, artinya penghematan juga berkaitan agar anak cucu kita juga dapat merasakan nanti.
4. Meningkatkan devisa negara dari sektor pertambangan.[96]

[96] Nandang, *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*, 166.

> "Menghadapi masalah kelangkaan, manusia harus bersikap bijak dan rasional serta bertanggung jawab dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk kemaslahatan bersama."[97]

Begitulah seharusnya yang dilakukan oleh umat manusia demi terjaga keseimbangan yang ada di bumi, khususnya dalam pertambangan yang sumber dayanya sangatlah terbatas perlu adanya konsep atau peraturan dalam menjaga atau mengatur sumber daya tersebut agar dampak yang ditimbulkan oleh pertambangan sangatlah minim karena itu semua merupakan tugas dan tanggung jawab kita bersama selaku pemimpin di muka bumi ini. Terutama kepada sumber daya manusianya selaku pengelola alam perlunya menanamkan rasa kepedulian yang tinggi.

Dalam buku ini memberikan suatu saran agar pertambangan yang dilakukan bisa mengurangi dampak yang terjadi kepada alam salah satunya lingkungan yang bisa dikatakan rantai kehidupan bagi makhluk hidup dikarenakan ada sumber sumber yang melimpah ruah dan harus dikelola dengan baik oleh manusia.

Undang-undang yang ada dalam suatu negara merupakan autosistem, pengatur dalam tatanan kehidupan secara teritorial. Penulis memberikan saran terhadap pembaca dengan membuat suatu regulasi yang bisa membuat suatu perubahan dalam aktivitas pertambangan. Seperti penanaman kembali pohon atau tanaman yang sudah dirusak atau ditebang untuk memudahkan aktivitas penambang tersebut.

Perlu adanya tindak lanjut pasca penambangan terhadap lingkungan untuk bagaimana ekosistem di tempat penambangan tersebut tidak mati. Penanaman edukasi kepada penambang sangatlah penting agar setiap *stakeholder* dapat saling menjaga supaya tetap kondusif dan bisa dapat dikendalikan.

F. Sektor Perternakan

Peternakan termasuk penghasil utama protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Lokasi untuk penyebaran serta pengem-

[97] Rahmatullah and innana, *BUKU ECO-CULTURE* (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017), 13.

bangan ternak merupakan suatu tempat di wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu desa atau lebih dalam satu kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak. Daerah penyebaran dan pengembangan ternak merupakan konsentrasi penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri atas beberapa lokasi dalam satu kabupaten. Tujuan penyebaran dan pengembangan ternak di daerah untuk membentuk kawasan peternakan, keseimbangan pembangunan antarwilayah, optimalisasi sumber daya dalam meningkatkan pendapatan peternak, populasi dan produksi dalam rangka pemberdayaan masyarakat peternak.[98]

Peternakan merupakan kegiatan mengembangbiakkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut. Akan tetapi pengertian peternakan tidak hanya terbatas pada pemeliharaan saja, namun juga pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan peternakan adalah mencari keuntungan dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Berdasarkan ukuran hewan ternak, bidang peternakan dapat dibagi atas dua golongan, yaitu peternakan hewan besar seperti sapi, kerbau, dan kuda. Adapun kelompok kedua, yaitu peternakan hewan kecil seperti ayam, kelinci, dan lain-lain.

Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ternak di Pulau Madura. Akan tetapi persebaran kawasan peternakan di Kabupaten Pamekasan masih belum merata. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, antara lain faktor geografis wilayah, faktor sosial serta faktor ekonomi. Faktor geografis wilayah memiliki peranan penting dalam persebaran kawasan ternak. Faktor ini memengaruhi ketersediaan pakan dan juga kebutuhan ruang dalam pengembangan usaha peternakan.

Dalam pembangunan pertanian, pembangunan peternakan adalah salah satu aspek yang penting terutama untuk mengantisipasi gejolak ekonomi dan moneter. Oleh karena itu, peningkatan pemba-

[98] Taufik Rahman, "Studi Perencanaan Pengembangan Kawasan Ternak di Kabupaten Pamekasan," *Rekayasa* 11, no. 1 (2 April 2018): 60–61, https://doi.org/10.21107/rekayasa.v11i1.4126.

ngunan peternakan harus dilakukan secara terus-menerus secara berkesinambungan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani peternak.[99]

Salah satu potensi terbesar bidang peternakan di Pamekasan, yaitu sapi potong. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur menyebutkan bahwa jumlah populasi ternak sapi potong di Pamekasan pada tahun 2019, yaitu sebanyak 194.182 ekor, sedangkan pada tahun 2020 jumlahnya meningkat sebanyak 194.286 ekor.

Tabel 5.5 Populasi dan Jenis Ternak di Kabupaten Pamekasan (Ekor), 2019 dan 2020

Jenis ternak	Tahun	
	2019	**2020**
Sapi perah	13	13
Sapi potong	194.182	194.286
Kerbau	–	–
Kuda	34	26
Kambing	66.437	66.385
Domba	22.117	22.117

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, sumber data diolah.

Sapi Madura termasuk salah satu tipe sapi potong lokal plasma nutfah Indonesia yang memiliki keunggulan yaitu kinerja reproduksi lebih baik daripada sapi dari Bos Taurus yang lebih tahan terhadap panas dan penyakit caplak. Sapi Madura termasuk hewan ternak yang dapat dikembangkan sebagai sapi tipe pedaging, tipe kerja dan sebagai sapi budaya yaitu sapi sonok dan sapi kerapan. Di mana untuk sapi Madura jantan akan dijadikan sebagai sapi kerapan, sedangkan sapi Madura betina dijadikan sebagai sapi sonok.[100]

Salah satu keggulan sapi Madura di antaranya, yaitu tahan terhadap kondisi pakan yang memiliki kualitas rendah. Sapi sonok merupakan sepasang sapi Madura berjenis kelamin betina yang unggul. Pemeliharaan sapi sonok dilaksanakan secara semi intensif oleh

[99] Rahman, 61.

[100] Selvia Nurlaila dan Moh. Zali, "Faktor Memengaruhi Peningkatan Populasi Sapi Madura di Sentra Sapi Sonok Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis* 7, no. 1 (16 Januari 2020): 22, https://doi.org/10.33772/jitro.v7i1.8711.

peternak di Kabupaten Pamekasan. Beberapa tahap penyeleksian dilakukan sebelum menjadi sapi sonok sehingga sapi sonok layak disebut sebagai sapi bibit. Keberadaan sapi sonok menciptakan teknologi pemurnian untuk membibitkan sapi Madura yang berkualitas serta menjaga kelestarian dalam meningkatkan performa atau tampilan sapi Madura. Keunggulan yang dimiliki sapi sonok dibandingkan dengan sapi Madura pada umumnya, yaitu dari aspek genetik yang dilakukan seleksi secara ketat, mulai dari pemilihan tetua, seleksi performan individu hingga tes hasil keturunannya dan aspek pemeliharaannya tergolong pola pemeliharaan optimal.[101]

Pengembangan sapi Madura banyak dilakukan di sentra sapi sonok yang meliputi empat kecamatan di Kabupaten Pamekasan yang biasa disebut dengan Papabaru (Pakong, Pasean, Batumarmar, dan Waru). Kemurnian sapi Madura sangat dijaga sehingga di wilayah Madura dilarang untuk melakukan perkawinan secara silang. Sentra sapi sonok merupakan wilayah dengan performan sapi Madura unggul. Di mana sentra ini memberikan sumbangsih untuk meningkatkan ketersediaan, kelestarian, serta menjaga kemurnian sapi Madura.

Sapi Madura di kawasan sentra tersebut dipersiapkan untuk menjadi sapi Madura unggulan. Sapi Madura yang dikenal sebagai sapi taccek atau sapi pajangan akan dilihat dari beberapa sisi potensi bentuk tubuhnya. Sedangkan sapi Madura yang tidak memenuhi kriteria tersebut akan dijadikan sebagai sapi potong biasa. Sapi sonok merupakan sebuah kontes yang dapat menghasilkan bibit sapi Madura yang mempunyai performa unggul. Daerah Papabaru Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra peternakan. Faktor-faktor potensi alam juga dapat memengaruhi peningkatan populasi sapi Madura di sentra sapi sonok Kabupaten Pamekasan, yaitu curah hujan, luas pertanian, jumlah rumah tangga peternak serta jumlah penduduk.[102]

---

[101] Nurlaila S. dkk., "Status Reproduksi dan Potensi Sapi Sonok di Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Ilmiah Peternakan Terpadu* 6, no. 3 (28 April 2019): 147, https://doi.org/10.23960/jipt.v6i3.p147-154.

[102] Nurlaila dan Zali, "Faktor Memengaruhi Peningkatan Populasi Sapi Madura di Sentra Sapi Sonok Kabupaten Pamekasan," 22.

G. Sektor Ekonomi (Investasi Ekonomi Hijau, Beserta Tata Kelola Risiko)

Kesejahteraan masyarakat dalam mempertahankan hidup bergantung terhadap kemampuan alam untuk menyediakan beberapa sumber daya. Manusia menggunakan air dan udara bersih serta iklim yang cukup untuk mendukung kehidupan. Tanah, sungai, dan laut yang produktif untuk sumber makanan, sumber mineral dan energi untuk mendorong perekonomian.[103] Tidak ada negara yang dapat mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan yang terpisah secara sendiri. Akan tetapi negara perlu mengakui adanya saling ketergantungan yang tidak terbantahkan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup dengan kemajuan sosial. Para pemimpin haruslah mengambil tindakan dalam semua aspek keputusan kebijakan, perencanaan serta investasi. Langkah ke depan untuk Indonesia beserta komunitas global dalam hal ini haruslah menggunakan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau berdasarkan strategi yang secara bersamaan mencari jalan keluar untuk mengurangi tingkat kemiskinan, inklusi sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi termasuk perkembangan kegiatan dalam suatu perekonomian yang menimbulkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat semakin meningkat. Problematika mengenai pertumbuhan ekonomi dapat dilihat sebagai masalah makro ekonomi jangka panjang. Salah satu indikator penting yang digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan berdasarkan data PDRB, baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan.[104] Adapun untuk pembangunan ekonomi, yaitu proses yang multidimensi di mana melibatkan perubahan besar dalam hal struktur ekonomi, perubahan sosial, pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Pada

---

[103] Global Green Growth Institute, *Mewujudkan Perumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera* (Jakarta, 2015), 2.

[104] Dedy Arifuddin Setiawan, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan" 1, no. 2 (2020): 74.

dasarnya pembangunan daerah dilakukan dengan usaha sendiri dan bantuan teknis serta bantuan dari pemerintah. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi masih menjadi target utama dalam rencana pembangunan daerah selain dari pembangunan sosial. Pertumbuhan ekonomi di setiap daerah akan berbeda sesuai dengan potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap daerah. Di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.[105]

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hijau di Indonesia terdiri atas peta jalan yang menguraikan pendekatan yang ambisius untuk mencapai perubahan yang transformasial selama 35 tahun ke depan. Peta jalan ini menjelaskan mengenai kebijakan, perangkat, metode-metode yang dirancang untuk memastikan tidak hanya pertumbuhan ekonomi yang cepat, akan tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada rakyat dan yang menyediakan kemakmuran jangka panjang bagi semua masyarakat di seluruh negeri. Untuk menghindari kelompok pendapatan menengah dan menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, negara Indonesia perlu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat dan kualitas pertumbuhan ekonomi yang sama dengan laju pertumbuhan. Bagi Indonesia, pertumbuhan ekonomi hijau sangat diharapkan dapat memiliki lima hasil yang secara bersamaan membentuk kerangka pertumbuhan ekonomi hijau, di mana hasil yang diinginkan tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pertumbuhan inklusif dan merata, ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan, ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Skenario adanya pertumbuhan ekonomi hijau menunjukkan bahwa pengurangan jumlah sumber daya dalam perekonomian Indonesia sejalan dengan melanjutkan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Dengan mendekati contoh praktik terbaik secara bertahap, Indonesia mampu menekan kerusakan lingkungan dengan tetap mempertahankan

[105] Sjamsul Arief, "Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penetapan Sektor Ungggulan dengan Menggunakan Location Quotient, Shift Share dan Klassen Typology di Madura" 6 (2021): 170–71.

tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat. Di mana hasilnya yaitu perekonomian yang lebih kuat dengan kesejahteraan yang lebih besar. Hasil ini tidak hanya didorong dengan peningkatan tingkat pendapatan, akan tetapi juga peningkatan kesehatan, ketahanan pangan dan energi, serta keberlanjutan seluruh substansi didorong dengan berkurangnya kerusakan lingkungan dan ekosistem dan secara bersamaan memberikan dampak terhadap pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi hijau akan memerlukan investasi. Di mana alasan untuk investasi tersebut yaitu untuk menghindari biaya yang lebih besar yang terkait dengan mempertahankan *status quo*. Biaya-biaya ini dapat diminimalisasi secara signifikan dengan pendekatan pertumbuhan ekonomi hijau termasuk biaya kesehatan yang memburuk karena kualitas air dan udara yang kurang baik, kerawanan pangan yang disebabkan karena erosi tanah, subsidensi tanah dan ketidakpastian ketersediaan air, dampak-dampak yang menyebabkan kerusakan pertambangan, kehutanan, dan penangkapan ikan, tingkat emisi gas rumah kaca yang tinggi, dan banjir yang semakin meluas akibat deforestasi dan sedimentasi sungai. Pertumbuhan ekonomi hijau menawarkan jalur alternatif menuju kemakmuran tanpa efek samping yang buruk.[106]

Fokus pengembangan ekonomi hijau haruslah setara dengan tujuan pembangunan lingkungan hidup seperti perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan serta penggunaan energi terbarukan. Kelompok sektor investasi yang berpotensi didorong sebagai investasi hijau yaitu kehutanan, perusahaan tenaga panas bumi, industri pengolahan, pengadaan listrik, pengelolaan sampah, dan daur ulang.

Pertumbuhan ekonomi hijau dapat diwujudkan apabila yang membuat keputusan memasukkan biaya eksternal ke dalam biaya tersembunyi atau biaya produksi sehingga mencerminkan biaya ekonomi keseluruhan. Biaya ini dapat menjadi signifikan nilainya sehingga perlu dirupiahkan untuk dapat mengenali potensi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Penekanan

[106] Global Green Growth Institute, *Mewujudkan Perumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera*, 5.

untuk menghitung biaya dan manfaat secara moneter yang belum diperhitungkan ke dalam desain proyek dan kebijakan dapat mengatasi beban ekonomi yang sering kali tersembunyi yang biasa dibayarkan oleh masyarakat. Di mana biaya-biaya tersembunyi tersebut meliputi biaya kesehatan akibat polusi udara, kegagalan panen akibat erosi berlebihan, penurunan cadangan air tawar akibat deforestasi dan degradasi hutan, dan lain-lain. Dengan adanya kesadaran seperti itu, perencana, pembuat kebijakan serta investor akan mengambil pendekatan yang lebih sistematis dalam mengidentifikasi peluang ekonomi hijau yang inovatif serta dapat menjadi media pertumbuhan ekonomi baru yang berkelanjutan.[107]

Kerangka pertumbuhan ekonomi hijau menilai dampak lingkungan dan sosial berdasarkan kebijakan yang sudah ada serta merancang intervensi untuk memungkinkan investasi dapat menjadi proyek-proyek konkret yang layak dibiayai melalui teknologi yang efisien serta praktik pengelolaan terbaik demi mendukung kelestarian lingkungan dan sosial. Kerangka ini dirancang untuk membuat investasi bisa menjadi nyata dengan memberikan bukti empiris dan kuantitatif untuk memperlihatkan bahwa pola pertumbuhan di mana eksternalitas secara keseluruhan diinternalisasikan akan menghasilkan kontribusi nyata dan menimbulkan biaya yang lebih minim bagi seluruh pihak.

Dalam kerangka ekonomi daerah, pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta guna menciptakan lapangan kerja baru yang juga menjadi stimulus terhadap perkembangan ekonomi daerah. Dalam mencapai tujuan pembangunan daerah kebijakan yang dikeluarkan harus bertumpu pada potensi dari masing-masing daerah.[108] Struktur perekonomian di Kabupaten Pamekasan masih didominasi oleh sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor di bidang jasa. Peranan ketiga sektor tersebut secara berurutan yaitu 48,35%, 18,13%, dan

[107] Global Green Growth Institute, *Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Perencanaan Investasi* (Jakarta, 2016), 8.

[108] Mohammad Wahed, "Pemetaan Potensi Ekonomi Sektoral dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan," *Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (30 Juni 2018): 1, https://doi.org/10.35590/jeb.v5i1.685.

12,88%. Adapun peranan sektor ekonomi yang lain berada di bawah 7%.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan era otonomi daerah saat ini di mana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah sebagai upaya peningkatan kemakmuran masyarakat.

Terdapat empat syarat agar suatu sektor tertentu bisa menjadi sektor prioritas, yaitu:

1) Sektor tersebut harus bisa menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar sehingga laju pertumbuhan berkembang dengan cepat akibat dari efek permintaan tersebut.
2) Karena terdapat perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas.
3) Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah.
4) Sektor tersebut harus bisa berkembang sehingga dapat memberi pengaruh terhadap sektor yang lain.

Aktivitas perekonomian regional dikelompokkan menjadi dua sektor kegiatan, yaitu aktivitas basis dan aktivitas nonbasis. Kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor yang meliputi barang dan jasa ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, sedangkan kegiatan nonbasis merupakan suatu kegiatan yang berorientasi lokal yang menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakat dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan.[109] Adapun sektor-sektor yang mampu menjadi sektor basis di Kabupaten Pamekasan terdiri dari lima sektor, yaitu:[110]

1. Sektor pertanian kehutanan dan perikanan, hal ini dikarenakan Kabupaten Pamekasan mempunyai lahan pertanian dan lautan untuk bercocok tanam dan nelayan.

[109] Wahed, 3.

[110] Arief, “Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Penetapan Sektor Ungggulan dengan Menggunakan Location Quotient, Shift Share dan Klassen Typology di Madura,” 177–78.

2. Sektor konstruksi, di mana adanya pembangunan yang terus berkembang hingga mencukupi pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pamekasan.
3. Sektor perdagangan besar dan eceran, koperasi, mobil dan sepeda motor. Kabupaten Pamekasan cukup mampu dalam sektor perdagangan dikarenakan adanya peningkatan dari sektor kontraksi yang memiliki peningkatan dalam perdagangan menjadi sektor yang potensional.
4. Informasi dan komunikasi. Kabupaten Pamekasan mempunyai telekomunikasi, multimedia, penyiaran, dan pemograman yang dapat terhubung di internet sehingga dapat mendukung kegiatan usaha yang mencukupi nilai potensial PDRB di Kabupaten Pamekasan.
5. Sektor administrasi pemerintah.

H. Sektor Industri Halal yang Berkaitan dengan Ekonomi Hijau

1. Pengembangan Perekonomian Desa Melalui Kampung Garam

Perekonomian era globalisasi adalah suatu tantangan bagi setiap negara khususnya negara Indonesia. Sala satu solusi untuk menghadapi persaingan ekonomi yaitu melalui ekonomi kreatif. Strategi pengembangan ekonomi daerah yang tepat diharapkan dapat menemukan dan menggali potensi ekonomi produktif yang berdaya saing sekaligus berbasis sumber daya daerah.[111]

Salah satu potensi daerah yaitu garam yang tersebar di Kecamatan Pademawu. Jumlah produksi garam paling tinggi terdapat di Desa Bunder Kecamatan Pademawu yaitu dengan total produksi 25.540,9 ton. Dengan penghasil garam terbesar di Kecamatan Pademawu, maka ditetapkan menjadi "kampung garam" sesuai dengan program pemerintah. Hal ini sesuai dengan upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam merealisasikan desa tematik untuk menunjang kemajuan sektor

[111] Endang Tri Wahyurini dan Emmy Hamidah, "Pengembangan Ekonomi Desa melalui Kampung Garam (Studi Kasus Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura)," *Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis* 4, no. 2 (29 September 2020): 2, https://doi.org/10.30737/agrinika.v4i2.1064.

ekonomi desa yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat pada tahun 2020 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, yaitu pertumbuhan ekonomi di setiap desa dapat mendorong Pamekasan berdaya saing dengan Kabupaten yang lain.[112]

Jumlah produksi garam yang cukup besar dibandingkan dengan desa lainnya memberikan peluang pendapatan serta pengembangan usaha yang cukup luas dan menjanjikan. Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh pemerintah desa sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Desa Bunder melakukan pengelolaan sumber daya garam dengan beberapa usaha antara lain garam krosok, garam rebus, dan eduwisata garam. Pemerintah Desa Bunder terus melakukan pengembangan serta mencari peluang untuk pengelolaan garam.

Hal tersebut bertujuan untuk kesejahteraan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Pendirian eduwisata garam merupakan sebuah inovasi terbaru dari Desa Bunder. Desa Bunder dengan garam sebagai komoditas unggulan mengembangkan eduwisata garam sebagai solusi peningkatan kesejahteraan warga. Eduwisata garam secara kelembagaan dikelola oleh BUMDes Mutiara Saghara sehingga bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) Bunder. Dengan PAD yang tinggi, keuangan desa akan lebih mandiri dan tidak bergantung pada dana desa dan alokasi dana desa sehingga pembangunan bisa berjalan lebih optimal.

2. Inkubator Bisnis

Usaha mikro, kecil, dan menengah sangat berperan besar dalam perekonomian dan juga sebagai pemeran utama dalam berbagai sektor, lapangan kerja, pemeran penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal serta pemberdayaan masyarakat, pencipta pasar baru dan sumber inovasi, menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan ekspor. Namun, UMKM yang ada di Indonesia masih memiliki permasalahan dan juga tantangan yang sangat besar seperti masih rendahnya nilai tambah dan rendahnya kualitas produk, maka perlu adanya interven-

[112] Wahyurini dan Hamidah, 2.

si dari pemerintah sebagai upaya dalam pengembangan UMKM yang ada.[113]

Pemerintah memainkan peranan yang sangat penting sebagai keefektifan dan pengoptimalan dalam pengembangan UMKM dengan menjadi sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator.

a. Peran pemerintah sebagai fasilitator adalah untuk memberikan fasilitas UMKM untuk mencapai tujuan pengembangan usaha yang dimiliki oleh UMKM.
b. Sebagai regulator, peran pemerintah adalah dengan membuat suatu kebijakan-kebijakan sehingga mempunyai nilai untuk mempermudah usaha UMKM dalam mengembangkan usahanya; sedangkan
c. Katalisator atau percepatan pengembangan UMKM, peran Pemerintah sebagai nilai dorong untuk mempercepat berkembangnya UMKM menjadi *fast moving enterprise*.[114]

Fast moving enterprise merupakan UMKM yang telah memiliki jiwa *entrepreneur* dan akan melakukan transformasi menjadi wirausahawan besar. Nah peran inkubator bisnis sebagai intermediasi memainkan peran sebagai lembaga yang tepat dalam pelaksanaannya khususnya sebagai fasilitator dan katalisator dan juga nantinya akan memberikan layanan berupa akses dana, *networking, working place,* akses legal hingga pelatihan bisnis dan teknis agar prospek perkembangan dan daya tahan meningkat.

Melihat di Madura khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan, lembaga-lembaga yang memberikan layanan berupa *services, skill development,* dan *seed capital*.

a. Layanan *services* diberikan oleh lembaga pemerintah daerah berupa informasi pelaksanaan dan fasilitas pameran, perdagangan, teknologi, serta layanan legalitas perusahaan.
b. *Skill development* pemberian berupa pembinaan, pelatihan, dan *workshop* kepada pelaku usaha.

[113] Mardiyah Hayati, Dian Eswin Wijayanti, *"Identifikasi Keberadaan Inkubator Bisnis di Madura"*, Jurnal Agrikonomika, 8(2) 2019: 222.

[114] *Ibid*.

c. Layanan *seed capital* yang diberikan oleh lembaga pemerintah daerah berupa pemberian bantuan dana bergulir.

Secara perinci program kerja masing-masing lembaga pemerintah yang dilaksanakan di Madura adalah *Pertama,* program pendampingan dengan pemberdayaan masyarakat dengan pendekatan sosial, dengan memberikan fasilitas proses belajar dan menjadi mediator dalam UMKM, di antara kegiatannya adalah motivasi, peningkatan kemampuan melalui *soft skill,* manajemen diri, pembangunan dan pengembangan jaringan usaha melalui kerja sama.

Kedua, program pembinaan dengan menunjukkan progresivitas yang memuaskan, dengan kemajuan, peningkatan, dan adanya pertumbuhan. Program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas-dinas Kabupaten Pamekasan dan Bangkalan di antaranya melalui kegiatan pelatihan, promosi melalui pameran-pameran, bantuan saran produksi, magang, *benchmarking* ke industri yang telah berkembang. Namun muncul permasalahan mendasar di antaranya sumber daya manusia yang belum terampil dalam memaksimalkan teknologi tepat guna, adanya modal yang masih terbatas yang dimiliki oleh aktor usaha, masih sulit dalam perolehan bahan baku dan *relation* terhadap pasar masih sukar dijangkau dan terbilang sulit.

Ketiga, program yang dilakukan oleh dinas-dinas yang ada di Kabupaten Pamekasan dan bangkalan adalah dengan memberikan bantuan dana bergulir dengan target adalah untuk membantu pelaku usaha yang masih kesulitan dalam modal usaha, biasanya bantuan tersebut diwujudkan dalam sebuah bentuk bantuan alat-alat produksi dan subsidi pembelian perlengkapan usaha.

Cara intermediasi yang dapat dilakukan untuk bagaimana usaha kecil, mikro, dan menengah dapat berkembangan adalah dengan *business development Service* (BDS), inkubator bisnis, dan *technology park*. Namun fakta yang ada di lapangan, lembaga pemerintah yang ada di Madura masih menggunakan satu cara yaitu dengan *business development Suvise*. Hal ini dapat dibuktikan di mana pemerintah berfokus pada usaha kecil mikro baik, pelaku usaha pemula, usaha kecil mikro dalam programnya.

Berikut ini merupakan peran lembaga pemerintahan yang ada di Madura dalam meningkatkan usaha kecil, mikro, menengah:

a. Dinas Pemuda dan Olahraga untuk menumbuhkan dan meningkatkan UMKM yang ada di Madura memiliki peran aktif dalam menggerakkan kelompok wirausahawan muda.
b. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berperan secara tidak langsung dalam peningkatan UMKM dengan cara menunjang ketersediaan bahan baku dengan dikhususkan pada tanaman.
c. Dinas Koperasi dan UMKM memberikan fasilitas pembinaan dan pendampingan UMK dalam melakukan kegiatan pengelolaan produk, serta memberikan bantuan modal kepada UMKM binaan yang kekurangan modal usaha, memfasilitasi untuk mengadakan pameran-pameran produk dengan model kerja sama antardinas atau lembaga.
d. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah dalam peningkatan UMKM tecermin dalam visi dan misi yang ada, yaitu terwujudnya kesejahteraan ekonomi berbasis agribisnis, manufaktur dan pariwisata, untuk mendukung hal tersebut ada beberapa langkah seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Pamekasan seperti rencana terciptanya 10.000 usaha baru yang dikenal dengan sapu tangan biru.
e. Peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan terhadap UMKM, yaitu dengan menyediakan dan memberikan pelatihan dan pemberian bantuan teknologi tepat guna, selain bantuan tersebut terdapat magang dan studi banding, sedangkan dari segi *promotion* dilakukan dengan membuka *stand* untuk mempromosikan produknya dan dibentuknya sebuah sentra dan bantuan berupa legalitas usaha antara lain PIRT, SIUP TDI/TDP, sertifikasi halal MUI, BPPOM, dan legalitas usaha yang lainnya.
f. Dinas Kelautan dan Perikanan juga memberikan peran yang sangat signifikan dengan menjalin kerja sama dengan lembaga satu dan yang lainnya sehingga dapat bersinergi dalam pelaksanaannya khususnya yang ada di Madura yang memiliki nilai ekonomi dan daya saing yang tinggi. Dengan berfokuskan pada produk olahan misalnya, kepiting, rumput laut, teri, garam, dan ikan kering, kerja

sama yang dimaksudkan adalah dengan membuka pameran dan pelatihan kepada nelayan dan pelaku usaha dalam pengelolaan produk yang berkualitas. Salah satunya untuk mengetahui kualitas dan hasil laut yang baik dan layak dikelola serta memberikan bantuan berupa bibit ikan yang dikembangbiakkan.

g. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memiliki peran penting khususnya yang ada di Bangkalan tersendiri dengan menjadi penggerak pelaku usaha untuk dapat menampilkan produk hasil olahannya supaya terlihat menarik hak ini berkaitan dengan desain dan kemasan produk agar menjadi daya jual yang tinggi di pasar. Sama halnya di Pamekasan, lembaga tersebut sebagai penguatan *bargaining position* yang disesuaikan dengan budaya lokal.

3. Pariwisata Syariah dalam Peningkatan Ekonomi

Kekayaan alam yang melimpah serta budaya Indonesia menjadi faktor penting dalam upaya menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Pariwisata termasuk salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi serta penyediaan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor produktif lainnya.[115]

Saat ini sektor pariwisata diperkut dan diberdayakan sebagai pilar perekonomian suatu negara yang diharapkan mampu menambah devisa negara terbesar di atas sektor yang lainnya. Pulau Madura khususnya Kabupaten Pamekasan memiliki potensi panorama alam dan kultur yang khas. Akan tetapi fasilitas yang masih terbatas serta sarana dan prasarana pendukung masih sangat memprihatinkan. Sehingga menyebabkan pengembangan pada sektor pariwisata harus menjadi hal penting untuk memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi secara umum di Kabupaten Pamekasan.

Kemiskinan, pengangguran, adanya ketimpangan, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kesejahteraan. Menurut data yang terdapat dalam Badan Pusat Statistik grafik persentase tingkat kemiskinan di Jawa

[115] Rahman dan Hana, "Optimalisasi Pariwisata Syariah dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Lokal Masyarakat Madura," 57.

Timur tahun 2020, Pulau Madura menduduki posisi pertama kabupaten termiskin di Jawa Timur.

Madura memiliki potensi pariwisata syariah di setiap kabupatennya yang terdiri atas wisata alam, wisata buatan, dan wisata religi. Berbagai potensi kekayaan alam yang dikelola dan dikembangkan bertujuan untuk menarik minat wisatawan serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sumber daya manusia adalah faktor utama dalam pembangunan sektor pariwisata. Dalam meningkatkan sumber daya manusia sebagai upaya pengembangan dalam sektor pariwisata syariah, maka perlu adanya upaya dalam bentuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pelatihan tingkat dasar dan menengah, pendidikan untuk manajemen, serta kemampuan berbahasa asing. Selain itu, UKM juga dapat melakukan berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para pembina, pengrajin, dan pengelola usaha cendera mata di bidang desain, pengawasan, pemahaman peraturan, dan pemasaran.

Optimalisasi pariwisata syariah dapat dilakukan dengan cara peningkatan pemasaran, dukungan pemerintah, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan upaya peningkatan pemasaran bertujuan untuk mengenalkan objek wisata sebagai upaya meningkatkan jumlah pengunjung dari lokal maupun mancanegara.

Pengembangan sektor pariwisata juga turut membutuhkan adanya peran serta antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah berupaya dalam memberikan pelatihan pada sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta pelatihan terhadap UMKM. UMKM memiliki peranan yang penting dalam menopang perekonomian masyarakat. Selain itu juga dapat meminimalisasi angka pengangguran, kemiskinan, dan menambah lapangan pekerjaan serta pemerataan pendapatan.

4. Desa Wisata Melalui Penataan Kawasan Pertanian

Kreativitas petani dalam mengembangkan usaha produktif sangat dibutuhkan agar petani tidak hanya mendapatkan keuntungan di sektor pengelolaan pertanian saja melainkan juga usaha yang lainnya di sektor pertanian. Menurut Indayani agroekowisata dan konsep *green city* sebagai kota ekologis merupkan salah satu jawaban dalam

membangun kota yang modern, namun tetap menjaga kelestarian alam dan budaya agraris serta mengangkat kearifan lokal dengan menggunakan inovasi teknologi sehingga tercipta keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Daya saing di sektor pertanian diperlukan adanya kreativitas produk, baik *on farm* maupun *off farm.* Berawal dari adanya penciptaan berbagai sarana produksi yang efisien dan tidak merusak lingkungan, pengembangan produk dan desain kemasan, energi terbarukan, rekayasa tampilan, pengelolaan keunikan alam pertanian hingga pemanfaatan hasil limbah pertanian.

Prospek keuntungan ekonomi yang cukup tinggi, memungkinkan untuk dijadikan kawasan wisata pertanian seperti kawasan pertanian jeruk di Desa Panagguan dan Desa Ponteh.[116]

Konsep wisata pertanian ini menawarkan konsep kolaboratif antara memetik langsung buah jeruk serta edukasi terhadap masyarakat tentang manfaat dan tata tata cara jenis penanaman. Konsep wisata pertanian jeruk yang akan diwujudkan merupakan suatu konsep terintegrasi antara keuntungan hasil pertanian dengan jumlah retribusi yang masuk. Retribusi masuk kawasan pertanian tidak berupa pembayaran uang tunai melainkan dengan cara membeli bibit jeruk yang terdapat di kawasan wisata tersebut. Adanya wisata pertanian tidak semata-mata menguntungkan terhadap petani jeruk saja. Akan tetapi juga berpengaruh terhadap masyarakat sekitar kawasan wisata. Di antaranya masyarakat sekitar dapat menjual kebutuhan masyarakat pengunjung. Selain itu, keuntungan yang bisa diperoleh desa, yaitu bertambahnya pendapatan ekonomi karena uang pengunjung yang dibelanjakan di kawasan wisata akan berputar di desa tersebut.

Pertanian yang berbasis wisata juga harus memperhatikan beberapa konsep elemen pariwisata, di antaranya elemen antraksi, elemen fasilitas, elemen infrastruktur, elemen transportasi, elemen informasi dan promosi. Elemen antraksi lebih mengarah terhadap sasaran atau tujuan wisata yang mampu memberikan daya tarik kepada wisatawan baik dari sisi keunikan, keragaman, maupun fasilitas yang

[116] Sayyidi dan Akh., "Mewujudkan Desa Wisata, Melalui Penataan Kawasan Pertanian untuk Peningkatan Ekonomi Desa," 22.

ditawarkan. Elemen fasilitas lebih mengarah terhadap penyediaan kebutuhan yang diinginkan oleh pengunjung yang disediakan di lokasi wisata seperti penyediaan kamar mandi, musholla, dan kuliner di lokasi wisata. Adapun untuk elemen infrastuktur lebih mengarah kepada penyediaan kemudahan akses jalur menuju lokasi wisata baik akses jalan di dalam lokasi wisata maupun di luar yang menuju tempat wisata. Adapun elemen transportasi bertujuan untuk memudahkan pengunjung dalam mendapatkan alat transportasi yang layak dan terjangkau terhadap lokasi wisata yang dituju.

5. Program Bidang Pemberdayaan Nelayan dan Pengembangan Agroindustri Wilayah Pesisir

Salah satu sektor pendukung keberhasilan Kabupaten Pamekasan dalam upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat yaitu sektor perikanan. Kabupaten Pamekasan melalui Dinas Perikanan mengadakan program pengembangan bidang pemberdayaan nelayan dengan pemberian bantuan alat pancing tangkap ikan, alat bantu komunikasi serta *fishinder* GPS yang digunakan sebagai alat pelacak. Adanya program tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam laut yang telah dimiliki sehingga dapat menunjang perekonomian masyarakat terutama yang berprofesi sebagai nelayan.[117]

Dengan otonomi daerah, setiap pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan memnafaatkan seluruh potensi daerah yang dimilikinya. Mengenai sumber daya nelayan, pihak Pemerintah daerah membentuk sebuah kelompok nelayan yang bertujuan untuk dilakukannya pelatihan dan disalurkan bantuan kepadanya kemudian para nelayan juga meneruskan bantuan tersebut kepada sesama nelayan.

Dengan membentuk tim penyuluhan, pemerintah daerah melalui penyuluh menugaskan untuk memberikan penyuluhan dan pemberdayaan kepada para nelayan di Kabupaten Pamekasan. Selain itu juga nelayan diberikan pelatihan-pelatihan dengan mendatangkan berbagai

[117] Agus Sulaiman Bolkiah, Muh. Ilham, dan Etin Indrayani, "Evaluasi Program Bidang Pemberdayaan Nelayan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur," 365.

narasumber dalam menyosialisasikan berbagai program pemberdayaan oleh Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

Program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu seperti pengadaan alat bantu tangkap ikan setiap tahunnya yang disalurkan kepada kelompok nelayan yang telah dibentuk dan terdaftar, sosialisasi peraturan terkait aturan melaut terutama dalam pelaporan hasil tangkapan ikan. Selain itu juga adanya pemberian asuransi oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan kepada nelayan dan pemberian alat *safety* untuk melaut.[118]

Dalam pendekatan *process evaluation* yang meliputi koleksi data kegiatan yang telah diterapkan dalam praktik pelaksanaan program, pada dasarnya evaluasi proses digunakan untuk mengetahui sudah sampai sejauh mana rencana akan diterapkan dan komponen apa saja yang perlu dilakukan. Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Pemerintah daerah berupaya untuk terus meningkatkan anggaran dalam program pemberdayaan masyarakat nelayan.

[118] *Ibid*.

BAB VI
Implementasi Kebijakan Ekonomi pada *High Impact* Sektor

Indonesia terdiri lebih dari 13.000 pulau yang mana berdasarkan survei yang dilakukan oleh Departemen dalam Negeri dan Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia memiliki 98 kota dan 410 kabupaten, salah satunya adalah kabupaten Pamekasan.[119] Setiap wilayah pasti tidak akan terlepas dengan yang namanya aktivitas perekonomian sehingga dapat meningkatkan perekonomian global. Akan tetapi sering kali manusia tidak memperhatikan tempat di mana kita melakukan berbagai kegiatan ini, yakni tepatnya di alam sekitar kita.

Seperti dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, ada pembangunan ekonomi dan menjaga pelestarian alam dan lingkungan terdapat unsur yang saling berkaitan. Bisa saja pembangunan ekonomi memberikan dampak positif tetapi begitupun sebaliknya. Pada faktanya, dari sisi positif pembangunan ekonomi telah mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendongkrak pendapatan nasional. Namun jika dilihat dari sisi negatifnya, pembangunan ekonomi juga dapat berdampak pada hal-hal yang merugikan sekitar yang diakibatkan adanya *over exploitation*, pencemaran tanah, air, dan udara akibat polusi industri, banjir, serta berdampak pada terjadinya perubahan iklim, dan sebagainya.

---

[119] Setya Putri Erdiana, "Generasi Millenial dan Resep Kuliner Tradisional sebagai Budaya Bangsa Indonesia," *Bandung: Jurnal Dekade* 11, No.2 (2018): 35.

Jika ditinjau dari sudut pandang Islam, seharusnya manusia menjaga alam, di mana manusia menjadi *khalifah* di bumi ini yang memang sudah sepatutnya kita melestarikannya dan mengembangkan alam menjadi hunian jutaan umat manusia. Di mana dalam firman-Nya yang artinya:

> *......Dia (Allah) telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan memerintahkan kamu memakmurkannya....* (QS. *Hud*: 61)

Ayat di atas menjelaskan bahwa fungsi manusia sebagai *khalifah* Tuhan untuk memakmurkan bumi dengan jalan amal terbaik atau karya kreatif yang bisa dilakukan oleh manusia. Di mana jika lingkungan ini dikaitkan dengan ekonomi yang membahas tentang bagaimana perilaku manusia untuk terus berusaha dalam memenuhi kebutuhan hidup dari sumber daya alam yang terbatas, maka masyarakat harus melakukan pilihan alat pemuas di antara berbagai pilihan kebutuhan yang harus dipenuhi. Baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, dengan adanya sumber daya yang terbatas sedangkan kebutuhan manusia itu tidak ada batasan maka manusia secara sendiri maupun secara bersama-sama harus berusaha mencapai kepuasan pribadi atau manfaat sosial yang optimal.[120]

Dalam menjalankan berbagai kegiatan perekonomian, maka terdapat pelaku ekonomi dikategorikan atas beberapa tingkatan yang menjalankan peranan dan fungsinya masing-masing. Golongan tersebut akan dibagi menjadi tiga bagian, yakni rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah.[121] Terjadinya kerusakan lingkungan dan deplesi sumber daya alam yang muncul dari kegiatan yang dilakukan produsen dan konsumen. Hakikatnya, mekanisme pasar (interaksi produsen dan konsumen) dapat membantu menjelaskan relasi fungsional antara pasar dan lingkungan. Dengan demikian, adanya implikasi dari saling hubungan hal tersebut dan kemungkinan bisa menjadi cara dalam memperoleh solusi yang efektif.

[120] Ambang Suhada dan Dharma Setyawan, "Narasi Islam dan Green Economics dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam," *Kontekstualita* 31, No.1 (2016): 22–28.

[121] M. Nur Rianto Al-Arif, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015).

Sebelum kita membahas terlalu jauh persoalan ekonomi hijau, perlu kiranya kita mengetahui paradigma ekonomi hijau (*green economy paradigm*) yang banyak diperbincangkan karena sudah dilakukan di beberapa negara meskipun belum begitu terlihat pengimplementasiannya.[122] Inti dari ekonomi hijau ini adalah *low carbon growth, resource efficiency,* dan *social inclusivity,* yang berimplikasi pada pembangunan berkelanjutan, *management energy,* ekonomi hijau di perkotaan, dan juga bisnis hijau.[123]

Lalu bagaimanakah kondisi ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan? Secara astronomis, Kabupaten Pamekasan sendiri berada pada 6051' – 7031' Lintang Selatan dan 113019' - 113058' Bujur Timur di mana dengan jumlah penduduk menurut kecamatan dan kewarganegaraan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sebesar 854.194 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan.[124]

Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai salah satu kabupaten yang berprestasi di Pulau Madura. Meskipun Pamekasan merupakan wilayah yang kecil, namun Kabupaten Pamekasan termasuk wilayah yang paling berkembang di Madura. Terdapat beberapa sumber daya yang tersebar menjadi beberapa kawasan di antaranya sebagai berikut:[125]

1. Kawasan pemukiman/perkampungan seluas 11.524,10 hektare yang tersebar di 13 kecamatan, di mana Kecamatan Larangan seluas 584,6 hektare (terluas) dan Kecamatan Galis 281,16 hektare (terkecil), (berdasarkan data tahun 2007). Dalam hal ini potensi terbentuknya ekonomi hijau di Pamekasan bisa diterapkan dari sektor perumahan yang juga termasuk ke salah satu penyokong terealisasinya ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan.

---

[122] Ambang Suhada dan Dharma Setyawan, "Narasi Islam dan Green Economics dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam," 22–28.

[123] Ika Yunia Fauzia, "Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid al-Shariah," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No.1 (Juni 2016): 89.

[124] Badan Pusat Statistik, "Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan di Kabupaten Pamekasan" (Pamekasan, 2017).

[125] Lembaga Penelitian & Inovasi, "Laporan Akhir Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pamekasan," Perjanjian Kerja Sama (Kampus C Mulyorejo, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

2. Kawasan sawah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu sawah irigasi, drainese, dan tadah hujan. Sawah irigasi memiliki luas 1.386,00 hektare yang hanya terdapat di wilayah Kecamatan Tlanakan, Proppo, Pakong, Batumarmar dan Pasean. Selain itu sawah semi irigasi memiliki luas 5.213,03 hektare, dan sawah tadah hujan 8.569,00 yang terluas karena tanahnya yang tidak kedap air. Dalam hal ini potensi terbentuknya ekonomi hijau di Pamekasan bisa diterapkan dari sektor pertanian yang menjadi penyokong terealisasinya ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan.
3. Kawasan Tegalan menjadi kawasan yang paling luas di antara yang lain, yaitu seluas 32.966,34 hektare dan tersebar merata di 13 kecamatan. Batumarmar (4.882,10 hektare) wilayah yang paling luas berbeda dengan kecamatan Pakong yang paling kecil dengan (215,25 hektare) di Kawasan Tegalan ini juga termasuk ke penyokong terealisasinya ekonomi hijau pada sektor pertaniannya.
4. Kawasan hutan. Kabupaten Pamekasan memiliki wilayah hutan seluas 1.218,8 hektare yang terdapat di 5 kecamatan, yaitu Tlanakan, Pademawu, Galis, Waru, dan Batumarmar. Dengan adanya hutan yang terdapat di beberapa kecamatan tersebut akan mampu untuk menyeimbangkan ekosistem lingkungan hijau yang baik dengan bisnis ekonomi hijau di Pamekasan yang juga membaik.
5. Kawasan tambak garam, udang, dan bandeng. Kawasan ini seluas 2.229,1 hektare yang tersebar di 3 kecamatan yaitu Tlanakan, Pademawu, dan Galis. Dalam hal ini potensi terbentuknya ekonomi hijau di Pamekasan bisa diterapkan dari sektor Maritim yang menjadi penyokong terealisasinya ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan.
6. Kawasan jasa perdagangan. Di Pamekasan, kawasan ini seluas 238,2 yang tersebar di 13 kecamatan. Terbesar di Kecamatan Pamekasan (360 hektare) dan paling kecil di Kecamatan Pakong (11,0 hektare).
7. Kawasan industri pertanian mempunyai luas 92,40 hektare yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu Tlanakan, Pademawu, Galis, Pamekasan, Larangan, Pegantenan, Kadur, Pakong, Waru dan Batumarmar. Terluas di Kecamatan Pademawu (32,4). Dalam hal ini potensi terbentuknya ekonomi hijau di Pamekasan bisa diterapkan dari sektor Industri yang menjadi penyokong terealisasinya ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan.

8. Kawasan tambang mempunyai luas 9.0 hektare yang berada di kecamatan Kadur. Jika kita melihat tentang perekonomian Kabupaten Pamekasan, Dalam hal ini potensi terbentuknya ekonomi hijau di Pamekasan bisa diterapkan dari sektor pertambangan yang menjadi penyokong terealisasinya ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan.[126]

Dengan adanya beberapa potensi tersebut, maka terdapat beberapa sektor di antaranya primer, sekunder, tersier sebagaimana Tabel 4.1 berikut:

Struktur Perekonomian Kabupaten Pamekasan Tahun 2009-2013

Sektor		2009	2010*	2011*	2012*	2013**
		Persentase (%)				
SEKTOR PRIMER		50,56	50,26	49,59	49,29	48,68
1.	Pertanian	49,47	49,24	48,59	48,35	47,71
2.	Pertambangan dan penggalian	1,09	1,02	1,00	0,94	0,97
SEKTOR SEKUNDER		8,94	8,97	9,16	9,02	9,23
3.	Industri Pengolahan	2,99	2,94	2,91	2,92	2,95
4.	Listrik, gas, dan air bersih	0,96	0,94	0,90	0,88	0,87
5.	Konstruksi	4,98	5,09	5,35	5,22	5,41
SEKTOR TERSIER		40,50	40,77	41,25	41,68	42,10
6.	Perdagangan, hotel, dan restoran	16,46	16,81	17,68	18,13	18,52
7.	Pengangkutan dan komunikasi	4,09	4,11	4,08	4,17	4,27
8.	Keuangan, sewa & jasa perusahaan	6,55	6,53	6,46	6,50	6,62
9.	Jasa-jasa	13,41	13,32	13,03	12,88	12,69
Jumlah		100	100	100	100	100

Sumber: Badan Pusat Statistik Pamekasan 2014.
Keterangan: *) Angka Diperbaiki **) Angka Sementara

Pada struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa kontribusi masing-masing sektor di atas terhadap PDRB total ADHB di mana pada tahun 2013 mengalami peningkatan sebesar 6,28% yang

[126] Lembaga Penelitian & Inovasi, 28.

melambat 0,004% dibandingkan sebelumnya. Hal ini karena didukung oleh kegiatan ekonomi yang tergabung dengan kelompok primer yang mengalami kelambatan 0,86% dibandingkan pada tahum 2012.

Pada kondisi yang lain, sektor sekunder dan tersier mengalami pertumbuhan yang begitu cepat dengan masing-masing sebesar 1.30 persen dan 0,51 persen. Dalam sektor primer, andalannya adalah sektor pertanian. Adapun untuk andalan sektor sekunder adalah berada pada ranah sektor bangunan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran termasuk ranah sektor tersier. Sektor ini perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan perekomian regional karena sekitar 71,3% berasal dari sektor tersebut.[127]

Dengan adanya beberapa struktur perekonomian Kabupaten Pamekasan, maka perlu kiranya melihat dari berbagai potensi Kabupaten Pamekasan dari berbagai sisi guna terealisasinya ekonomi hijau Pamekasan, yakni sebagai berikut:

1. Nelayan dan petani ikan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan yakni terdapat 9.350 nelayan, 4 petani payau brackish, dan 369 petani ikan tawar.
2. Penambang garam dan luas areal pertambangan garam rakyat menurut Kecamatan di Kabupaten Pamekasan yakni terdapat 1.463 jiwa penambang, 914 ha luas lahan, 123.535 ton produksi garam yang dihasilkan.[128]
3. Melihat dari komoditas unggulan di wilayah ini antaranya bawang merah varietas manjung, jagung, padi, durian, cabai rawit, cabai jamu, kelapa, tembakau, jambu mete, garam, rumput laut, teri, sapi Madura, ayam buras, ayam ras petelur, dan batik tulis yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Pamekasan dengan adanya komoditas unggulan yang tersebar di beberapa wilayah.

Berdasarkan wilayah kecamatannya, wilayah Kadur terkenal akan jagung, tembakau, kelapa, cabai jamu dan ayam petelur yang juga masih menyebar di beberapa titik lagi terkait dengan komoditas unggulannya. Desa Sokolelah sebagai sentra pisang. Desa Kertagena Laok dan Desa

[127] Lembaga Penelitian & Inovasi, 36.

[128] Badan Pusat Statistik, “Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan” (Pamekasan, 2015).

Gagah dikategorikan sebagai desa dengan tingkat perkembangan tinggi di kecamatan ini. Komoditas Kecamatan Larangan adalah cabai rawit, cabai jamu, teri, sapi Madura, ayam buras, ayam ras petelur dan wilayah penggemukan sapi persilangan.

Produk unggulan Kecamatan Pakong yakni padi, tembakau, ayam ras petelur. Kecamatan Palengaan terdapat bawang merah, jagung, tembakau, cabai rawit, cabai jamu, batik tulis dan sentra singkong. Kecamatan Pasean juga memiliki komoditas unggulan seperti bawang merah, jagung, tembakau, jambu mente, cabai jamu, sapi Madura, ayam ras petelur, juga sebagai penghasil ikan tongkol dan sentra sapi bibit sapi Madura. Produk unggulan Kecamatan Pegantenan juga tidak kalah saingnya, terdapat padi, tembakau, cabai rawit, durian, dan kelapa. Desa Bulangan Haji, Desa Bulangan Branta dan Desa Pegantenan merupakan desa dengan tingkat perkembangan tinggi. Produk unggulan Kecamatan Waru juga terdapat Bawang merah, jagung, padi, tembakau, jambu mete, cabai rawit, sapi Madura. Produk unggulan Kecamatan Proppo dapat dikatakan sangat menarik, di mana ada batik tulis, bawang merah, padi, cabai rawit yang menjadi sentra batik di mana Desa Klampar diplot sebagai kampung batik.

Produk unggulan wilayah Batumarmar adalah bawang merah, jagung, jambu mente, cabai jamu dan sapi Madura. Adapun dari produk perikanan yang terdapat di wilayah tersebut adalah ikan tembang dan tenggiri. Untuk di Kecamatan Galis sendiri, produk unggulannya berupa bawang merah, garam, dan teri. Untuk produk dari perikanannya berupa ikan bandeng, udang, rajungan. Tidak hanya dari komoditas tersebut, akan tetapi di Kecamatan Galis terdapat wilayah yang menjadi sentra garam yang terdapat di Desa Lembung sebagai Kawasan minapolitan dengan didukung oleh beberapa desa di sekitarnya seperti Desa Polagan dan Desa Pandan.

Bergeser ke arah selatan dari wilayah Pamekasan, Komoditas seperti bawang merah, padi, garam, rumput laut, teri dan ayam buras menjadi komoditas unggulan di wilayah Pademawu. Terdapat juga sentra garam yang terdapat di Desa Bunder dan Desa Pademawu Timur. Komoditas unggulan Kecamatan Tlanakan adalah garam, teri, ayam buras, ayam ras petelur dan juga penghasil ikan kerapu, lemuru, kembung, layang dan tembang Wilayah ini sebagai sentra pembibitan sapi Madura.

Berdasarkan hasil dari rekapitulasi dari 22 SKPD dan hasil observasi, desa target yang bisa diusulkan untuk penerapan OVOP adalah Desa Bangsereh, Dempo Barat, Polagan, Kadur, Blumbungan, Pegagan, Rekkerrek, Tebul Barat, Klampar/Toket, Tanjung, Kertagena Laok, Larangan Slampar, Sokolelah dan Pegantenan. Penentuan wilayah tersebut berdasarkan pada kelebihan yang dimiliki dengan memperhatikan beberapa aspek seperti produksi, keunikannya, kelembagaannya maupun secara kualitas SDM yang ada. Berikut ini adalah tabel pemetakan berbagai komoditas unggulan berdasarkan wilayahnya masing-masing:

Kecamatan	**Desa**	**Komoditas**
Tlanakan	Larangan Slampar	Cabai besar
Pademawu	Tanjung, Pegagan, lembung	Rumput laut, mangrove, garam
Galis	Polagan	Ikan teri paron
Larangan	Blumbungan	Cabai jamu
Proppo	Klampar, Toket	Batik tulis
Palengaan	Rekkerrek	Singkong
Pegantenan	Pegantenan, Tebul Barat	Durian, jahe
Kadur	Sokalelah, Kertagena Laok, Kadur, Pamoroh	Pisang, ayam petelur, jagung, semangka
Pakong	Lebbek	Ikan lele
Waru	Bajur	Lebah madu
Batumarmar	Bangsereh, Kapong	Bawang merah, mete
Pasean	Dempo Barat	Sapi bibit madura

Keterangan:
* Data diambil dari Penyusunan Masterplan Kawasan Minapolitan Kab. Pamekasan 2015.

Merujuk pada data statistik tahun 2016, struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan tidak mengalami perubahan siginifikan. Secara garis besar struktur ekonomi Kabupaten Pamekasan masih didominasi oleh tiga sektor utama, yaitu; pertanian kehutanan, dan perikanan (35,9%); kategori perdagangan dan reparasi kendaraan bermotor (19,6%); dan, sektor konstruksi (10,1%). Dengan adanya potensi tersebut maka bisa menjadi peluang terealisasinya ekonomi hijau melihat

presentase data meskipun perlu membutuhkan sinergitas beberapa *stakeholders*.[129]

Dengan adanya beberapa komoditas unggulan dari setiap daerah yang ada, maka tidak dapat dimungkiri bahwa kearifan lokal memiliki pengaruh terhadap terwujudnya pembangunan ekonomi hijau. Hal ini juga dipaparkan oleh Lepp, Teh dan Cabanban dan Wang *et al*. yang menyatakan bahwa masyarakat pedesaan harus mengeksplorasi budaya yang mereka miliki dengan menjadikan sumber daya ekonomi yang kuat untuk pengembangan pembangunan masyarakat. Anriquez juga menyatakan bahwa peningkatan budaya masyarakat sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan dan kesejahteraan untuk pembangunan lingkungan masyarakat selanjutnya.[130] Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sutikno dan Hakim menemukan bahwa variabel budaya masyarakat berpengaruh signifikan dengan pembangunan lingkungan masyarakat lokal, budaya masyarakat berpengaruh signifikan dengan pembangunan lingkungan masyarakat lokal, dan budaya masyarakat berpengaruh signifikan terhadap variabel partisipasi koperasi.[131] Secara tidak langsung, hal ini menunjukkan bahwa potensi ekonomi yang ada akan berpengaruh terhadap ekonomi hijau.

Dengan demikian, berbagai potensi yang sudah menjadi unggulan di Kabupaten Pamekasan akan mendukung terealisasinya ekonomi hijau Pamekasan dengan mengoptimalkan berbagai objek terkait seperti perusahaan, alam, rumah tangga dan pasar. Komponen tersebut dibutuhkan guna menyeimbangkan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan agar tetap melestarikan ekonomi hijau Pamekasan. Jika dikaitkan dengan ekonomi hijau yang berbasis syariah di Kabupaten Pamekasan, maka semua komponen yang ada baik dari kegiatan yang dilakukan (produksi, distribusi, dan konsumsi) harus sesuai dengan

---

[129] Lembaga Penelitian & Inovasi, "Laporan Akhir Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pamekasan," 38.

[130] G. Rural Anriques, "Development and Poverty Reduction: is Agriculture Still the Key?," *Agricultural Development Economics* 4, No.1 (2017): 46.

[131] Hakim A Sutikno B, "Budaya masyarakat dan partisipasi koperasi terhadap pembangunan lingkungan masyarakat lokal di Kabupaten Pasuruan (studi kasus pada peternak sapi perah dan koperasi susu di Kabupaten Pasuruan)," *Jurnal agromix* 9, No.1 (2016): 11-19.

ajaran syariat Islam. Hal ini sesuai dengan *value* dalam ekonomi syariah khususnya ditelaah dari sudut pandang *dharuriyah maqashid al-shariah* yang berkaitan dengan penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda, dan lingkungan hidup. *Maqashid al-shariah* berarti Allah selaku pembuat shariah untuk memberikan kemaslahatan *(maslahah)* kepada manusia. Oleh sebab itulah penerapan ekonomi hijau memang membutuhkan sinergi beberapa elemen seperti pemerintahan, media, akademisi, masyarakat, dan berbagai sektor-sektor penunjang ekonomi hijau syariah di kabupaten Pamekasan.

A. Peran *Stakeholders* Terhadap Implementasi Ekonomi Hijau di Kabupaten Pamekasan

Membahas persoalan ekonomi hijau merupakan hal yang sangat menarik untuk dibahas, di mana ekonomi hjau sendiri mampu mengoptimalkan tiga peranan kelompok yakni nilai sosial, lingkungan dan finansial yang menjadi tiga dasar utama. Ekonomi hijau dilihat dari sudut pandang lestari merupakan sistem tertutup dengan sumber daya terbatas serta kapasitas yang terbatas yang bertujuan untuk mengatur serta memperbarui sendiri. Adapun jika dilihat secara sosial, ekonomi hijau bermakna adil yang didasarkan pada kebudayaaan dan martabat manusia termasuk ke sumber daya yang berharga baik secara SDA yang juga perlu diatur dalam pengelolaannya supaya tidak habis. Ekonomi hijau merupakan agregat global yang berasal dari komunitas individual yang mampu memenuhi kebutuhan anggotanya melalui produksi lokal dan terdapat transaksi barang dan jasa dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Maka dari itulah, ekonomi hijau didasarkan pada keyakinan bahwa hubungan autentik terhadap tempat merupakan prakondisi esensial menuju kelestarian dan keadilan yang berakar lokal.

Meskipun kini ekonomi hijau menjadi arus utama dalam pikiran ekonomi, namun sejauh ini perkembangannya di beberapa negara termasuk di Indonesia termasuk tataran normatif pada sistem perekonomian nasional. Terdapat beberapa kebijakan yang ditempuh terkait dengan pengimplementasian pendekatan ekonomi hijau yakni sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah nasional harus melindungi daerah-daerah khusus yang telah melewati batas aman untuk eksploitasi, konversi dan pembangunan di mana mempertimbangkan keberlanjutan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.
2. Pemberian peluang alternatif ekonomi terhadap masyarakat setempat yang memungkinkan mereka terus berkembang tapi tidak harus dengan merusak keanekaragaman hayati di masing-masing daerah.
3. Pemilihan investor dalam subsektor energi atau pertambangan, agrobisnis, pengembangan wisata dan sebgainya juga perlu diperhatikan untuk menjaga keanekaragaman hayati agar tetap utuh dan bisa menarik investor secara global untuk masa depan yang akan lebih menyejahterakan masyarakat.
4. Pemerintah daerah harus mampu dan bersedia melestarikan daerah yang harus dilindungi dengan tidak menjualnya demi alasan ataupun kepentingan sebagian pihak terkait.
5. Libatkanlah berbagai ahli yang memahami cara mengukur keanekaragaman hayati dengan canggih dan benar, baik secara tempat tinggal maupun penanganan yang tepat dalam ranah lokal maupun internasional.
6. Adanya dukungan terhadap berbagai inisiatif penyelenggara pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas keilmuan dan pengetahuannya.[132]

Pada prinsip dasarnya, ekonomi hijau dirancang untuk membantu lembaga pemerintahan dalam menghijaukan perekonomian di antara cara yang ditempuhnya melalui pembentukan dan pemusatan kebijakan, investasi dan pengeluaran pada sejumlah sektor, seperti teknologi bersih, energi terbarukan, pelayanan air, transportasi hijau, pengelolaan limbah, bangunan hijau, serta pertanian dan hutan lestari. Dengan cara-cara tersebut, semua kegiatan perekonomian harus erat kaitannya dengan ekosistem. Penerapan ekonomi hijau di Pamekasan sendiri dapat dijumpai pada berbagai sektor perekonomian, baik sek-

[132] Lembaga Penelitian & Inovasi, "Laporan Akhir Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pamekasan."

tor pertanian maupun non-pertanian.[133] Oleh sebab itulah, terdapat beberapa *stakeholder* yang memang harus saling berkolaborasi dalam mengoptimalkan ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan, elemen-elemen terkait sebagai berikut:
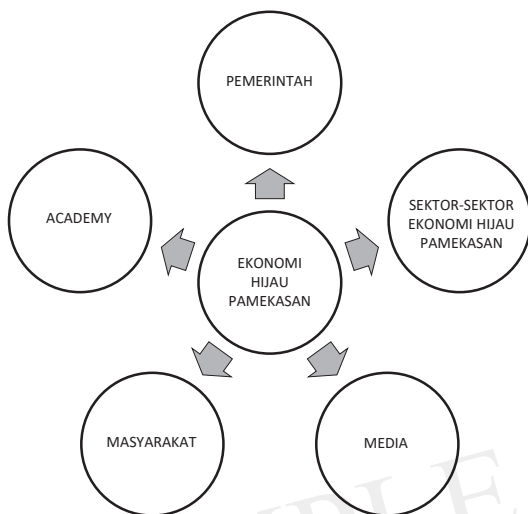
Gambar 6.1 Konsep *Pentahelix* dalam Ekonomi Hijau Pamekasan

1. Akademi

Sebagai elemen yang melakukan riset (*researcher*) atau penelitian untuk mengetahui secara komprehensif faktor-faktor yang memengaruhi perekonomian masyarakat, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat guna terus meningkatkan kualitas *output* dan pengelolaan sektor-sektor di Kabupaten Pamekasan dalam membantu meningkatkan ekonomi hijau syariah mengingat Pamekasan merupakan kabupaten dengan universitas terbanyak di antara kabupaten yang lain di Pulau Madura.[134] Prospek kolaborasi yang dapat dilakukan guna menunjang penguatan sistem inovasi daerah (SIDa) di Kabupaten

[133] Laporan Akhir Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan, Lembaga Penelitian dan Inovasi Airlangga, Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama NOMOR 027.27/01/432.401/SPK/2017.

[134] Bambang Sayaka Effendi Pasandaran, "Ekonomi Hijau untuk Pemulihan Sumber Daya Alam dan Lingkungan," Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor, 2007), 259.

Pamekasan termasuk ekonomi hijau dengan melibatkan universitas/ perguruan tinggi, masyarakat, dan industri. Selain itu, keterlibatan pemerintah, investor, lembaga swadaya masyarakat, dan peneliti/ akademisi merupakan hal pendukung yang harus dibangun atau digerakkan oleh pemerintah daerah.
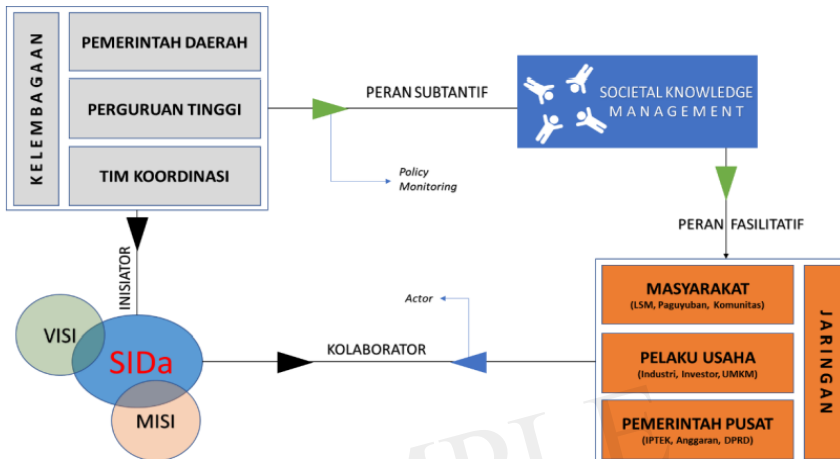
Gambar 6.2 Kerangka Kolaborasi untuk Penguatan SIDa

Berdasarkan gambar di atas, kerangka kolaborasi yang ditawarkan guna mendukung penguatan SIDa di Kabupaten Pamekasan memerlukan peran serta berbagai elemen masyarakat, institusi, hingga lembaga terkait. Diharapkan dengan adanya *framework* tersebut, penguatan SIDa di Kabupaten pamekasan dapat meningkatkan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, *framework* tersebut akan menunjang kinerja pemerintah daerah melaksanakan adanya percepatan reformasi birokrasi yang berlaku di semua bidang yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan secara transparan dan akuntabel.

Perguruan tinggi mempunyai peran sosial yang tertuang dalam tri dharma perguruan tinggi, yaitu; pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Peran sosial yang diampu perguruan tinggi biasanya berkaitan dengan pengabdian kepada masyarakat. Namun, di era informasi dan kemajuan teknologi, kegiatan pendidikan dan penelitian juga dapat dikategorikan sebagai peran sosial perguruan

tinggi. Beberapa literatur menegaskan peran baru perguruan tinggi yang membuka peluang kolaborasi dan kooperasi. Berdasarkan kajian mengenai peran perguruan tinggi dalam menajemen pengetahuan kemasyarakatan (*societal knowledge management*), peran yang dapat diambil oleh perguruan tinggi terkait penguatan SIDa dapat dibedakan ke dalam dua kategori; inisiator dan kolaborator. Penjelasan mengenai kedua peran tersebut adalah sebagai berikut:

a. Inisiator

Perguruan tinggi berperan sebagai katalisator bagi persoalan-persoalan masyarakat sekitar. Selanjutnya, perguruan tinggi secara institusional mendorong masyarakat melalui berbagai inisiatif-solutif terkait dengan persoalan-persoalan yang telah teridentifikasi. Berdasarkan lima sektor potensial yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan di atas, perguruan tinggi dapat menjadi *change maker* melalui aktivitas akademik dan penelitian yang bersifat solutif untuk kemajuan masyarakat. Hal ini merupakan tahapan awal pembangunan pondasi SKM untuk mendukung penguatan SIDa di suatu wilayah. Dengan kata lain, keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan daerah merupakan klausul mutlak yang harus diinternalisasikan melalui manajemen kolaboratif yang tepat. Melalui inisiator-inisiator yang mupuni, perkembangan daerah akan lebih mudah diwujudkan dalam kerangka kerja kolaboratif. Saat ini IAIN Madura sebagai salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan mulai menjalankan program rumah jurnal. Rumah jurnal tersebut sudah terakreditasi dan sudah berisi data-data hasil penelitian dari dosen dan mahasiswanya. Program ini juga sudah bisa mulai diakses oleh masyarakat. Perguruan tinggi sedang gencar-gencarnya berlomba untuk membuat *database* hasil penelitiannya, salah satu fungsinya memang untuk meningkatkan akreditasi perguruan tinggi. Fungsi lain adalah untuk memublikasikan hasil penelitiannya kepada masyarakat, karena ini juga dapat disebut sebagai sarana edukasi sebagaimana salah satu tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan. Tentunya program ini diharapkan juga dapat bekerja sama dengan Dinas Kominfo untuk pemanfaatan media publikasi perguruan tinggi agar dapat mencapai pemahaman dan kesetaraan pada masyarakat.

b. Kolaborator

Setiap perguruan tinggi pasti memiliki program pengabdian masyarakat, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, yang bersifat pendampingan hingga penyuluhan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang selama ini dilakukan oleh perguruan tinggi merupakan contoh nyata bagaimana peran perguruan tinggi sebagai kolaborator dalam masyarakat. Namun, peran perguruan tinggi sebagai kolaborator tidak hanya sebatas kegiatan pendidikan dan penelitian, melainkan sebagai pusat kajian dan penyedia aktor intelektual. Sebagai kolaborator, perguruan tinggi diharapkan mampu menggerakkan seluruh sivitas akademik untuk terlibat aktif dalam segala bentuk program kolaboratif yang ada di tengah-tengah masyarakat. Misalnya, sebuah desa berkeinginan untuk mengembangkan program pengelolaan sampah kering. Perguruan tinggi mampu berperan sebagai pendamping selama program berjalan. Dengan demikian, masyarakat desa tersebut akan mendapatkan manfaat kehadiran perguruan tinggi secara langsung. Adanya kerja sama antara beberapa pihak sepeti Universitas Madura dan IAIN Madura bersama pemerintah diharapkan dapat memajukan Kapubaten Pamekasan melalui potensi-potensi pada sektor-sektor yang ada, seperti sektor pertanian, sektor pariwisata dan transportasi, sektor perdagangan dan industri, sektor pertambangan dan energi, dan sektor pendidikan. Kolaborasi dan kerja sama juga diharapkan dapat memunculkan komoditas agar dapat dieksplorasi oleh dinas terkait bersama dengan perguruan tinggi. Peran perguruan tinggi dalam peningkatan potensi daerah pendukung SIDa dalam konteks kolaborator adalah sebagai pihak yang melakukan kajian-kajian dan penelitian pada sektor-sektor yang sudah disebutkan di atas. Kajian-kajian perlu dilakukan guna membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan terkait pembangunan di Kabupaten Pamekasan, agar pembangunan lebih merata dan dapat memaksimalkan potensi daerah yang ada. Hasil dari kajian-kajian tersebut juga dapat dipublikasikan kepada masyarakat.

Seperti IAIN Madura yang sudah memiliki Rumah Jurnal, data-data hasil penelitian dari dosen dan mahasiswa IAIN Madura sudah masuk di dalamnya dan dapat diakses oleh masyarakat. Dari publikasi

tersebut, masyarakat yang memiliki pemikiran-pemikiran atau ide-ide terkait pengelolaan potensi daerah dapat menyalurkan pendapatnya kepada pemerintah. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Pamekasan terkenal dengan kesenian karapan sapi. Awalnya, para peternak sapi kebingungan dengan limbah kotoran ternaknya, karena selama ini kotoran sapi tersebut hanya dijadikan pupuk. Untuk menanggulangi hal tersebut, saat ini dosen-dosen Fakultas Pertanian di perguruan tinggi Kabupaten Pamekasan tengah melakukan penelitian terhadap pemanfaatan limbah kotoran sapi menjadi bentuk biogas. Hasil riset tersebut selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat, sehingga para peternak bisa memanfaatkan biogas dari limbah kotoran sapi untuk kebutuhan sehari-hari.

Riset lain juga dilakukan untuk pemanfaatan daun-daun kering untuk dijadikan pupuk. Para petani pun bisa memanfaatkan limbah daun-daunan menjadi pupuk tanaman dan tidak perlu mengeluarkan dana lebih banyak. Kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa perguruan tinggi di Kabupaten Pamekasan masih perlu ditingkatkan. Mengingat kegiatan tersebut dapat membantu dalam mengembangkan dan mengelola potensi daerah.

Ada banyak sekali sektor-sektor potensial di Kabupaten Pamekasan yang perlu dikelola dan dikembangkan dengan menggunakan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Menurut para informan, kolaborasi yang baik antar seluruh elemen adalah kolaborasi yang saling menguntungkan. Layaknya simbiosis mutualisme yang tidak merugikan pihak manapun. Perguruan tinggi dapat melakukan penelitian terkait suatu sektor atau komoditas di daerah Pamekasan, selanjutnya hasil dari penelitian tersebut dapat disosialisasikan atau dipublikasikan kepada masyarakat sebagai langkah kegiatan pengabdian masyarakat. Pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian sebagai pertimbangan dalam pembuatan kebijakan, pengelolaan sektor, pengembangan daerah, dan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat. Masyarakat juga dapat memberikan timbal balik berupa pemikiran atau ide-ide kemudian disampaikan pada pemerintah dan memberikan kritik beserta saran untuk evaluasi pembangunan daerah.

Dalam perkembangan dunia usaha juga tidak luput dengan elemen yang menjadi pendukung SIDa yang menjadi pendukung dan membantu pemerintah dalam sektor pariwisata. Dengan kondisi geografis pamekasan yang ada, maka wilayah ini memiliki banyak pantai yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata yang akan menarik pengunjung baik turis domestik maupun mancanegara untuk mengunjungi Kabupaten Pamekasan. Selain itu kesenian asli juga menjadi daya tarik tersendiri.[135]

Hal ini dibuktikan dengan acara tahunan yakni Semalam di Madura yang menampilkan berbagai kesenian dan budaya khas Madura ditampilkan di depan turis lokal dan mancanegara. Dari kegiatan ini diharapkan tidak hanya mahasiswa dari salah satu program studi saja yang dilibatkan seperti prodi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, tapi juga dapat bekerja sama dengan program studi lainnya. Kerja sama juga perlu ditingkatkan dalam kolaborasi antara program studi dengan dinas terkait. Misalnya, Dinas Pertanian dengan Fakultas Pertanian, Dinas Perikanan dengan Fakultas Perikanan, dan seterusnya. Kolaborasi ini dirasa perlu ditingkatkan karena beberapa informan menyebutkan bahwa faktor kurangnya kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Bahkan ada pula program studi yang belum tersentuh adanya kolaborasi dengan dinas terkait, seperti pada Program Studi Informatika di Universitas Islam Madura. Akan semakin baik apabila kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dilakukan secara merata, sehingga pembangunan di Kabupaten Pamekasan pun dapat lebih menyejahterakan masyarakat di seluruh kecamatan yang ada.

1) Sektor-sektor ekonomi hijau Pamekasan

   Sebagai objek utama dalam membantu meningkatkan kesejahteraan umat dan mempromosikan berbagai sektor dengan kolaboasi sebelumnya yakni pada sektor pariwisata, maritim, pertanian, perumahan, pertambangan, perternakan, dunia usaha atau industri halal dan sebagainya yang berkaitan dengan Ekonomi Hijau Kabupaten Pamekasan.

[135] Lembaga Penelitian & Inovasi, "Laporan Akhir Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pamekasan."

2) Masyarakat, sebagai subjek utama dalam membantu meningkatkan ekonomi hijau karena yang akan berpartisipasi dalam berbagai sektor yang terdapat pada ekonomi hijau dan juga menempati posisi yang sangat penting yakni kunci keberhasilan program ini.
3) Pemerintah

   Sebagai elemen yang bertindak sebagai ***supporting*** unit terhadap segala aktivitas ekonomi hijau terutama koordinasi dan fasilitasi yang berkaitan dengan legalitas hukum operasionalnya serta pemerintah juga berperan sebagai tim ahli yang akan memberikan penyuluhan/sosialisasi terkait revitalisasi, mengonstruksi, mengembangkan, mengawasi, mendanai dan melaksanakan program ekonomi hijau secara berkelanjutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa terdapat tiga pelaku utama dalam jaringan pemasaran adalah perusahaan (bisnis), konsumen, dan pemerintah.[136]
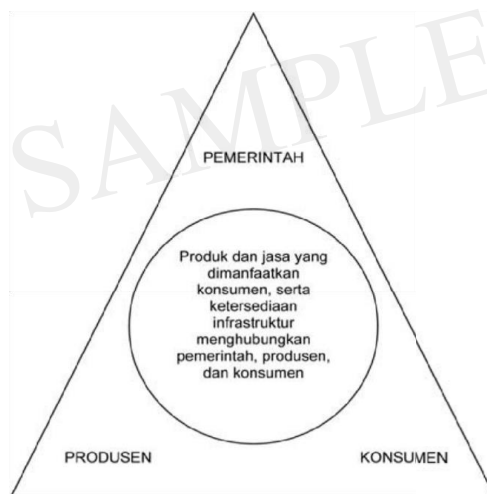
Gambar 6.3 Segi Tiga Perubahan

Secara struktural, institusi yang bertanggung jawab terhadap perguruan tinggi adalah Kementerian Ristek-Dikti atau Kementerian Agama. Keterlibatan pemerintah daerah terkait segala bentuk kebi-

[136] Effendi Pasandaran, "Ekonomi Hijau untuk Pemulihan Sumber Daya Alam dan Lingkungan."

jakan maupun program yang terkait dengan perguruan tinggi pada hakikatnya sangat kecil. Namun demikian, kans (peluang) pemerintah daerah untuk melibatkan perguruan tinggi agar peningkatan ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan sangat terbuka. Jika kita telaah lebih dalam, keberadaan perguruan tinggi yang berkualitas selalu beriringan dengan kemajuan sebuah daerah tersebut. Sampai saat ini pun, data yang terkumpul oleh tim peneliti belum dapat digunakan untuk mengatur keterlibatan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam mendukung dan meningkatkan SIDa yang di dalamnya juga terdapat perkembangan ekonomi hijau.

Peran pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan digolongkan dalam dua jenis yaitu peran substantif dan peran fasilitatif. Peran substantif merupakan peran aktif pemerintah daerah dalam mendukung penguatan dan pengembangan sistem inovasi daerah seperti pada kebijakan dan wewenang terhadap institusi-institusi potensial. Adapun peran fasilitatif pemerintah daerah dalam penguatan sistem inovasi daerah yaitu terdapat pada wujud nyata atau langkah pemerintah yang harus dilakukan untuk membentuk program-program apa saja yang dapat diterapkan dalam mengembangkan potensi inovasi daerah.

a) Peran Substantif → Pemerintahan daerah Kabupaten Pamekasan dalam penguatan SIDa ini termasuk dalam pengawasan dan penanggung jawab potensi inovasi daerah. Selain itu hal utama dalam penguatan inovasi daerah bagi pemerintah yaitu mangatur (manajerial) dan menentapkan kebijakan agar sistem inovasi daerah terus meningkat untuk kesejahteraan masyarakat. Kebijakan akan dibuat oleh pemerintah daerah mengenai bagaimana sistem inovasi bisa berjalan dan berkembang dalam jangka panjang maupun jangka pendek berdasarkan kerja sama atau kolaborasi yang telah ditetapkan antar aktor yang ahli di bidangnya. Tidak hanya itu pemerintah daerah juga harus melakukan pembinaan terhadap masyarakat yang dianggap memiliki potensi dalam meningkatkan inovasi daerah seperti pada sektor perdagangan dan industri, pertanian, pariwisata dan transportasi, pertambangan dan energi serta di bidang pendidikan dan kesehatan.

b) Peran Fasilitatif → Peran ini melibatkan pada penyediaan sumber daya manusia, teknologi informasi serta kebijakan pendanaan

dalam keberlangsungan program-program tersebut. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus berperan sebagai kolaboratif aktif yang dapat memberikan dukungan untuk peningkatan potensi sistem inovasi daerah. Potensi inovasi daerah dapat berkembang jika ada dukungan teknologi informasi sebagai penyebaran dan pencarian inovasi-inovasi baru yang terdapat pada Kabupaten Pamekasan. Tentunya teknologi informasi ini akan bejalan lancar jika terdapat sumber daya pendukung dari aktor yang ahli di bidangnya. Oleh karena itu, kolaboratif antar-pemerintah dengan aktor-aktor lain untuk peningkatan penguatan SIDa sangat penting guna pengembangan dan keberlanjutan sistem inovasi daerah dalam jangka panjang. Dalam Kabupaten Pamekasan sendiri peran pemerintah daerah seperti dinas-dinas tertentu seperti kominfo, perikanan, pertanian, serta dinas UKM dapat saling berkolaboratif dengan masyarakat untuk menerapkan program unggulan Kabupaten Pamekasan sebagai inovasi daerah dalam bentuk nyata. Kolaboratif dinas pemerintah dengan masyarakat ini akan memberikan dampak positif sehingga sistem inovasi daerah di masyarakat dapat berjalan lancar sesuai keinginan dan kebutuhan dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di kabupaten Pamekasan.[137]

c) Media, sebagai alat utama dalam melakukan transaksi penjualan, promosi dan pembayaran yang juga mempunyai peranan sangat penting demi lancarnya transaksi. Media juga sebagai pendukung pencipta *branding* dari penerapan ekonomi hijau agar lebih dikenal oleh masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional.

B. Indikator Implementasi Penerapan Prinsip-prinsip Ekonomi Hijau

Indikator implementasi dari ekonomi hijau ini lebih diarahkan terhadap *Coorporate Social Responsibility* (CSR) yang banyak dilakukan oleh perusahaan seperti gotong-royong dalam penghijauan dengan

[137] Lembaga Penelitian & Inovasi, "Laporan Akhir Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pamekasan," 70.

masyarakat sekitar. Salah satunya adalah melalui pengintegrasian program lingkungan kampung hijau produktif yang bisa diterapkan di Kabupaten Pamekasan. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan hidup dasar, menciptakan lingkungan hidup yang nyaman dan sehat, dengan cara memaksimalkan penggunaan lahan terbatas yang saat ini telah tergantikan oleh rumah dan bangunan lainnya. Ketentuan agar daerah memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) sudah diatur sejak 2007 melalui Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Program ini sejalan dengan SDGs dengan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan ketahanan terhadap bencana melalui pengembangan dan penerapan *green air, green waste* (mengelola limbah dan menguranginya melalui daur ulang), dan *green transportation*. Selain itu, Kampung Hijau Produktif adalah program terpadu yang berfokus pada gerakan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan terdiri dari upaya menjaga kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah melalui bank sampah, mendaur ulang sampah plastik menjadi kerajinan, pemasangan pengelolaan air limbah komunal dan pengomposan sampah rumah tangga, selain meningkatkan ruang terbuka hijau dengan menanam tanaman produktif (buah dan sayuran) dalam pot dan kebun vertikal.[138]

Jika kita melihat di Kabupaten Pamekasan sendiri terdapat penyerahan bantuan CSR Bank Jatim kepada pengusaha baru di Pamekasan. Penyerahan bantuan berupa peralatan kerja bagi UMKM itu digelar di Mandhepa Agung Rongosukowati. Di mana penerima bantuan CSR tersebut adalah peserta program Wira Usaha Baru (WUB) Pemkab Pamekasan. WUB merupakan program khusus bidang ekonomi yang dirancang Pamekasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. WUB ini dilakukan bagi sepuluh ribu pengusaha baru, karena itu diberi program Saputangan Biru. Hal ini menunjukkan adanya kebermanfaatan dari CSR yang sudah jelas berdampak kepada masyarakat sekitarnya, khususnya memang untuk wirausaha baru. Ini men-

---

[138] Ompang Reski Hasibuan, "Kampung Hijau Produktif Sebagai Penerapan Corporate Social Responsibility," *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 2 (Agustus 2019): 103.

jadi peluang besar dalam pengoptimalan potensi dari masing-masing wirausaha untuk terus meningkatkan produk yang dijualnya dengan memanfaatkan Wamiramart sebagai tindak lanjut dari berbagai produk hasil olahannya.

C. Analisis SWOT

Analisis SWOT (*strenght, weakness*, *opportunities*, dan *treats*) merupakan analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi dalam penerapan ekonomi hijau.

No.	SWOT	Keterangan
1.	Kekuatan	Terdapat beberapa sektor penyokong terealisasinya ekonomi hijau di Pamekasan itu sendiri, seperti sektor perumahan, pertanian, perhutanan, maritim, perdagangan, industri, dan pertambangan.
2.	Kelemahan	Adanya keterbatasan modal yang akan berimbas pada beberapa aspek, seperti halnya minimnya pengelolaan produk, adanya juga pemasaran yang masih belum maksimal dan tidak efisiennya kelembagaan yang ada dan kesinambungan produksi pengembangan serta kurangnya pendampingan untuk pengembangan SDM yang kurang mengetahui tentang apa itu ekonomi hijau.
3.	Peluang	Desa Tematik, penciptaan 10.000 pengusaha baru, program sertifikasi halal, dan adanya Wamiramart
4.	Ancaman	Kurang kepercayaan akan peluang ekonomi hijau yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Pamekasan.

Dalam mengimplementasikan beberapa kebijakan ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan, tentunya diperlukan beberapa analisis yang bisa digunakan untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan dari penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan, yakni salah satunya menggunakan analisis SWOT yang bisa mengetahui berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari adanya ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan.

1. Kekuatan

Seperti yang dapat kita ketahui bersama, bahwa Kabupaten Pamekasan berada pada 6051' – 7031' Lintang Selatan dan 113019' - 113058' Bujur Timur. Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2015 sebesar 854.194 jiwa yang tersebar di beberapa kecamatan. (BPS,2017).[139] Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai salah satu kabupaten yang berprestasi di Pulau Madura. Luas wilayah administratif Kabupaten Pamekasan mencakup 79.230 hektare atau sekitar 1,71 % luas Provinsi Jawa Timur. Wilayah administratif Kabupaten Pamekasan terbagi menjadi 13 kecamatan dengan total 178 desa dan 11 kelurahan. Jumlah penduduk pada tahun 2015 tercatat mencapai 854.194 jiwa dengan komposisi 415.217 laki-laki dan 438.977 perempuan. Jumlah tersebut didominasi oleh penduduk usia produktif (antara 15 hingga 65 tahun). Di mana Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa sektor strategis yang menunjang peningkatan kualitas wilayah Pamekasan.

Dengan adanya beberapa sektor strategis kabupaten Pamekasan, maka perlu kiranya melihat potensi Kabupaten Pamekasan dari berbagai sisi guna terealisasinya ekonomi hijau Pamekasan seperti dari permukiman, pertambangan, perdagangan, kehutanannya, industri, dan sebagainya. Salah satunya yang sangat mendukung dari maritimnya. Banyak nelayan dan petani ikan menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan yakni terdapat 9.350 nelayan, 4 petani payau brackish, dan 369 petani ikan tawar yang bisa meningkatkan perekonomian keluarganya dari faktor ini.[140] Selain itu juga terdapat penambang garam dan luas areal pertambangan garam rakyat menurut kecamatan di Kabupaten Pamekasan yakni terdapat 1.463 jiwa penambang, 914 ha luas lahan, 123.535 ton produksi garam yang dihasilkan yang juga berpotensi untuk mendongkrak perekonomian yakni dengan penerapan *green economy* pada sektor pariwisata seperti hutan mangrove yang ada di lembung, wisata tambak garam yang ada di bunder pademawu

[139] Badan Pusat Statistik, "Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan di Kabupaten Pamekasan."

[140] Badan Pusat Statistik, "Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan."

dll.[141] Melihat dari Komoditas unggulan pertaniannya dan produknya di wilayah Pamekasan di antaranya beberapa tanaman dan sayuran juga yakni bawang merah, cabai merah, cabai rawit, tomat, ketimun, terong, kacang panjang, kangkung, bayanm, dan sawi yang memang memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[142]

Melihat adanya berbagai potensi dan kekuatan masing-masing sektor tersebut, perlu kiranya juga menerapkan spesifikasi terhadap berbagai jenis produk unggulan dari setiap desa guna menunjang terealisasinya ekonomi hijau. Dengan adanya berbagai potensi alam yang berbeda di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi geografis dari wilayah tersebut, maka penghasilan yang diperoleh pun juga berbeda-beda. Dengan adanya OVOP (*One Village One Product*) yang berguna untuk menspesifikasikan produk yang dihasilkan oleh masing-masing desa terkait, maka akan mempermudah pula pemetakan potensi dan pengoptimalan peranan dari Ekonomi Hijau itu sendiri dari berbagai sektor. Hasil-hasil dari OVOP Kabupaten Pamekasan adalah sebagai berikut:

a. Sapi Bibit Madura di Desa Dempo Barat
   Desa Dempo Barat merupakan wilayah yang berpotensi dalam pengembangan sapi bibit madura. Hal ini didukung dengan jumlah populasi sapi madura itu yang paling tinggi dari Pamekasan, adanya keunikan dari wilayah ini di mana terkenal akan sentra sapi sonok, adanya performan populasi sapi lokal yang unggul dengan bobot 300-600 kg dan lain-lain. Adapun untuk permasalahan pengembangan bibit sapi Madura ini adalah kurangnya ketersediaan pakan, terlebih pada musim kemarau. Ditambah lagi dengan adanya permodalan usaha yang terbatas juga menjadi kendalanya. Pengelolaan pupuk untuk menjadi kompos/biogas juga sangatlah minum dan termasuk belum maksimalnya dari pemasarannya yang belum optimal serta sebagainya.
b. Pisang di Desa Sokalelah
   Desa Sokolelah merupakan wilayah dengan potensi pendukung

[141] Badan Pusat Statistik.

[142] Badan Pusat Statistik, "Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Pamekasan (Ha)" (Pamekasan, 2015).

berupa pisang. Hal ini karena atas pertimbangan beberapa hal seperti banyaknya masyarakat yang menggandrungi tanaman pisang dengan keuntungan yang tinggi sehingga menjadi daya tarik sendiri, adanya pengelolaan pisang dalam skala industri sangan mudah diterapkan karena secara kuantitas dan kualitas SDM sangat memadai, adanya pasar desa yang juga membantu dalam pemasarannya sehingga mudah dikenal dengan fluktuasi harga yang jarang terjadi cuma kalau panen raya tiba, maka harganya sedikit menurun. Adapun untuk permasalahannya adalah terbatasnya prasarana yang ada, penggunaan pupuk anorganik yang cukup tinggi, pengelolaan komoditas pisang masih sangatlah minim, adanya masalah pada tanaman pisang seperti kuning pada batang, busuk atau hitam pada buah atau adanya serangan ulat, dan yang lebih parahnya lagi kekurangan sumber daya air yang membuat petani menanam separuh dari kepemilikan lahan untuk mengantisipasinya.

c. Hutan mangrove di Desa Pegagan
   Desa Pagagan memiliki potensi untuk dikembangkan yakni dari hutan mangrove yang ada, di mana dengan jenis tanah yang berlumpur sehingga kekuatan ombak terpecah serta terlindungi dari adanya arus pasang surut yang kuat. Adanya kesadaran masyarakat terhadap ekosistem mangrove yang sangat tinggi menunjukkan kesadaran dari sekitar masyarakat yang cukup baik. Sehingga mereka bisa memanfaatkan potensi seperti bagi laki-lakinya mencari rajungan, sedangkan bagi para perempuan mencari tiram dan kerang yang bisa membantu perekonomian mereka. Adapun permasalahan yang ada di sana adalah belum menerapkan pemanfaatan mangrove sebagai ekowisata, mangrove yang rusak karena serangan tiram, udang, belum adanya pengelolaan beraneka produk olahan mangrove dan sebagainya.

d. Bawang merah di Desa Bangsereh
   Desa Bangsereh memiliki potensi bawang merah yang dapat dikembangkan dengan baik. Dengan kelebihannya yang memiliki tanah berpasir, topografi lahan termasuk di daerah perbukitan, dengan sistem budidaya bawang merah yang lebih baik dibandingkan tembakau, dan termasuk penghasil terbesar bawang

merah di Kabupaten Pamekasan. Adapun permasalahan yang dihadapinya adalah minimnya pengetahuan petani tentang penanganan penyakit sehingga bawangnya banyak terserang penyakit embun, wereng. Minimnya permodalan juga menjadi kendalanya di mana membuat pengelolaan hasil panen masih minim sekali. Ditambah lagi tidak adanya tempat khusus penyimpanan bawang. Kurangnya sumber air disaat musim kemarau dan keberadaan kelompok tani kurang optimal dalam memediasi kepentingan petani juga menjadi penghambat dari keberlangsungan potensi bawang merah di wilayah ini.

e. Durian di Desa Pegantenan

Desa Pegantenan memiliki potensi dalam pengembangan produk duriannya di mana wilayah ini menanam durian sudah berlangsung puluhan tahun yang menjadi sentra durian terbesar berada di dusun utara. Terdapat durian unggulan varietas lokal ini diduga berumur lebih dari seratus tahun. Keuntungan penjualannya tinggi dengan kisaran 20.000.000-200.000.000/tahun. Ditambah lagi dengan banyaknya tersedia lahan kosong untuk bisa ditanami durian juga menjadi prospek yang sangat menjanjikan. Adapun permasalahannya adalah banyak pengembangan macam varietas durian yang tidak dapat dilakukan, adanya penyakit busuk buah yang menjadi keluhan petani akan tanamannya yang terserang, rasa legit dan enak dari buahnya, namun bibit lokal yang ada masih rendah dan mudah terserang penyakit dan sebagainya.

f. Cabai jamu di Desa Blumbungan

Desa Blumbungan terkenal akan Cabai jamu yang dapat dikembangkan. Di mana terdapat beberapa hal yang menjadi kelebihan desa ini yakni lahannya tanah putih yang cocok untuk cabai jamu, adanya kelompok tani bina karya yang bagus dengan anggota 214 orang, didukung dengan harga yang mahal menjadi daya Tarik sendiri sserta sudah menjadi tradisi turun-temurun menanam cabai jamu, bisa dijadikan komoditas untuk tabungan petani karena tahan lama, adanya pemasaran yang mudah dan tidak kesulitan, dan sebagainya. Adapun permasalahannya adalah penggunaan pohon maronggi sebagai panjatan cabai jamu mudah mati. Kurangnya ketersediaan air pada musim kemarau kurang sekali

sehingga penanaman bibit cabai jamu sering kali mati ketika kurang air. Ditambah lagi dengan minimnya pengelolaan produk cabai jamu yang sangat minim dengan penyakit pada tanaman ini yang banyak terserang dan sebagainya.

g. Rumput laut di Desa Tanjung
Desa Tanjung menjadi desa pendukung rumput laut karena kualitas rumput laut tergolong unggul dengan lahan yang tersedia cukup luas hingga 20-40 ha. Selain itu kondisi perairan yang tidak terlalu deras dan kemaan nelayan untuk budidaya rumput laut ini sangatlah tinggi didukung dengan adanya kelompok tani yang baik. Adapun permasalahannya adalah pembenihan rumput laut harus membeli ke Banyuwangi dan Probolinggo karena masih belum ada, pengolahan rumput laut tidak optimal, karena produk yang dihasilkan hanya dalam jumlah produksi yang kecil serta keanekaragaman pengolahan masih minim serta masih belum optimalnya pemasaran dari rumput laut ini juga menjadi faktor yang harus dipertimbangkan juga.

h. Ayam petelur di Desa Kertagena Laok
Desa Kertagena Laok merupakan wilayah yang berpotensi dalam pengembangan ayam petelur karena lokasi ini sangat strategis jauh dari keramaian lalu lintas yang membuat ayam tidak teralu stress, struktur tanah yang kering sehingga cocok di mana di saat musim penghujan tiba tidak mudah becek dan lembab. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah terbatasnya faktor pemodalan yang masih belum mencukupi memelihara ayam dengan jumlah yang banyak, peternak mau tidak mau harus membeli vaksin dengan biaya harga vaksin cukup tinggi, adanya pendampingan dan penyuluhan bagi peternak kurang optimal khususnya peternak pemula, SDM peternak serta kelembagaan masih belum optimal, ditambah lagi dengan tidak ada koperasi yang memfasilitasi penyediaan bibit, pakan, obat-obatan, dan sebagainya.

i. Jagung di Desa Kadur
Desa Kadur merupakan desa yang berpotensi dalam pengembangan jagung di mana sekita 60% petani memilih menanam jagung dalam satu tahun dengan jenis jagung hibrida. Selain itu, jagung merupakan satu-satunya tanaman yang menguntungkan di

dusun sumber batu, prengpengan dan nong poteh karena wilayah ini berbatu dan ketersediaan air minim. Adapun untuk permasalahannya yakni mengalami kesulitan dibibit jagung hibridanya, ditambah lagi dengan minimnya ketersediaan air, kelembagaan pemasaran masih belum berjalan dengan baik, kurangnya pengelolaan produk berbahan dasar jagung serta keterbatasan mesin pertanian yang tersedia.

j. Batik di Desa Klampar dan Toket
   Desa Klampar dan Toket memiliki potensi dalam pendukung pengembangan batik. Di mana di Klampar sendiri memiliki proporsi pembatik paling besar di Pamekasan dan di plot sebagai kampung batik didukung dengan komitmen pemerintah dalam mengembangkan batik sangat tinggi. Lokasi yang strategis karena dekat dengan pasar sentra batik atau pasar 17 Agustus juga menjadi peluang yang besar dengan aktivitas masyarakat yang setiap harinya secara turun-temurun sudah membatik bahkan bisa dijadikan destinasi wisata bagi pengunjung yang ingin melihat aktivitas membatiknya. Khusus Desa Toket, spesialisasi pembatik pada desain gambarnya, keunggulan dalam nilai kehalusan dan seni batiknya dominan. Desa Toket ini berpotensi untuk menjadi kampung batik juga dengan syarat kerja keras dari segala elemen dalam memapankan kelembagaan para pembatik. Selain itu dengan ciri khas dan corak yang beragam disertai dengan warna-warna yang sangat indah menjadi pemikat pembeli untuk membelinya dengan selembar kain batik Pamekasan dengan ukuran 2 meter harganya dari mulai Rp45.000 hingga Rp3.000.000. Akan tetapi, terdapat beberapa permasalahan seperti kelembagaan pemasaran batik sangat rentan dengan adanya perang harga. Tidak adanya koperasi, kelompok pembatik dan juragan batik, adanya peralatan dan bahan baku yang mahal. Permodalan terbatas dengan limbah batik yang masih sangat prihatin.

k. Cabai besar di Desa Larangan Slampar
   Desa Larangan Slampar terkenal akan cabai besarnya yang sangat berpotensi dalam kesejahteraan masyarakat di sana. Masyarakat Desa Larangan Slampar hampir seluruhnya menanam cabai besar sebagai salah satu sumber penghasilan, selain itu para petaninya

ulet dengan memanfaatkan semaksimal mungkin tanah mereka walaupun hanya dapat ditanami di musim penghujan. Terlebih lagi adanya pengelolaan pupuk untuk menjadi kompos sudah mulai diterapkan di wilayah ini. Adapun permasalahannya yakni penanamannya hanya dilakukan saat musim penghujan, secara kelembagaan masih belum efisien, modal terbatas dengan bibit yang begitu mahal, kurangnya keilmuan petani tentang teknologi pertanian, disertai dengan pemasaran yang belum optimal.

l. Jahe di Desa Tebul Barat
Desa Tebul Barat sangat berpeluang dalam penghasil jahe yang Sebagian seperempat lahan petani ditanami jahe serta sudah menjadi tradisi untuk menanamnya, oleh sebabnya wilayah ini dicanangkan sebagai wilayah agrowisata dengan harga kisaran jahe emprit Rp23.000-Rp32.000 dengan rataan keuntungan antara 3-8 juta per petani/tahun. Akan tetapi permasalahan yang ada yakni tidak ada pengelolaan produk jahe, jahe yang dihasilkan kualitasnya semakin menurun, rentan terserang penyakit bercak daun dan busuk daun dan sebagainya.

m. Ikan teri paron di Desa Polagan
Desa Polagan berpotensi untuk pengembangannya di bagian teri paron karena adanya kerja sama yang baik antara nelayan dengan pengepul, hasil tangkapan ikan tertinggi adalah teri paron, sayangnya pengolahan hanya terbatas pada pengeringan. Selain itu adanya banyak pengepul membuat harga ikan stabil dengan akses jalan yang baik serta daerah yang strategis dekat dengan jalan besar membuat pemasaran ikan mudah serta jarak daratan dan lautan yang dekat. Adapun ada beberapa permasalahan yang memang harus dihadapi yakni di saat hasil laut melimpah harganya menjadi turun, modalnya terbatas sehingga masih minjam ke pembeli ikan, sarana untuk pengolahan hasil tangkapan ikan masih terbatas dan sebagainya.

n. Singkong di Desa Rekkerrek
Desa Rekkerrek termasuk ke desa yang berpotensi dalam pengembangan singkong karena di wilayah ini sudah secara turun-temurun dalam menanam singkong serta lahan yang cocok untuk ditanami singkong. Selain itu komoditas ini dijadikan sebagai tabungan

bagi petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ketika butuh uang, petani memanen sebagian untuk dijual. Akan tetapi, permasalahannya adanya tanaman singkong yang ada kerap terserang penyakit dengan permodalan yang minim disertai dengan fluktuatif harga yang sangat tinggi. Pengelolaannya hanya diolah menjadi keripik dengan pemasaran yang masih kesulitan dan sebagainya.[143]

2. Kelemahan

Setelah sekian banyak potensi di kabupaten Pamekasan yang kita temui, tidak dapat dimungkiri terdapat beberapa kelemahan yang menjadi penghalang terealisasinya ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan. Salah satunya berasal dari kurangnya pendampingan untuk pengembangan SDM sehingga kurang mengetahui tentang apa itu ekonomi hijau. Hal ini akan memengaruhi faktor-faktor dari berbagai sektor yang ada. Karena ketidakpahaman masyarakat akan ekonomi hijau ini akan mengurangi pengoptimalan potensi lokal yang dikelola berdasarkan dari prinsip-prinsip ekonomi hijau itu sendiri. Ditambah lagi dengan minimnya pengolahan produk dari berbagai macam variasi yang ada juga memengaruhi perkembangan ekonomi hijau yang ada. Banyak potensi yang ada akan tetapi masyarakat tidak mengetahui teknik pengelolaan yang baik dari sektor-sektor terkait. semisal dari batik Pamekasan, di mana terkadang ada beberapa orang yang setelah dijahit menjadi baju batik itu kain perca atau sisanya kurang dimaksimalkan. Padahal sisa kain perca tersebut bisa diolah menjadi pernak-pernik yang akan meningkatkan nilai jual dan menambah penghasilan masyarakat. Terlebih lagi persoalan permodalan yang menghambat kinerja dan produktivitas dari sektor-sektor yang ada di dalam ekonomi hijau. Percuma kita memiliki ide dan gagasan akan tetapi terhalang oleh modal untuk merealisasikannya. Dan hal inilah yang menjadi tantangan terbesar pengusaha kecil menengah atau masyarakat yang akan memulai usaha. Keterbatasan modal, pe-

[143] Farahdila Kutsiyah, "Performa Desa yang Diusulkan untuk Penerapan One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Pamekasan," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, No.1 (1 Juni 2017): 25–40.

masaran, tidak efisiennya kelembagaan yang ada dan kesinambungan produksi pengembangan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Batik Toket Kab. Pamekasan, terdapat beberapa masalah yang memang menjadi penyebab kurangnya peluang Ekonomi hijau terealisasi dengan baik. Di antaranya yakni dari strategi pemasaran yang masih kurang sehingga membuat batik kurang begitu terkenal. Selain itu banyak pembatik yang masih bekerja ke juragannya karena belum bisa mandiri atau terbatas oleh modal. SDI yang adapun juga kurang mumpuni, karena juragan batik memberikan desainnya ke pembatik, lalu pembatiklah yang mulai mendesainnya sesuai dengan contoh yang telah diberikan oleh sang juragan. Selain itu, pengoptimalan peran BUMDES yang kurang maksimal yang juga menghambat peningkatan perekonomian masyarakat.[144]

3. Peluang

Adanya Desa Tematik yang terdapat di Kabupaten Pamekasan memberikan peluang tersendiri dalam terealisasinya ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan. Pemkab Pamekasan mendorong pemerintah desa untuk menggali potensi desanya sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pamekasan, Achmad Faisol mengungkapkan bahwa pembentukan desa tematik dilakukan sejak kepemimpinan Bupati Badrut Tamam dengan beberapa langkah strategis agar desa bisa menggali potensinya. Langkah itu diawali dengan sosialisasi masif kepada pemerintah desa hingga akhirnya terdapat beberapa desa binaan menjadi desa tematik. Di antaranya adalah desa di Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Kadur. Berkaitan dengan sistematikanya, tidak mungkin desa membiayai seluruhnya.

Desa tematik ini bisa di-*support* oleh semua *leading* sektor yang mendukung pengembangan desa tematik dimaksud. Misalnya, ada desa yang menjadikan desanya sebagai desa wisata, maka OPD terkait bisa mendorong pertumbuhan wisatanya, baik melalui bantuan alat permainan, sistem pengairan, dan lain-lain. Dari pihak Pemkab memberikan stimulus kepada kepala desa dengan cara kompetisi desa

[144] Risa Bela, "Seputar Batik Toket," 20 Februari 2022.

tematik yang digelar mulai tahun 2021 dengan *reward* mencapai Rp 200 juta perdesa. Penghargaan itu diberikan agar desa bahu membahu menggali potensinya demi kesejahteraan masyarakat.[145]

Adanya program Saputangan Biru merupakan bagian dari prioritas pembangunan bidang ekonomi. Program itu tertuang dalam visi misi dalam RPJMD Pamekasan. Peserta program WUB itu dari kalangan generasi muda yang sudah dilatih oleh Pemkab Pamekasan. Selain dilatih mereka juga diberi bantuan peralatan, bantuan permodalan dan bantuan teknis pemasaran hasil usahanya. Pemkab Pamekasan tahun 2021 mendatangkan akan menjaga semangat para pengusaha baru itu agar tidak hilang. Pemkab akan membangun *millennial talent up* dengan mengundang beberapa orang sukses dari orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa.[146]

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, juga mulai memfasilitasi hasil produk kerajinan masyarakat di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah itu, melalui penyediaan toko swalayan yang diberi nama Warung Milik Rakyat (Wamiramart). Langkah dilakukan untuk membantu pemasaran hasil para pelaku UMKM yang tersebar di 178 desa dan 11 kelurahan di kabupaten itu. Wamiramart yang digagas Pemkab Pamekasan mengusung konsep toko swalayan yang isinya menjual semua produk hasil kerajinan masyarakat Pamekasan, seperti makanan, minuman dan beragam hasil kerajinan lainnya. Pemkab Pamekasan, membantu menyediakan tempat, sedangkan pengelolaannya oleh kelompok pelaku usaha mikro. Adanya Wamiramart juga sebagai tindak lanjut dari program wirausaha baru (WUB) yang dicanangkan Pemkab Pamekasan. Program ini merupakan program prioritas, yakni menciptakan sebanyak 10 ribu pengusaha baru dalam kurun waktu lima tahun, dan hingga akhir 2021 jumlah warga Pamekasan yang telah mengikuti program pelatihan ini sebanyak 2.500 orang lebih, tersebar di 13 kecamatan.[147]

[145] Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan (Diskominfo Pamekasan), "Begini Konsep Desa Tematik, Pemkab Pamekasan Siap Support Kebutuhan Desa," 7 Maret 2022, http://kominfo.pamekasankab.go.id/berita/224.

[146] Humas Pamekasan, "Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru," 7 Maret 2022, http://pamekasankab.go.id/berita/194/program-sepuluh-ribu-wirausaha-baru-saputangan-biru.

[147] Muhammad Fakhruddin, "Pemkab Pamekasan Fasilitasi Produk UMKM Melalui Wami-

4. Ancaman

Adanya beberapa wilayah yang lebih cocok dalam penerapan ekonomi hijau ini menjadi ancaman yang besar terhadap terealisasinya ekonomi hijau di Pamekasan. Jika diperbandingkan antara wilayah yang memang cocok dalam penerapan ekonomi hijau ini sangat berbeda jauh baik dari segi potensi alam, sumber daya manusia, pengelolaannya. Seperti halnya di Provinsi Kalimantan Barat yang menjadi penguatan basis ekonomi produktif. Selain itu juga terdapat Kalimantan Tengah yang menjadi agroindustri minyak sawit yang berkelanjutan. Kalimantan Timur lebih spesifik terhadap pengelolaan tata ruang yang ada. Adapun Kalimantan Utara lebih mengarah kepada jasa lingkungan dan lumbung pangan di mana dari berbagai wilayah di Kalimantan itu sangat bagus dan baik sekali dan didukung dengan potensi SDM dan SDA yang ada.[148]

ramart," 7 Maret 2022, https://www.republika.co.id/berita/r5h44a327/pemkab-pamekasan-fasilitasi-produk-umkm-melalui-wamiramart.

[148] *STRATEGI IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DI JANTUNG KALIMANTAN (HEART OF BORNEO / HoB) MELALUI PENDEKATAN EKONOMI HIJAU*, t.t.

BAB VII
Strategi Implementasi dan Langkah Pengembangan Ekonomi Hijau

A. Potensi Prasarana Lingkungan

Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa kemampuan maupun kesanggupan, di antaranya potensi prasarana lingkungan. Prasarana lingkungan yang ada di Kabupaten Pamekasan dapat dinilai complaisant, karena masyarakat dalam pengelolaan sampan organik maupun non-organik dilakukan dengan baik dan tentunya pengelolaan sampah di kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan dikelola secara berbeda, seperti halnya potensi prasarana lingkungan berikut, di antaranya:[149]

1. Pada wilayah desa, pengelolaan infrastruktur lingkungan dalam fokus ini adalah sampah, banyak dilakukan secara independen dengan cara sampah tersebut dibakar atau ditanam di setiap pekarangan setiap keluarga atau rumah.
2. Di beberapa kawasan khususnya kecamatan Pamekasan, Tlanakan, Pademawu dan sekitarnya sampah banyak dikelola secara khusus.

B. Implementasi Ekonomi Hijau di Kabupaten Pamekasan

Ekonomi hijau atau yang biasa disebut dengan *green economy* adalah ekonomi yang berasal dari dunia yang sesungguhnya, yang di-

[149] Ahmad Muhaimin dkk., *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka* (Pamekasan: BPS kabupaten Pamekasan, 2022).

maksud dunia di sini, yaitu dunia dari pekerjaan, kebutuhan manusia, bahan baku dari bumi dan bagaimana semua hal tersebut digabungkan menjadi satu secara harmonis. Ekonomi hijau berbicara mengenai *"use-value"* bukan *"exchange-value"* atau dengan kata lain yaitu mengenai kualitas bukan kuantitas, mengenai komunitas dan ekosistem bukan tentang "akumulasi" dari uang ataupun materiel. Ekonomi hijau didasarkan pada pengetahuan *ecological* yang membahas mengenai ketergantungan manusia secara ekonomis terhadap ekosistem alam dan akibat dari efek aktivitas ekonomi manusia terhadap *climate change* dan *global warming*. Maka dari itu, perlu adanya implementasi mengenai ekonomi hijau ini.

Adapun implementasi ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian perdagangan multilateral dan bilateral untuk jalur barang dan jasa yang berhubungan dengan lingkungan. Di mana, perjanjian perdagangan multilateral, yaitu kesepakatan suatu perdagangan oleh beberapa pihak dengan jumlah yang sangat banyak dalam melaksanakan perjanjian atau kesepakatan tersebut. Adapun yang disebut dengan perjanjian perdagangan, yaitu suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilaksanakan atau diadakan oleh dua negara saja.
2. Bantuan dari pemerintah untuk mendukung penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Pamekasan. Bantuan yang dimaksud yaitu seperti bantuan alat usaha yang diberikan kepada masyarakat di Balai Desa Lembung Kecamatan Galis oleh Bupati Pamekasan yaitu bapak Badrut Tamam. Di mana, bantuan alat usaha tersebut berupa alat goreng untuk usaha, alat perbengkelan, alat pertukangan dan alat produktif lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk usaha-usaha masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

   Selain itu, pemerintah Kabupaten Pamekasan juga membentuk toko swalayan Wamiramart yaitu toko wirausaha milik rakyat yang digunakan dalam memasarkan semua produk hasil karya atau produk dari masyarakat Kabupaten Pamekasan.
3. Pengembangan pasar untuk servis ekosistem. Di mana, servis ekosistem disini merupakan kata lain dari jasa ekosistem yang

mencakup barang ataupun jasa yang dapat memberikan manfaat atau keuntungan untuk manusia. Maka dari itu, pengembangan pasar menjadi suatu implementasi dari ekonomi hijau di suatu wilayah khususnya di wilayah Kabupaten Pamekasan yang ditujukan untuk jasa ekosistem atau servis ekosistem.

4. Pengembangan dan transfer teknologi yang ramah lingkungan. Pengembangan teknologi yang dimaksud yaitu di mana teknologi saat ini sedang pesat-pesatnya pengguna yang menggunakannya. Maka dari itu, kita bisa mengembangkan teknologi pada ekonomi hijau supaya dalam implementasiannya dapat menghadapi persaingan global. Dan hal ini dapat digunakan dalam transfer teknologi yaitu perpindahan teknologi dari riset ke penerapan. Pada implementasi ekonomi hijau ini teknologi menjadi hal penting untuk memacu perkembangan *green house,* yaitu salah satunya dengan menerapkan teknologi menjadi media ataupun bahan untuk keberlangsungan ekonomi hijau yang ramah lingkungan.
5. Koordinasi pemerintah dalam implementasi paket stimulus *green*. Koordinasi ini sangat penting dalam implementasi ekonomi hijau karena dengan adanya koordinasi pemerintah, ekonomi hijau khususnya di Pamekasan dapat tercapai dan terlaksana dengan baik.

C. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Hijau: Sektor Wisata

Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang di dalamnya terdapat segudang pesona keindahan alamnya serta kekayaan budaya yang menarik minat para wisatawan untuk mengunjunginya. Sektor pariwisata juga termasuk pada sektor yang berpotensi jika kemudian dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pamekasan memiliki banyak sekali spot objek wisata yang indah. Mulai dari situs budaya, situs bersejarah, spot foto kekinian, sampai air terjun yang sangat memanjakan mata pun sudah ada di Pamekasan.[150] Bahkan di desa-desa pun sudah bisa untuk kita menemukan yang

[150] "Pemerintah Kabupaten Pamekasan."

namanya tempat wisata. Namun perlu kita ketahui, masih banyak kegiatan yang dilakukan di sektor pariwisata ini yang cenderung mengeksploitasi sumber daya. Bahkan terkadang, dari pembangunan desa wisata tersebut bertujuan mengejar jumlah wisatawan saja, tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, terdapat sebuah konsep yang dapat diadopsi dalam upaya pembangunan pariwisata berkelanjutan yang mana konsep tersebut didefinisikan dari: "*Tourism that takes full account of its current and future economic, social and environmental impacts, addressing the needs of visitors, the industri, the environment and host communities*", yaitu pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat.

Paparan konsep di atas sejalan dengan yang dimaksud yaitu, konsep pengembangan desa wisata hijau diharapkan dapat menjadi sebuah jawaban atas kepedulian lingkungan yang tujuannya sebagai bentuk kesinambungan pembangunan yang meliputi tiga aspek yang saling berhubungan satu sama lain yakni, aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial dan budaya. Dan berikut merupakan langkah-langkah pengembangan ekonomi hijau dalam sektor pariwisata, yaitu:[151]

1. Mengidentifikasi Potensi dan Pemetaan Daya Tarik Wisata

Tahap ini diharapkan dapat membantu dalam beberapa hal di antaranya:

a. Menetapkan Keputusan Pengembangan

Penetapan ini harus benar-benar dipahami, baik dari segi mengapa memilih atau memutuskan untuk mengembangkan desa wisata hijau, apa faktor pendukungnya, memperhatikan dampak serta beberapa pertimbangan lain yang harus benar-benar terpikirkan secara matang. Yang perlu diperhatikan pula, hal ini merupakan langkah paling awal dari beberapa proses yang akan dilakukan. Dan ini sangat penting

[151] Victoria br. Simanungkalit dkk, "*Buku Panduan Pengembaangan Desa Wisata Hijau*", (Jakarta Selatan: Asisten Deputi Urusan ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementrian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia: 2017), 35-52.

untuk kita perhatikan karena akan mengikat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menyukseskan kegiatan pengembangan desa wisata hijau ini.

b. Mendefinisikan Tujuan Serta Sasarannya

Setelah suatu keputusan serta komitmen telah dibuat, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan tujuan beserta sasarannya. Di antara tujuan dan sasaran tersebut, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Tujuan pengembangan desa wisata hijau:
   a) Melalui sektor wisata diharapkan adanya kemajuan perekonomian di tingkat lokal maupun daerah.
   b) Meningkatkan nilai sumber daya lokal dan daerah melalui sektor pembangunan pariwisata berbasis ekonomi hijau.
   c) Peningkatan produktivitas serta daya saing usaha pariwisata dalam skala UMKM.
   d) Mendorong tercapainya prinsip.
2. Sasaran (dengan ukuran kuantitatif):
   a) Meningkatkan kunjungan wisatawan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan.
   b) Meningkatkan jumlah usaha pariwisata dengan konsep ekonomi hijau.
   c) Meningkatknya pendapatan di desa tersebut, baik bagi desa sendiri ataupun bagi masyarakat.
   d) Meningkatnya kuantitas koperasi usaha yang berkaitan dengan pariwisata.
   e) Meningkatnya kuantitas sanggar serta event budaya lokal.
   f) Minimnya kasus yang dapat merusak lingkungan.

Namun, alangkah baiknya jika dalam merumuskan tujuan dan langkah tersebut dilakukan dengan musyawarah atau dapat dilakukan dengan metode FGD (*Focus Group Discussion*) dengan harapan dapat menampung ide dan gagasan yang menarik serta dapat menggali lebih dalam terkait dengan keinginan dari beberapa pihak yang terlibat (para pemangku kepentingan).

c. Menetapkan Masalah Pokok

Menetapkan masalah pokok merupakan salah satu komponen yang harus dilakukan secara hati-hati dan tentunya memerlukan riset untuk mengetahui masalah pokok yang riil yang terdapat pada masing-masing desa wisata. Selain itu, perlu juga diperhatikan adalah dalam penetapan masalah pokok harus dilakukan dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki saat ini dengan keinginan yang ingin dicapai.

Penetapan masalah pokok juga penting untuk disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang ada. Karena tanpa memperhatikan hal tersebut penyelesaian masalah sulit untuk diwujudkan. Dan seperti halnya merumuskan tujuan dan sasaran, menetapkan masalah pokok juga sebaiknya dilakukan dengan metode FGD agar ditemukan masalah pokok yang konkret sebagaimana data dan fakta di lapangan yang didapatkan dari berbagai pihak yang terlibat.

d. Melakukan *Feasibility Study* (Studi Kelayakan)

Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data atau informasi yang relevan yang berkaitan dengan desa wisata tersebut yang diperoleh dari berbagai sumber, baik dari pihak terkait seperti halnya pelaku usaha pariwisata, perangkat desa, dan lain sebagainya. Juga dapat diperoleh dari jurnal-jurnal, brosur pariwisata, koran, laporan tahunan dan catatan dari operator perjalanan wisata.

Studi kelayakan juga dapat dilakukan dengan memperhatikan dampak yang dilakukan oleh wisatawan, pelaku usaha dan masyarakat (positif atau negatif). Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1) Pengaruh dari kunjungan wisatawan terhadap kehidupan lingkungan dan tata kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
2) Pengaruh pelaku usaha pariwisata bagi lingkungan serta tata kelola ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
3) Pengaruh kegiatan masyarakat terhadap lingkungan sekitar.

Selain hal di atas, yang juga penting untuk diperhatkan adalah mengidentifikasi nilai-nilai alam dan warisan budaya. Hal ini dibutuhkan untuk membedakan produk dan jasa yang ditawarkan dari para pesaing lainnya. Karena setiap bisnis harus mempunyai *unique selling*

proposition (USP) sehingga produk dan jassa yang ditawarkan menjadi hal yang istimewa.

Pesona keindahan alam dan warisan budaya merupakan dua aset kunci menariknya sebuah wisata. Oleh karenanya, penting untuk memahami nilai-nilai yang ada di Desa wisata sebagai proses perencanaan, pengembangan, pengelolaan, pemasaran, dan interpretasi yang efektif. Sehingga dapat dinilai apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah layak atau sesuai dengan budaya atau norma yang berlaku. Dan semua ini dilakukan untuk keberhasilan pengembangan desa wisata hijau jangka panjang.

2. Pembentukan Kelembagaan

Pembentukan kelembagaan merupakan langkah kedua yang diharapkan dapat membantu:

a. Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan

Komponen ini sangatlah penting untuk kita ketahui bersama dalam memudahkan proses pengembangan desa wisata hijau. Beberapa pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan desa wisata hijau sebagaimana terdapat pada gambar di bawah ini.
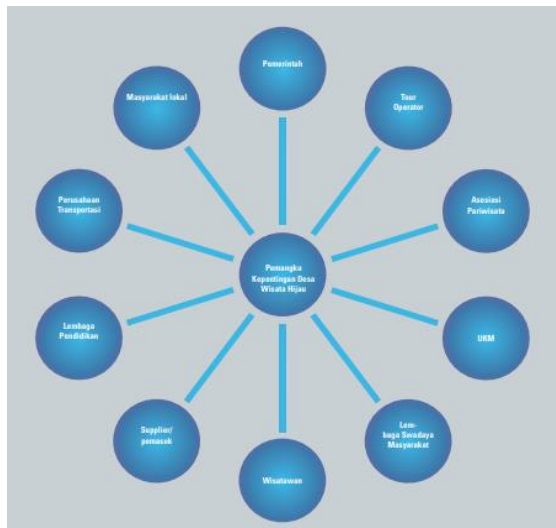
Gambar 7.1 Identifikasi Pemangku Kepentingan Desa Wisata Hijau

Melakukan identifikasi dan melibatkan berbagai pihak terkait secara sistematis dapat membantu:

1) Memastikan orang yang tepat yang terlibat nantinya dalam proses perencanaan dan kegiatan di massa yang akan datang.
2) Membantu menentukan nilai dan makna budaya yang ada pada desa tersebut.
3) Memastikan bahwa semua isu penting telah dipertimbangkan.
4) Berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu memutuskan kegiatan yang sesuai dengan realita yang ada yang jelas kebermanfaatannya.
5) Membantu membangun dukungan bagi rencana pengembangan wilayah, pengelolaan, dan penyiapan proposal (rencana bisnis).

b. Menciptakan Hubungan Kerja yang Efektif

Berikut merupakan beberapa komponen yang mampu membedakan hubungan kerja yang efektif, yaitu:

1) Mengidentifikasi "*driver*" atau "*champion*"
   "*Driver*" atau "*champion*" ini merupakan orang yang pertama kali membuat program yang ingin dimulai lalu menyerahkan tanggung jawab tersebut kepada orang lain sesuai kesepakatan. Oleh karenanya, orang ini biasanya dijadikan sebagai koordinator.
   Karena setiap program kegiatan membutuhkan sosok koordinator untuk mengoordinasi jalannya program, mengumpulkan dukungan dan menjaddi titik pusat kegiatan tersebut, maka orang ini harus dapat diidentifikasi.
2) Membentuk pengelola desa wisata hijau (forum komunitas).
3) Mengidentifikassi kemitraan yang dianggap penting.

c. Membentuk Pengelola Desa Wisata Hijau (Komunitas)

Sebuah komunitas sangat diperlukan yang kemudian bertindak sebagai pengelola desa wisata hijau yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Komunitas tersebut kemudian dapaat membuat sebuah model pengelolaan yang disesuaikan dengan kondisi riil daerah masing-masing.

Salah satu model yang dapat adopsi adalah model tata kelola destinasi pariwisata (*Destination Management Organization*/DMO). DMO merupakan tata kelola destinasi pariwisata yang terstruktur dan sinergis yang mencakup beberapa fungsi yaitu, fungsi koordinasi, perencanaan, implementasi, dan pengendalian organisasi destinasi secara inovatif dan sistematis. DMO dilakukan melalui pemanfaatan jejaring, informasi dan teknologi, yang dipimpin secara terpadu dengan peran serta masyarakat, pelaku/asosiasi, industri, akademisi dan pemerintah. Model pengelolaan yang telah disedernakan sebagaimana gambar berikut:
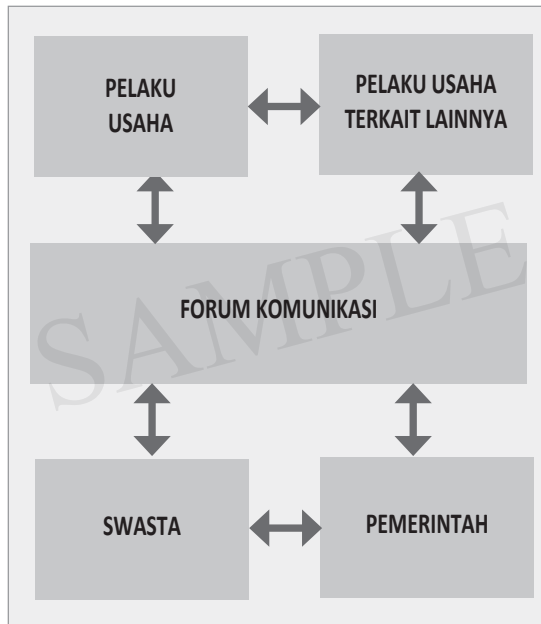
Gambar 7.2 Model Pengelolaaan Desa Wisata Hijau

Keterangan:

1) Bersama pihak swasta, forum dapat mendorong pengembangan kemitraan usaha dalam bentuk pemanfaatan dana CSR dengan melibatkan masyarakat dalam proses bisnis yang ada.
2) Bersama pemerintah, forum dapat menyusun rencana kerja terkait tugas dan fungsi K/L dan SKPD. Rencana kerja tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur, pelatihan, maupun promosi.

3) Bersama pelaku usaha pariwisata (hotel, pondok wisata, rumah makan, pemandu wisata, dan lainnya), forum membicarakan arah terwujudnya ekonomi hijau.
4) Bersama pelaku usaha lainnya forum kemudian memperkuat nilai kebermanfaatan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam operasionalisasinya, Forum dapat melakukan manajemen wisata yang bekerja sama dengan para pemangku kepentingan sebagaimana gambar berikut:

ELEMEN DESTINASI PARIWISATA

FORUM KOMUNIKASI

PEMASARAN

PRODUK

PENGATURAN LINGKUNGAN
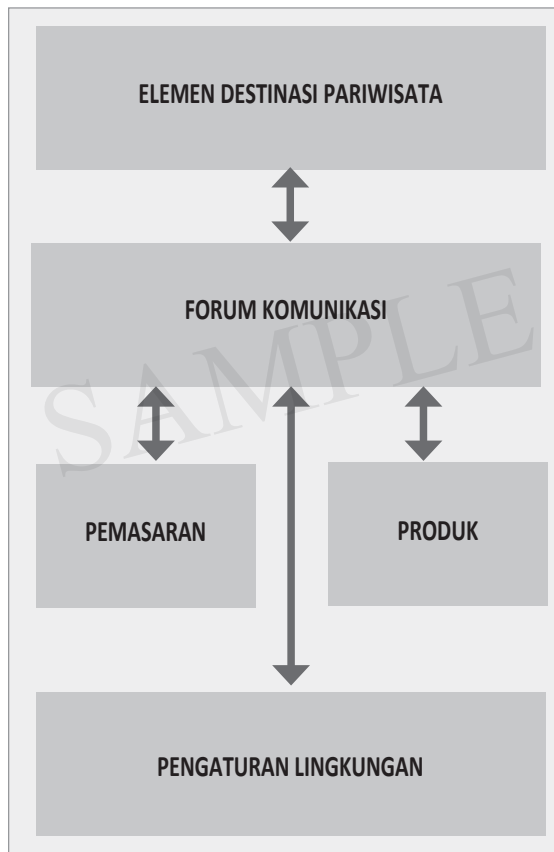
Gambar 7.3 Pola Manajemen Forum

Keterangan:
1) Mengelola dengan baik elemen destinasi pariwisata berupa daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, dan masyarakat.

2) Mengelola produk wisata agar sesuai dengan ekspektasi wisatawan.
3) Mengelola pemasaran agar terjadi kunjungan wisatawan. Pada saat bersamaan juga mengelola lingkungan kondusif terhadap konsep hijau.
4) Menyusun pedoman lapangan termasuk etika mengenai hal yang boleh dan yang dilarang (*code of behaviour*) yang menjadi acuan warga maupun wisatawan.

d. Membentuk Kemitraan

Kemitraan sangatlah dibutuhkan dalam menyukseskan suatu program atau bisnis. Terutama bila terkait dengan barang publik (*public goods*).[152] Oleh karenanya dalam pengembangan desa wisata ini, dibutuhkan adanya kemitraan untuk membantu memenuhi sumber daya yang tidak dapat dipenuhi oleh satu organisasi saja. Berikut merupakan langkah atau tahapan untuk membangun sebuah kemitraan, yaitu:

1. Mengidentifikasi kemitraan kunci yang dapat membantu mencapai tujuan.
2. Mengidentifikasi para pihak yang harus dilibatkan.
3. Membentuk kemitraan.
4. Saling pengertian akan isu-isu yang dihadapi termasuk yang terkait dengan alam dan warisan budaya.
5. Menyiapkan dengan saksama tujuan desa wisata hijau.
6. Memiliki komitmen terhadap kemitraan tersebut dan melaksanakan aksi-aksi yang telah disetujui.

Oleh karena itu, sangatlah perlu membangun sebuah tim pengelola desa wisata hijau serta membentuk kemitraan yang baik yang relevan dengan tujuan yang diharapakan. Berikut terdapat pula poin-poin yang dapat membantu dalam pembentukan tim pengelola desa wisata hijau:

1) Membuat keputusan tentang peran dari tim/kelompok kerja, seberapa sering bertemu dan apa yang diharapkan dari setiap anggota.

[152] "Membangun Jaringan Kemitraan," diakses 21 April 2022, http://distan.jabarprov.go.id/distan/uploads/files_download/MEMBANGUN_JARINGAN_KEMITRAAN.pdf.

2) Menginformasikan adanya tim atau komunitas ini pada pihak-pihak terkait tentu disertai tujuannya.
3) Menentukan seorang ketua/koordinator atau jika tidak, maka dapat dilakukan ssecara bergantian oleh para anggota.
4) Memastikan setiap orang mengutarakan apa yang diinginkannya, serta membuat jadwal pertemuan yang jelas.

3. Perencanaan dan Pengembangan Produk wisata

Langkah ketiga ini dapat membantu:

a. Menganalisis Isu-isu yang Diperlukan untuk Perencanaan dan Pengembangan

Isu-isu yang telah dikumpulkan, selanjutnya perlu dilakukan klarifikasi yang kemudian harus benar-benar dipahami agar dapat diambil keputusan yang tepat. Berikut beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan identifikasi isu.

1. Pengalaman berkunjung wisatawan.
2. Anggapan masyarakat lokal akan adanya wisata hijau.
3. Pengelolaan dan dampak lingkungan dan warisan budaya.
4. Kondisi infrastruktur.

b. Menyusun Rekomendasi dan Strategi Pelaksanaan

Menyusun konsep pelaksanakan perlu adanya penjelasan rinci sebagai berikut:

1. “Apa”: apa saja kegiatan yang dapat memecahkan masalah yang dihadapi.
2. “Bagaimana”: menyangkut penjelasan bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Contoh: kegiatan ini bekerja sama dengaan pihak A.
3. “Siapa”: menjelaskan siapa saja pihak yang bertanggung jawab serta “siapa” ini dapat menjelaskan besaran anggaran yang diperlukan.
4. “Kapan”: menjelaskan waktu pelaksanaan. Dan hal ini juga berdampak pada konsistensi pembangunan tahap-tahap selanjutnya.

c. Melibatkan Perempuan dalam Rangka Mendukung Keberhasilan Desa Wisata Hijau

Seperti yang kita ketahui bersama, peran perempuan dalam dunia kerja lebih sedikit daripada kaum laki-laki. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya pengalaman maupun pengetahuan, pemikiran bias gender, dan lain semacamnya. Namun, akan lebih baik jika perempuan juga ikut dilibatkan dengan tujuan meningkatkan keahlian sehingga dapat lebih menyejahterakan perempuan.

Untuk itu pemberdayaan perempuan perlu untuk ditingkatkan. Hal tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan, edukasi, ataupun penyuluhan di bidang pariwisata.

4. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pada tahap keempat, diharapkan dapat membantu dalam hal pengadaan pelatihan kapasitas sumber daya manusia. Karena dengan kapasitas sumber daya manusia inilah letak kunci keberhasilan dari suatu pencapaian kinerja.[153] Sehingga dapat dikatakan bahwa sumber daya manusia merupakan bagian terpenting dalam pengembangan Desa Wisata Hijau. Baik sebagai kelangsungan pengembangan wisata, penentu kualitas produk atau jasa serta sebagai penentu daya saing wisata.

Dengan demikian, penting untuk diadakan peningkatan kapasitas yang dimiliki oleh sumber daya manusia yang berhubungan dengan keterampilan dan keahlian. Selain itu dukungan-dukungan juga dapat diberikan oleh kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pengembangan desa wisata hijau. Semua itu dilakukan tentu demi terwujudnya pengembangan wisata hijau.

[153] "Kapasitas SDM Merupakan Kunci keberhasilan Pencapaian Kinerja," diakses 21 April 2022, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja/baca-berita/3723/Kapasitas-SDM-Merupakan-Kunci-keberhasilan-Pencapaian-Kinerja.html.

5. Pasar dan Pemasaran

Langkah ini merupakan langkah terakhir dari beberapa langkah yang telah dijelaskan di atas. Dan langkah dari pasar dan pemasaran ini dapat membantu dalam hal:

a. Memahami Konsep Pemasaran

Pada dasarnya pemasaran secara umum orientasinya akan tertuju pada kepuasan konsumen, begitupun dengan pemasaran dalam hal pariwisata. Namun yang perlu kita ketahui adalah pemasaran di masa lampau dengan pemasaran dewasa ini memiliki perbedaan dalam segi konsep. Jika di masa lampau pemasaran hanya berorientasi pada produsen. Dalam artian, produsen akan membuat produk tanpa memikirkan apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh konsumen. Namun yang terjadi pada dewasa ini adalah produsen akan terlebih dahulu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh konsumen barulah melakukan pembuatan produk. Sehingga tujuan untuk memenuhi keinginan konsumen pun akan tercapai.[154]

b. Menyusun Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran adalah cara untuk memenuhi kepuasan konsumen. Dalam strategi pemasaran, perusahaan akan menentukan pasar sasaran dan posisi produk kepada setiap konsumen atau yang biasa dikenal dengan istilah bauran pemasaran (*marketing mix).* Karena yang akan dibahas merupakan suatu industri pariwisata, maka dalam hal ini dapat menggunakan bauran pemasaran 7P (*product, price, promotion, place, people, physical evidence,* dan *process*).[155]

TABEL BAURAN PEMASARAN 7P	
Produk (*Product*)	Adalah segala sesuatu yang ditawarkan oleh industri pariwisata terkait untuk menarik minat wisatawan dan dapat memenuhi kepuasan konsumen atau para wisatawan

[154] Nyoman Sudiarta dan Wayan Suardana, "Usaha Pemasaran Pariwisata (Model Destinasi Wisata) Panduan bagi Pemasar Destinasi Wisata", Universitas Udayana: 2015, hlm. 06.

[155] Agustinawati, Cindenia Puspasari, "Analisis Bauran pemasaran Destinasi pariwisata Kota Lhokseumawe" Jurnal Visioner & Strategis, Vol. 7, No.2, September 2018, 12.

TABEL BAURAN PEMASARAN 7P	
Harga (*Price*)	Merupakan besaran biaya yang dikeluarkan oleh konsumen yang dapat dijangkau untuk dapat memperoleh pelayanan yang diharapkan para wisatawan.
Promosi (*Promotion*)	Merupakan sebuah komunikasi antar pemilik atau pengelola industri pariwisata yang menjelaskan mengenai apa yang ingin ditawarkan jika berkunjung pada wisata tersebut. Tentu hal ini harus dilakukan secara optimal guna menarik minat berkunjung wisatawan juga untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan.
Tempat (*Place*)	Merupakan lokasi atau keberadaan wisata yang mudah dijangkau, aksesnya mudah, bersih dan tentunya dapat memberikan kenyamanan bagi pengunjung.
Orang (*People*)	Merupakan orang terlibat dalam pengelolaan pariwisata. Seperti halnya karyawan yang harus memberikan pelayanan prima bagi seluruh pengunjung sehingga hal tersebut juga dapat memengaruhi minat berkunjung wisatawan.
Bukti Fisik (*Physical Evidence*)	Merupakan fasilitas pendukung yang terdapat pada destinasi wisata tersebut. Seperti halnya kelengkapan fasilitas, keindahan pesona alam dan lain sebagainya.
Proses (Process)	Meliputi seluruh proses pengelolaan pariwisata serta memperhatikan mekanisme yang baik yang digunakan untuk seluruh pelayanan pariwisata.

Sebagaimana langkah yang telah disebutkan di atas diharapkan dapat membantu terealisasikannya pengembangan wisata hijau. Tentu hal ini tidak dapat dilakukan oleh badan sepihak, namun perlu adanya kerja sama dari berbagai pemangku kepentingan sehingga hal sulit akan terasa mudah dan kemustahilan pun akan musnah.

D. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Hijau: Sektor Pertanian

Berkaitan dengan pembahasan di atas, dalam hal ini penulis juga akan menuangkan beberapa ide dan gagasan terkait dengan pengembangan ekonomi hijau pada sektor pertanian. Sebagaimana kita ketahui bersama, Negara Indonesia merupakan negara agraris. Dalam artian, perekonomian memegang peranan penting dalam hal perekonomian Nasional. Mayoritas penduduknya pun berprofesi sebagai petani. Hal tersebut juga didukung oleh keberadaan Indonesia yang strategis jika

dilihat dari sisi geografis. Yaitu terletak di daerah tropis dan memiliki curah hujan yang tinggi, sehingga mendukung banyaknya jenis tanaman yang tumbuh dan tanah yang subur.[156]

Pamekasan merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di Pulau Madura Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas pertanian yang cukup tinggi. Secara keseluruhan total lahan pertanian di Kabupaten Pamekasan mencapai 64.919 Ha atau sekitar 82% dari total administratif Kabupaten Pamekasan. Di mana sebesar 28% dari wilayah pertanian tersebut merupakan lahan sawah yang terdiri atas sawah tadah hujan dengan luas 11.284 Ha dan sawah teknis seluas 7.500 Ha, sedangkan untuk lahan pertanian jagung seluas 6.038 Ha.[157]

Jika dilihat pada pembahasan bab sebelumnya, yang telah menjelaskan kondisi geografis, jenis tanah, iklim, serta potensi pertanian yang ada di Kabupaten Pamekasan sangatlah disayangkan jika tidak dikelola dengan baik. Perlu adanya pengembangan baik dari segi inovasi pengelolaan perawatan, pemasaran, dan lain sebagainnya. Terlebih yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melakukan pengembangan pengelolaan sektor pertanian yang ramah lingkungan. Serta sebagaimana pada tujuan penerapan ekonomi hijau yang dapat mewujudkan pengoptimalan tiga kelompok nilai, yaitu nilai sosial, nilai lingkungan, dan finansial.[158]

Berikut merupakan beberapa langkah dalam melakukan pengembangan ekonomi hijau pada sektor pertanian, yaitu:

1. Edukasi

Edukasi dalam hal ini adalah memberikan pengetahuan akan pentingnya penggunaan pupuk organik dan mengubah penggunaan pestisida berbahan kimia menjadi penanganan hama secara hayati.

---

[156] “Inilah Alasan Mengapa Indonesia Disebut sebagai Negara Agraris - Nasional Katadata.co.id,” diakses 20 April 2022, https://katadata.co.id/safrezi/berita/61658d3d7db87/inilah-alasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-agraris.

[157] Sayyidi Sayyidi dan Fawaid Akh., “Mewujudkan Desa Wisata, Melalui Penataan Kawasan Pertanian Untuk Peningkatan Ekonomi Desa,” *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2 Juni 2021), 18 https://doi.org/10.36636/dialektika.v6i1.574.

[158] Bambang Sayaka, Haryono, dan Effendi Pasandaran, “Ekonomi Hijau Untuk Pemulihan Sumber Daya Alam dan Lingkungan,” t.t., 18.

Berikut dengan akibat atau bahayanya penggunaan pupuk dan pestisida berbahan kimia terutama terhadap kesuburan tanah. Hal ini dapat dilakukan oleh mahasiswa yang sudah menekuni bidangnya yang ditugaskan untuk memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada warga sekitar.

2. Menciptakan Produk berbasis Pertanian

Setelah langkah di atas dilakukan, maka dilanjutkan pada pengimplementasian hasil dari edukasi yang didapat yaitu, menciptakan suatu produk berbasis pertanian. Produk tersebut dalam artian dapat berupa pupuk organik dan pengendali hama yang juga berbahan organik. Tentu hal ini harus diiringi dengan penelitian agar nantinya dapat bekerja secara optimal dan tidak ada keraguan dalam penggunaan produk tersebut.

3. Kelompok Tani Hijau Berkelanjutan

Pengadaan kelompok atau komunitas seperti ini dinilai dapat membantu cepat terealisasinya ekonomi hijau di sektor pertanian serta dapat mudah. Karena kelompok tersebut dapat dijadikan sebagai wahana belajar, kerja sama, dan unit produksi yang dapat diharapkan dapat mencapai skala ekonomi dari segi kualitas, kuantitas, dan kontinuitas.

4. Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan

Dalam sektor pertanian, pemangku kepentingan dibagi menjadi dua, yaitu:[159]

a. Secara organisasi
   Secara organisasi dapat dikategorikan lebih luas yang terdiri dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan komunitas terkait.
b. Secara perorangan atau kelompok
   Pada bagian ini terdiri dari, aparat pemerintah (lingkup lokal dan

[159] Muhammad Iqbal, "Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian," 2007, 11.key stakeholders who significantly influence or have a central position towards its activities relatively dominated implementations of agricultural development programs. Meanwhile, the role of other stakeholders who are positively affected (beneficiaries 90).

nasional), petani, pedagang (sarana produksi dan hasil pertanian), penyedia jasa (transportasi, dan lainnya).

Dari berbagai pemangku kepentingan tersebut haruslah terdapat persamaan persepsi, memiliki komitmen, dan sinergi yang baik dalam menunjang pelaksanaan pengembangan ekonomi hijau di sektor pertanian tersebut.

5. Memahami Strategi Pemasaran

Pemasaran bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen dan hal tersebut juga berkaitan dengan pemenuhan kepuasan konsumen. Dan sangat penting bagi pelaku industri barang atau jasa untuk memperhatikan bauran pemasaran (*marketing mix*) dalam kegiatan pemasaran tersebut.

Sebagaimana disebutkan mengenai bauran pemasaran, maka dalam pembahasan ini menggunakan bauran pemasaran 4 P (*product, place, people,* dan *promotion*).

TABEL BAURAN PEMASARAN 7P	
Produk (*Product*)	Merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dalam bercocok tanam yang dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan. Tentu hal ini perlu adanya keunggulan ataupun keunikan dalam produk sehingga dapat lebih menarik minat para pelanggan lebih-lebih pelanggan merasa terpuaskan.
Harga (*Price*)	Merupakan strategi penetapan harga oleh para petani yang dipatok kepada pelanggan atau bisa disebut juga besaran biaya yang dikeluarkan oleh konsumen yang dapat dijangkau untuk dapat memperoleh pelayanan yang diharapkan.
Promosi (*Promotion*)	Merupakan sebuah komunikasi antar pemilik hasil tani dengan konsumen. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait produk/hasil bercocok tanam kepada pelanggan/ konsumen. Sehingga dalam hal ini juga diperlukan pengetahuan media komunikasi seperti halnya sosial media yang juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan promosi.
Tempat (*Place*)	Strategi pemilihan lokasi berkaitan untuk menjaring para pelanggan serta kemudahan dalam mengakses segala kegiatan pertanian. Untuk itu perlu adanya akses lokasi yang mudah terutama di bagian pelosok desa.

Sebagaimana langkah-langkah di atas, maka diharapkan mampu membantu merealisasikan pengembangan ekonomi hijau di Pamekas-

an. Selain itu, unntuk menyukseskan program pemerintah *Go Organic* seharusnya petani dapat memanfaatkan bantuan pemerintah tersebut untuk keperluan usaha tani, perlunya penambahan pengetahuan petani/PPL melalui pelatihan pertanian organik dan juga dibutuhkan dukungan Pemerintah untuk terus-menerus mensosialisasikan pertanian organik.

Seperti halnya yang perlu dimanfaatkan oleh petani adalah adanya Pendirian Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur merupakan wujud pembelaan pemerintah kabupaten (pemkab) setempat terhadap para petani tembakau.[160] Oleh karenanya perlu ada sinergi dan komitmen dari para pihak terkait untuk memudahkan terealisasinya program pengembangan ekonomi hijau pertanian ini. Sehingga terdapat keseimbangan antara potensi alam yang indah nan melimpah dengan pengelolaan yang baik dan benar.

E. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Hijau: Sektor Investasi

Investasi merupakan suatu bentuk penanaman aset atau dana perusahaan maupun individu untuk jangka waktu tertentu untuk mencapai pengembalian yang lebih tinggi (*profit*) di masa depan (*future*). Penanaman modal tersebut dapat dilakukan pada aset real seperti halnya emas, properti. Ataupun pada aset financial seperti halnya berbentuk surat berharga (saham, obligasi, dan sebaginya).[161]

Adapun yang disebut dengan investasi hijau (*green investment*) merupakan suatu kegiatan berupa penanaman modal yang ramah terhadap lingkungan serta berfokus pada investasi yang berkomitmen dalam pelestarian atau perlindungan lingkungan. Untuk mencapai hal tersebut tentu butuh yang namanya manajemen yang baik, sinergi antar berbagai pihak serta komitmen dalam merealisasikannya. Untuk itu pada subtema kali ini akan membahas terkait langkah-langkah pengembangan ekonomi hijau pada sektor investasi. Di antara langkah-

---

[160] "Pemerintah Kabupaten Pamekasan," diakses 20 April 2022, https://pamekasankab.go.id/berita/616/kiht-solusi-tingkatkan-harga-dan-daya-serap-tembakau-petani.

[161] Eduardus Tandelilin, *Manajemen Investasi*, t.t.

langkahnya adalah sebagai berikut:[162]

1. Sinergi dengan kebijakan maupun program pembangunan lingkungan, khususnya program pengurangan emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan, transportasi, industri, energi, dan limbah serta segala program pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati.
2. Lebih memprioritaskan sektor-sektor teknologi yang ramah lingkungan dan pemanfaatan pada sumber energi baru yang terbarukan dan potensial.
3. Mendukung perdagangan karbon serta memberikan fasilitas yang baik yang dibutuhkan oleh pelaku investasi seperti halnya insentif penanaman modal, maupun kemudahan dalam segala rangkaian kegiatan investasi.
4. Meningkatkan kegiatan atau proses produksi yang ramah lingkungan serta lebih memanfaatkan penggunaan teknologi.
5. Mengembangkan wilayah yang memiliki kemampuan dan memperhatikan pelestarian lingkungan.

F. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Hijau: Sektor Halal Industri

Pengertian halal industri dalam KBBI terdiri dari dua kata, yakni halal yang memiliki makna diizinkan (tidak dilarang oleh syara')[163] dan industri yang memiliki makna kegiatan memperoleh atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, seperti halnya mesin.[164] Sehingga dapat dikatakan bahwa halal industri merupakan suatu kegiatan mengolah barang dengan menggunakan sarana atau peralatan yang dalam kegiatan tersebut tidak melanggar syariat islam.

Penerapan ekonomi hijau dalam sektor industri tentunya harus memperhatikan beberapa hal yang sangat berpengaruh dalam setiap elemen ataupun dalam setiap penerapan yang tersirat serta perlu di-

[162] Hanung Harimba Rachman, "Arah dan Kebijakan Green Investment," Januari 2018, 40. 9.

[163] "Arti kata halal - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 20 April 2022, https://kbbi.web.id/halal.

[164] "Arti kata industri - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 20 April 2022, https://kbbi.web.id/industri.

persiapkan beberapa Langkah untuk tercapainya industri hijau yang berkelanjutan. Berikut merupakan langkah-langkah pengembangan ekonomi hijau pada sektor industri, yaitu:[165]

1. Industrialisasi Produk Halal

Industrialisasi produk halal ini, terdiri dari beberapa bagian, yaitu:

a. Kawasan Industri halal

Kawasan industri halal ini harus diiringi dengan adanya potensi yang ada serta pengelolaan yang baik untuk mendukung keberlangsungan kawasan industi halal. Dalam upaya pembangunan ini juga perlu akan dukungan dari berbagai pihak seperti halnya tim manajemen halal, sistem manajemen halal, laboratoratium halal, lembaga pemeriksa halal dan instalasi pengolahan air baku tersertifikasi halal. Selain daripada itu perlu adanya dukungan berupa fiskal dan pembiayaan. Dari komponen-komponen itulah diharapkan mampu menciptakan kawasan industri halal yang ramah lingkungan.[166]

b. Peningkatan kompetensi SDM pekerja industri

Kegiatan ini bertujuan untuk mengasah kemampuan atau keterampilan dari masing-masing pekerja industri. Dan hal ini relatif mudah dan lebih tampak jika dikembangkan melalui program pelatihan.[167]

c. Klasterisasi produk halal

Klasterisasi produk halal ini merupakan pengelompokan produk halal yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tujuan efisiensi dari masing-masing produk halal.

[165] Afdhal Aliasar, *Strategi Pengembangan Industri Halal Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Perekonomian Global* (KNKS, t.t.). 12-18.

[166] "Kemenperin: Kemenperin Serius Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal," diakses 20 April 2022, https://kemenperin.go.id/artikel/22962/Kemenperin-Serius-Akselerasi-Pembangunan-Kawasan-Industri-Halal.

[167] Suryana dan Rofi Rofaida, "Strategi Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Pada Industri Kreatif Berbasis Bahan Baku Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Industri (Kajian Pada Industri Kerajinan di Kabupaten Bandung)," t.t., 9.

2. Riset Halal yang Mendukung Berkembangnya Industri

Riset ini berisikan konsep pengembangan bahan-bahan pengganti non-halal serta peningkatan *halal awarness* bagi msyarakat. Hal ini juga dapat didukung dengan melakukan *laboratory service* (*halal test, academic research, industrial sampling*).

3. Dukungan Regulasi dan Kebijakan

Dukungan regulasi dan kebijakan ini dapat dilakukan dengan:

a. Penguatan lembaga untuk pengembangan industri halal.
b. Standar biaya sertifikasi halal UMKM, industri menengah dan besar.
c. Penguatan komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), SNI halal, badan standardisasi nasional.
d. Melakukan revisi undang-undang perindustrian, salah satunya adalah mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengembangan industri hijau.

Pada dasarnya pembangunan industri halal berbasis ekonomi hijau adalah dengan cara memelihara keseimbangan ekosistem, sumber daya yang berkelanjutan, menghindari eksploitasi sumber daya alam dan mempertahankan fungsi pelestarian lingkungan.

G. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Hijau Sektor Perumahan

Perumahan merupakan suatu kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan. Perumahan ini juga berkaitan erat dengan hal-hal yang berhubungan dengan masyarakatnya. Sehingga dapat dikatakan perumahan akan sedikit mencerminkan karakteristik dari masyarakat yang berada di perumahan tersebut.

Namun yang terjadi saat ini sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa banyak lahan yang telah berubah sebagai perumahan. Hal ini tentu perlu dipikirkan oleh pemerintah secara inklusif tentang tata kelola ruang, agar tidak terjadi kesenjangan dan ketimpangan antarmasyarakat. Yang awalnya lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan non-pertanian harus dipikirkan ulang, karena lahan

pertanian khususnya sawah sangat berperan penting dalam penyediaan kebutuhan sandang, pangan, dan papan pada masyarakat, sekaligus pengatur dalam penyerapan air dan penyerapan karbon di udara. Dan pembahasan ini tentu mengarah pada penerapan ekonomi hijau.

Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah khusus yang kemudian dapat menjadi upaya dalam menyokong adanya perumahan, namun tetap memperhatikan pada keasrian lingkungan sekitar. Dan berikut akan dipaparkan beberapa langkah dari pengembangan ekonomi hijau pada sektor perumahan, yaitu:[168]

1. Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan ini dilakukan untuk mengilustrasikan rencana penerapan ekonomi hijau melalui strategi pertumbuhan rendah emisi ataupun tahan iklim yang bertujuan untuk mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan yang salah satunya dalam sektor perumahan.

2. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi sumber daya dapat diartikan sebagai upaya untuk meminimalisasi penggunaan sumber daya alam yang tersedia ataupun seperti halnya memproduksi suatu hal lebih banyak dengan sumber daya alam yang lebih sedikit dengan tujuan keberlangsungan berkelanjutan serta meminimalisasi dampak terhadap lingkungan serta dapat meningkatkan lapangan kerja yang tentunya melalui inovasi teknologi, namun tetap memperhatikan penggunaan manufaktur yang dapat menunjang terealisasinya ekonomi hijau pada sektor perumahan.

3. Kebijakan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan

Kebijakan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan yang melengkapi dalam bentuk fisik sehingga diharapkan

[168] "Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia," diakses 21 April 2022, https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial.

dapat mendukung keberlangsungan perumahan yang nyaman, sehat dan terjangkau. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Pasal 15 No. 1 Tahun 2011 tentang Tugas Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjalankan Fungsi Pembinaan, yaitu dalam bentuk melaksanakan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman.[169]

H. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Hijau: Sektor Maritim

Sebagaimana Negara Indonesia yang menjadi negara kepulauan terbesar di dunia, perhatian terhadap sektor maritim sangatlah penting untuk diperhatikan. Sektor maritim merupakan seluruh komponen kegiatan dalam bisnis perikanan yang hubungannya adalah dengan sistem pengelolaan seperti dari sebelum produksi (perencanaan), proses produksi (pengolahan) sampai dengan pemasaran. Hal ini juga sebagai bentuk dari pemanfaatan sumber daya ikan serta bagaimana menjaga lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan di antara ruang yang memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan wilayah adalah wilayah pesisir dan laut yang memiliki sumber daya alam yang beragam, serta memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk berbagai kegiatan ekonomi seperti transportasi, pelabuhan, industri, permukiman, dan pariwisata.

Salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura yang memiliki potensi di sektor pertanian adalah Kabupaten Pamekasan sebagaimana Pamekasan telah menyumbangkan 21% dari total volume produksi perikanan di wilayah Madura. Dan pada pembahasan kali ini adalah berfokus pada pengembangan sektor maritim yang berbasis ekonomi hijau. Sehingga selain diharapkan dapat meningkatkan perekonomian juga dapat tetap menjaga kelestarian lingkungan sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

[169] Dandy Himawan Sutanto, "View of Kebijakan dan Implementasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Pamekasan," *Syntax Literate* 6, no. 2 (Desember 2021). 1494.

Untuk itu, berikut merupakan langkah-langkah dari pengembangan ekonomi hijau pada sektor maritim, yaitu melalui beberapa kebijakan di antaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengelolaan ini bertujuan untuk menjadikan sumber daya, dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan termasuk kelestarian keanekaragaman hayati laut. Dan tentu hal ini juga berkesinambungan dengan pengembangan sumber daya manusia yang akan mendukung terciptanya sektor maritim yang unggul, profesional, beretika, dan berdedikasi tinggi. Namun untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya pelatihan atau edukasi untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang kelautan, yang didukung dengan pengetahuan teknologi maupun riset.[170]

2. Prinsip Partisipasi

Dalam penerapan suatu hal tentunya sangat dibutuhkan prinsip yang jelas untuk mencapai hasil yang maksimal, sehingga adanya sebuah prinsip partisipasi dalam penerapan ekonomi hijau pada sektor maritim sangat diperlukan dengan berbagai acuan yaitu sebagai berikut:

a. Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) diharapkan mempunyai peran dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan peran masing-masing.
b. *Update* terhadap segala informasi serta kebijakan pemerintah dalam memudahkan mengambil keputusan serta ikut serta menjadi aktor dalam mengidentifikasi adanya ancaman maupun peluang.
c. Menggandeng para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan untuk mengidentifikasi adanya ancaman bahkan peluang.
d. Adil dalam hal pemanfaatan sumber daya.

[170] Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indoonesia, "*Kebijakan Kelautan Indonesia*", t.t. 53.

3. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan ini diharapkan dapat terealisasikan dengan tujuan dapat terus dikembangkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan generasi masa kini hingga masa yang akan datang. Juga dalam pengelolaannya terintegrasi dan transparan melalui beberapa cara berikut:

a. Pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati (*renewable*) atau laju inovasi substitusi sumber daya nonhayati (*nonrenewable*), serta pemanfaatan sumber daya nonhayati tidak menghancurkan kelestarian sumber daya hayati.
b. Tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) dalam pemanfaatan sumber daya saat ini, yang menjadi kebutuhan generasi yang akan datang.
c. Menyertakan penelitian ilmiah yang tepercaya yang diiringi ke hati-hatian dalam memanfaatkan sumber daya alam yang masih belum jelas dampaknya bagi lingkungan masyarakat.

4. Kesetaraan dan Pemerataan

Kesetaraan serta pemerataan ini dilakukan agar dapat menjadi solusi dari adanya ketimpangan ekonomi. Karena ketimpangan ekonomi rakyat tidaklah makmur, justru akan mengancam pada kehidupan di masa mendatang serta perekonomian pun sulit untuk bisa terus berlanjut dengan aman dan nyaman.

5. Ekonomi Biru

Sebagaimana pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan mengatur bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengelolaan kelautan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat melalui pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya kelautan dengan prinsip ekonomi biru (*blue economy*). Ekonomi biru merupakan integral dari ekonomi hijau. Bedanya, jika ekonomi hijau lebih terfokuskan pada kelestarian lingkungan dan ekosistem, ekonomi biru lebih pada pembangunan ekonomi, baik darat maupun laut dengan memperhatikan sumber daya yang ada serta memperhatikan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, ekonomi

biru lebih fokus kepada sumber daya perairan, penciptaan lapangan kerja, dan lebih peduli pada pengentasan kemiskinan.

Salah satu gerakan ekonomi hijau yaitu rehabilitasi mangrove. Sebagaimana di Pamekasan, rehabilitasi mangrove perlu dilaksanakan secara maksimal karena potensi mangrove di Pamekasan relatif berlimpah didukung karakteristik wilayah kepulauan sehingga dapat menggenapi pengembangan ekonomi pesisir yang bersumber dari produksi perikanan tangkap dan potensi kelautan lainnya.[171] Dari sinilah kemudian bisa dikolaborasikan antara ekonomi hijau dan ekonomi biru sama-sama berjalan demi terciptanya kemajuan perekonomian.

6. Sedekah Sampah

Sedekah sampah ini adalah suatu program yang sangat memotivasi bagi masyarakat, karena sampah bukanlah lagi hal yang tak berguna, namun dengan adanya program sedekah sampah ini, masyarakat yang memiliki sampah di rumah seperti halnya botol bekas, kardus bekas, kertas bekas, kaleng bekas ataupun lainnya ternyata dapat menjadi ladang pahala dengan cara disedekahkan.

Konsep dari sedekah sampah ini adalah dengan menghubungi petugas kebersihan yang memang ditugaskan dalam program ini, kemudian si petugas kebersihan akan menyerahkan sampah untuk kemudian dijual. Selanjutnya, hasil penjualan itu diserahkan kepada Baznass sebagai bentuk program sedekah sampah. Program sedekah sampah ini penting untuk dikelola dengan lebih baik, termasuk juga pada pengolahannya.

I. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Hijau: Sektor Pertambangan

Pertambangan merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan di atas permukaan bumi (tambang terbuka) ataupun di bawah tanah (tambang dalam) termasuk di dalamnya penggalian, pengerukan, dan penyedotan dengan tujuan pengambilan benda padat, cair ataupun gas. Hasil dari pertambangan tersebut dapat berupa besi, pasir, minyak, gas bumi,

[171] *Ibid.*, 45-47.

emas, perak, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai kebutuhan manusia di muka bumi.[172]

Namun, dampak terhadap lingkungan juga perlu diperhatikan dalam melakukan pertambangan. Karena dapat berisiko meningkatkan ancaman tanah longsor, erosi, sedimentasi, dan lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya ataupun suatu langkah pengelolaan maupun pengembangan yang dapat mengurangi risiko-risiko tersebut sehingga lingkungan pun tetap lestari salah satunya dengan menggunakan konsep ekonomi hijau.

Berikut merupakan langkah-langkah pengembangan ekonomi hijau dalam sektor pertambangan, yaitu:

1. Melakukan efisiensi pemakaian sumber daya.
   Pemakaian sumber daya yang dimaksud seperi halnya air dan energi, perlindungan terhadap keragaman hayati, dan pengolahan limbah yang tepat dari hasil pengolahan atau pemurnian.
2. Menyusun studi kelayakan lingkungan.
   Studi kelayakan lingkungan ini dilakukan untuk mengurangi dampak yang akan terjadi setelah melakukan pertambangan.
3. Melakukan penilaian risiko dan manajemen risiko lingkungan hidup.
   Dalam tahap ini dapat pula dilakukan penggalian tanah secara berjenjang (trap-trap) jika dinilai akan terancam terjadinya longsor.[173]
4. Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dengan reklamasi.
   Reklamasi ini adalah suatu hal yang dilakukan di setiap tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan ekosistem agar dapat berfungsi secara normal kembali. Upaya reklamasi dapat berupa melakukan reboisasi di area-area bekas pertambangan. Prinsip perlindungan juga sangat dibutuhkan mengingat maraknya tambang ilegal yang terjadi. Sehingga perlu kiranya regulasi ketat dalam hal ini.

[172] "Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan," diakses 20 April 2022, https://pamekasankab.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=21&Istilah_sort=deskripsi_ind.desc.

[173] "Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan.pdf," diakses 20 April 2022, https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Pertambangan.pdf.

J. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Hijau: Sektor Perternakan

Pengertian peternakan sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa peternakan ini bukan sekadar kegiatan mengembangbiakkan atau membudidayakan saja dengan masing-masing manfaat yang diperoleh, namun juga perlu adanya manjemen pengelolaan produksi yang baik sehingga hasil pun didapatkan secara optimal.

Berbicara peternakan, Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai salah satu daerah penghasil ternak di Madura. Namun, ada beberapa faktor yang menyebabkan persebaran kawasan peternakan tidak merata, di antaranya seperti faktor geografis wilayah, faktor sosial serta faktor ekonomi. Faktor geografis wilayah memiliki peranan penting dalam persebaran kawasan ternak. Faktor inilah yang kemudian memengaruhi ketersediaan pakan juga kebutuhan ruang dalam pengembangan usaha peternakan.

Berikut adalah langkah-langkah dari pengembangan ekonomi hijau pada sektor peternakan, yaitu:

1. Penyediaan dan pengembangan teknologi pakan dan lahan pakan. Sebagaimana diketahui bahwa pakan ternak berperan penting dalam keberhasilan peternakan. Kontribusi pakan ternak sebesar 70% dari biaya produksi peternakan. Oleh karena perlu adanya kebijakan untuk melindungi pakan ternak seperti halnya pemerintah memberikan fasilitas kerja sama pemanfaatan lahan mengingat lahan pakan kali ini semakin berkurang.[174]
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
   Kegiatan ini dapat dilakukan dengan membentuk sekolah lapangan bagi para peternak serta penyediaan informasi serta layanan yang mudah untuk diakses sehingga permasalahan yang dialami para peternak dapat disampaikan yang kemudian dilakukan bimbingan Sehingga hal ini diharapkan terpenuhinya jumlah serta kompetensi tenaga penyuluh.

[174] "Strategi Pengembangan Ternak Sapi Potong dalam Mendukung Pembangunan Daerah - Kabupaten Bogor," diakses 21 April 2022, https://bogorkab.go.id/post/detail/strategi-pengembangan-ternak-sapi-potong-dalam-mendukung-pembangunan-daerah.

3. Perbaikan intensitas dan frekuensi pelatihan.
   Langkah ini dapat dilakukan seperti halnya meningkatkan hijauan sesuai dengan jumlah populasi dari ternak. Swasembada daging ternak akan tercapai dan dapat bertahan, apabila populasi dan mutu dari ternak potong berkembang lebih cepat, minimalnya sama dengan meningkatnya jumlah kebutuhan.
4. Pengawasan sekaligus pengendalian pemotongan ternak betina produktif serta pengembangan rumah potong hewan.
   Pengendalian pemotongan ternak betina ini guna menjaga keberlangsungan sumber daya ternak. Sehingga kebijakan yang dapat dilakukan adalah penundaan potong. Dalam artian, ternak betina dijual yang kemudian dibeli oleh pihak lain untuk kemudian diproduktifkan kembali.
5. Pengembangan pupuk organik dan bio Gas
   Hal ini menjadi upaya pemerintah untuk pengembangan energi terbarukan. Sebagaimana merupakan salah satu program pemerintah yang menghemat bahan bakar minyak (BBM). Limbah dari peternak sapi juga dapat dimanfaatkan sebagai biogas dan pupuk organik (pupuk Kompos). Sehingga para peternak sapi bukan hanya menerima hasil dari susu, daging serta anak sapi saja. Dan hal ini juga diharapkan dapat membantu dalam peningkatan kebersihan lingkungan dengan pemanfaatan limbah menjadi suatu yang bermanfaat.[175]

[175] *Ibid*.

Daftar Pustaka

Agus Purnomo. *Islam Madura Era Reformasi Konstruksi Sosial Elite Politik, Tentang Perda Syariat*. Ponorogo: Stain Po Press, 2014.

Agus Sulaiman Bolkiah, Muh. Ilham, dan Etin Indrayani. “EVALUASI PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DINAS PERIKANAN KABUPATEN PAMEKASAN PROVINSI JAWA TIMUR.” *VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia* 13, no. 2 (5 Agustus 2021): 363–74. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.439.

Ahmad Muhaimin, Buyung Candra Pamungkas, Dewi Rizky Rosafiana Putri, Hari Supriono, dan Mohammad Ilham Nur Rohman. *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka*. Pamekasan: BPS kabupaten Pamekasan, 2022.

Ahmad Sarwat. *MAQASHID SYARIAH*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Aliasar, Afdhal. *Strategi Pengembangan Industri Halal Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Perekonomian Global*. KNKS, t.t.

Ambang Suhada dan Dharma Setyawan. “Narasi Islam dan Green Economics dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam.” *Kontekstualita* 31, No.1 (2016): 22–28.

Anriques, G. Rural. “Development and Poverty Reduction: is Agriculture Still the Key?” *Agricultural Development Economics* 4, No.1 (2017): 46.

Arief, Sjamsul. "ANALISIS PERTUMBUHAN EKONOMI DAN PENETAPAN SEKTOR UNGULAN DENGAN MENGGUNAKAN LOCATION QUOTIENT, SHIFT SHARE DAN KLASSEN TYPOLOGY DI MADURA" 6 (2021): 22.

"Arti kata halal—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 20 April 2022. https://kbbi.web.id/halal.

"Arti kata industri—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 20 April 2022. https://kbbi.web.id/industri.

Atok Miftachul Hudha, Husamah, dan Abdulkadir Rahardjanto. *Etika Lingkungan (Teori dan Praktik Pembelajarannya)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

"Badan Pusat Statistik." Diakses 19 April 2022. https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html.

Badan Pusat Statistik. "Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan." Pamekasan, 2015.

————. "Jumlah penduduk menurut Kecamatan dan Kewarganegaraan di Kabupaten Pamekasan." Pamekasan, 2017.

————. "Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Sayuran di Kabupaten Pamekasan (Ha)." Pamekasan, 2015.

"Badan Pusat statistik Indonesia." Https://www.bps.go.id/subject/10/pertambangan.html, 2022.

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan." Diakses 19 April 2022. https://pamekasankab.bps.go.id/publication/2022/02/25/0bf7afe45145290d21de0727/kabupaten-pamekasan-dalam-angka-2022.html.

"Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan." Diakses 20 April 2022. https://pamekasankab.bps.go.id/istilah/index.html?Istilah_page=21&Istilah_sort=deskripsi_ind.desc.

Danhas, Yunhendri, dan Bustari Muchtar. *Ekonomi Lingkungan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pamekasan (Diskominfo Pamekasan). "Begini Konsep Desa Tematik, Pemkab Pamekasan Siap Support Kebutuhan Desa," 7 Maret 2022. http://kominfo.pamekasankab.go.id/berita/224.

Effendi Pasandaran, Bambang Sayaka. "Ekonomi Hijau Untuk Pemulihan Sumber Daya Alam dan Lingkungan." Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Bogor, 2007.

"Ekonomi Hijau dan Pembangunan Rendah Karbon Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial —Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia." Diakses 21 April 2022. https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial.

ESCAP. *Kebijakan sosial ekonomi inovatif untuk meningkatkan kinerja lingkungan: Imbal jasa lingkungan*. Bangkok: PBB, 2009.

Farahdila Kutsiyah. "Performa Desa yang Diusulkan untuk Penerapan One Village One Product (OVOP) di Kabupaten Pamekasan." *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4, No.1 (1 Juni 2017): 25–40.

"GERAKAN-GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN DI MADURA PADA TAHUN 1857-1945 - Institutional Repository." Diakses 19 April 2022. https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/38749/.

Global Green Growth Institute. *Mewujudkan Perumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera*. Jakarta, 2015.

———. *Pertumbuhan Ekonomi Hijau dan Perencanaan Investasi*. Jakarta, 2016.

Global Green Growth Institute (GGGI). *BRIEF: iNFRASTRUKTUR, Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Hijau Membantu Indonesia Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur untuk Meningkatkan Pembangunan Daerah?*, 2017.

Hasan, Nor. "MELACAK PERAN ELITE NU DALAM PERTEMUAN ISLAM DAN TRADISI LOKAL DI PAMEKASAN." *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial Dan Keagamaan Islam* 8, no. 2 (5 Juli 2011). https://doi.org/10.19105/nuansa.v8i2.13.

Hayati, Nurrisalah, dan Taufik Rizal Dwi Adi Nugroho. "Pengembangan Agroindustri Wilayah Pesisir Berbasis Komoditas Unggulan Ikan Hasil Tangkapan." *Agriekonomika* 7, no. 1 (1 April 2018): 1. https://doi.org/10.21107/agriekonomika.v7i1.3590.

Himawan Sutanto, Dandy. “View of Kebijakan dan Implementasi Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan di Kabupaten Pamekasan.” *Syntax Literate* 6, no. 2 (Desember 2021).

Humas Pamekasan. “Program Sepuluh Ribu Wirausaha Baru,” 7 Maret 2022. http://pamekasankab.go.id/berita/194/program-sepuluh-ribu-wirausaha-baru-saputangan-biru.

Ibrahim <sanimalikibrahim[at]gmail.com>, Sani Malik. “KTT BUMI DAN POSISI KEMENHUB.” Diakses 19 April 2022. http://dephub.go.id/post/read/ktt-bumi-dan-posisi-kemenhub-13473.

Ika Yunia Fauzia. “Urgensi Implementasi Green Economy Perspektif Pendekatan Dharuriyah dalam Maqashid al-Shariah.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, No.1 (Juni 2016): 89.

“Indonesia Green Growth Program.” Diakses 20 April 2022. http://greengrowth.bappenas.go.id/tentang-kami/.

“Inilah Alasan Mengapa Indonesia Disebut sebagai Negara Agraris - Nasional Katadata.co.id.” Diakses 20 April 2022. https://katadata.co.id/safrezi/berita/61658d3d7db87/inilah-alasan-mengapa-indonesia-disebut-sebagai-negara-agraris.

Iqbal, Muhammad. “Analisis Peran Pemangku Kepentingan Dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian,” 2007, 11.

“ISLAM DI MADURA | Islamuna: Jurnal Studi Islam.” Diakses 19 April 2022. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/islamuna/article/view/654/0.

Istiani, Mariatul dan Muhammad Roy Purwanto. “FIQH BI’AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN.” *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII, at-Thullab* 1 (Februari 2019). https://journal.uii.ac.id/thullab/article/download/13246/9636.

Jamaluddin, Jamaluddin. “Fiqh Al-Bi’ah Ramah Lingkungan; Konsep Thaharah dan Nadhafah Dalam Membangun Budaya Bersih.” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 29, no. 2 (31 Juli 2018): 324~345-324~345. https://doi.org/10.33367/tribakti.v29i2.600.

“Kabupaten Pamekasan | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur.” Diakses 26 September 2022. https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-pamekasan/.

Kabupaten Pamekasan dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Pamekasan, t.t.

"Kapasitas SDM Merupakan Kunci keberhasilan Pencapaian Kinerja." Diakses 21 April 2022. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singaraja/baca-berita/3723/Kapasitas-SDM-Merupakan-Kunci-keberhasilan-Pencapaian-Kinerja.html.

"Kemenag Papua." Diakses 19 April 2022. https://papua.kemenag.go.id/#!/detail/39a8b9c2-405d-4420-8c95-ce90c63ba192#topPage.

"Kemenperin: Kemenperin Serius Akselerasi Pembangunan Kawasan Industri Halal." Diakses 20 April 2022. https://kemenperin.go.id/artikel/22962/Kemenperin-Serius-Akselerasi-Pembangunan-Kawasan-Industri-Halal.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. "Ekonomi Hijau Untuk Masa Depan Peradaban," 2021. https://www.kemenkeu.go.id/media/17380/mk-w1-maret-up.pdf.

———. *Kaleidoskop 2021*. Khusus. Vol. XIV. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021.

Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indoonesia. *Kebijakan Kelautan Indonesia*, t.t.

Kementrian PPN. *7 Proyek Implementasi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia*. Jakarta: Sekretariat PPN, 2020.

"Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan.pdf." Diakses 20 April 2022. https://dlhk.bantenprov.go.id/upload/article/Kerusakan%20Lingkungan%20Akibat%20Pertambangan.pdf.

"Knowledge Centre Perubahan Iklim - Komitmen Indonesia." Diakses 19 April 2022. http://ditjenppi.menlhk.go.id/kcpi/index.php/tentang/amanat-perubahan-iklim/komitmen-indonesia.

"KIAI DAN BLATER (Elite Lokal dalam Masyarakat Madura) | Karsa: Journal of Social and Islamic Culture." Diakses 19 April 2022. http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/karsa/article/view/139.

Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan Monitoring, Pelaporan, Verivikasi (MPV). Jakarta: Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim. Direktorat Inventarisasi GRK dan Monitoring, Pelaporan, Verifikasi, 2021.

Lembaga Penelitian & Inovasi. "Laporan Akhir Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pamekasan." Perjanjian Kerja Sama. Kampus C Mulyorejo, Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.

Lisbet. “Green Economy dan Konferensi Tingkat Tinggi Rio+20.” *Info Singkat Hubungan Internasional* Vol. IV, No. 12/II/P3DI (Juni 2012). https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20 Singkat-IV-12-II-P3DI-Juni-2012-69.pdf.

M. Nur Rianto Al-Arif. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

“MEMBANGUN_JARINGAN_KEMITRAAN.pdf.” Diakses 21 April 2022. http://distan.jabarprov.go.id/distan/uploads/files_download/MEMBANGUN_JARINGAN_KEMITRAAN.pdf.

“MODEL LOCAL CULTURE TOURISM BERBASIS TANEAN LANJHANG DESA LARANGAN LUAR PAMEKASAN | Mansur | PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah.” Diakses 26 September 2022. https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/1634.

Muhammad Fakhruddin. “Pemkab Pamekasan Fasilitasi Produk UMKM Melalui Wamiramart,” 7 Maret 2022. https://www.republika.co.id/berita/r5h44a327/pemkab-Pamekasan-fasilitasi-produk-umkm-melalui-wamiramart.

Muhtadi, Ridan, R. Wahyu Agung Utama, Nur Rachmat Arifin, dan Imron Mawardi. “Tinjauan Maqashid Syariah dan Fiqh al-Bi’ah dalam Green Economy.” *Ekonomi Islam* 10, no. 2 (3 Desember 2019): 242–59.

Muslim, Abu. “QUO VADIS AKSI 22 LASKAR PEMBELA ISLAM MENOLAK TEMPAT PROSTITUSI DI KABUPATEN PAMEKASAN DALAM BINGKAI SOCIAL MOVEMENT.” *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam Dan Tasawuf* 6, no. 2 (29 Desember 2020): 109–23. https://doi.org/10.53429/spiritualis.v6i2.128.

Musolli. “MAQASID SYARIAH: KAJIAN TEORITIS DAN APLIKATIF PADA ISU-ISU KONTEMPORER,” Juni 2018.

Muta’ali, Lutfi. *Dinamika Peran Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Wilayah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2019.

Nurlaila, Selvia, dan Moh. Zali. “Faktor Memengaruhi Peningkatan Populasi Sapi Madura di Sentra Sapi Sonok Kabupaten Pamekasan.” *Jurnal Ilmu dan Teknologi Peternakan Tropis* 7, no. 1 (16 Januari 2020): 21. https://doi.org/10.33772/jitro.v7i1.8711.

Ompang Reski Hasibuan. "Kampung Hijau Produktif Sebagai Penerapan Corporate Social Responsibility." *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan* 2 (Agustus 2019): 103.

"Pangkalan Data Pondok Pesantren." Diakses 19 April 2022. https://ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/statistik?id=35.

"Pembangunan Ekonomi dalam Konsep Pembangunan Berkelanjutan | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah." Diakses 24 September 2022. https://bappeda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pembangunan-ekonomi-dalam-konsep-pembangunan-berkelanjutan-68.

"Pemerintah Kabupaten Pamekasan." Diakses 17 April 2022. https://pamekasankab.go.id/berita/73/objek-wisata-di-kabupaten-pamekasan.

"Pemerintah Kabupaten Pamekasan." Diakses 20 April 2022. https://pamekasankab.go.id/berita/616/kiht-solusi-tingkatkan-harga-dan-daya-serap-tembakau-petani.

"Pencegahan Dini Bencana Hidrometeorologi di Indonesia | Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan." Diakses 19 April 2022. https://www.kemenkopmk.go.id/pencegahan-dini-bencana-hidrometeorologi-di-indonesia.

Pramudita Mahyastuti, Mega Sesotyaningtyas, Emod Tri Utomo, Atik Nurwanda, Pradiphda Panduswanto, dan Rahadian Febry Maulana. *Ringkasan Eksekutif Kebijakan Pembangunan Berketahanan Iklim (Climate Resilience Development Policy) 2020–2045,*. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, 2021.

Rachman, Hanung Harimba. "ARAH DAN KEBIJAKAN GREEN INVESTMENT," Januari 2018, 40.

Rahman, Azibur, dan Ubaid Aisyul Hana. "OPTIMALISASI PARIWISATA SYARIAH DALAM UPAYA PENINGKATAN EKONOMI LOKAL MASYARAKAT MADURA" 3, no. 2 (2021): 11.

Rahman, Taufik. "STUDI PERENCANAAN PENGEMBANGAN KAWASAN TERNAK DI KABUPATEN PAMEKASAN." *Rekayasa* 11, no. 1 (2 April 2018): 60. https://doi.org/10.21107/rekayasa.v11i1.4126.

Rahmatullah, Inanna, dan Mustari. *Konsep Dasar Ekonomi Pendekatan Nilai-Nilai Eco-Culture*. Makassar: CV. Nur Lina, 2018.

rahmatullah, dan innana. *BUKU ECO-CULTURE.pdf*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2017.

Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan Tahun 2017-2021, t.t.

Risa Bela. Seputar Batik Toket, 20 Februari 2022.

S., Nurlaila, Kurnadi B., Zali M., dan Nining H. "STATUS REPRODUKSI DAN POTENSI SAPI SONOK DI KABUPATEN PAMEKASAN." *JURNAL ILMIAH PETERNAKAN TERPADU* 6, no. 3 (28 April 2019): 147. https://doi.org/10.23960/jipt.v6i3.p147-154.

Sayaka, Bambang. "EKONOMI HIJAU UNTUK PEMULIHAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN," t.t., 18.

Sayaka, Bambang, Haryono, dan Effendi Pasandaran. "Ekonomi Hijau Untuk Pemulihan Sumber Daya Alam dan Lingkungan," t.t., 18.

Sayyidi, Sayyidi, dan Fawaid Akh. "MEWUJUDKAN DESA WISATA, MELALUI PENATAAN KAWASAN PERTANIAN UNTUK PENINGKATAN EKONOMI DESA." *DIALEKTIKA : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2 Juni 2021). https://doi.org/10.36636/dialektika.v6i1.574.

———. "Mewujudkan Desa Wisata, Melalui Penataan Kawasan Pertanian Untuk Peningkatan Ekonomi Desa." *DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2 Juni 2021). https://doi.org/10.36636/dialektika.v6i1.574.

Setiawan, Dedy Arifuddin. "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Pamekasan" 1, no. 2 (2020): 15.

Setya Putri Erdiana. "Generasi Millenial dan Resep Kuliner Tradisional sebagai Budaya Bangsa Indonesia." *Bandung: Jurnal Dekade* 11, No.2 (2018): 35.

Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (Agustus 2009): 117–30.

Simarmata, Marulam MT, Eko Sudarmanto, Iskandar Kato, Lora Ekana Nainggolan, Elvitrianim Purba, Eko Sutrisno, Muhammad Chaerul, dkk. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. Yayasan Kita Menulis, 2021.

Sjamsir, Zulkifli. *Pembangunan Pertanian dalam Pusaran Kearifan Lokal*. Makassar: CV Sah Media, 2017.

Strategi Implementasi Pembangunan di Jantung Kalimantan (Heart of Borneo/HoB Melalui Pendekatan Ekonomi Hijau). Jakarta: Kelompok

Kerja Nasional (Pokjanas) Heart of Borneo, 2014.

"Strategi Pengembangan Bank Sampah di Wilayah Depok | Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)." Diakses 19 April 2022. https://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm/article/view/13637.

"Strategi Pengembangan Ternak Sapi Potong dalam Mendukung Pembangunan Daerah - Kabupaten Bogor." Diakses 21 April 2022. https://bogorkab.go.id/post/detail/strategi-pengembangan-ternak-sapi-potong-dalam-mendukung-pembangunan-daerah.

Sudrajat, Nandang. *Teori dan praktik pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2013.

Surjono. *Bumi Yang Lestari (Kajian Literatur dan Empiris Tentang Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan Skala Makro-Mikro)*. Malang: UB Press, 2018.

Suryana, dan Rofi Rofaida. "Strategi Peningkatan Kompetensi Sumber daya Manusia Pada Industri Kreatif Berbasis Bahan Baku Lokal Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Industri (Kajian Pada Industri Kerajinan di Kabupaten Bandung)," t.t. file:///C:/Users/DELL/Downloads/2327-4132-1-SM%20(1).pdf.

Sutikno B, Hakim A. "Budaya masyarakat dan partisipasi koperasi terhadap pembangunan lingkungan masyarakat lokal di Kabupaten Pasuruan (studi kasus pada peternak sapi perah dan koperasi susu di Kabupaten Pasuruan)." *Jurnal agromix* 9, No.1 (2016): 11-19.

Syamsuri. *Pengembangan Teknologi Terapan Berwawasan Lingkungan, Menjawab Tantangan 4.0*. Malang: Ma Chung Press, 2020.

Tamimi, Moh. "Mongabay:Situs Berita Lingkungan." Https://www.mongabay.co.id/2020/07/02/kala-mahasiswa-protes-tambang-galian-c-di-pamekasan/, 2 Juli2020.

Tandelilin, Eduardus. *Manajemen Investasi*, t.t.

Teguh Usis. *Sampah, Amanah, Rupiah*. Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021.

"TENTANG x |." Diakses 19 April 2022. https://sdgs.bappenas.go.id/tentang-3/.

Victoria Br. Simanungkalit. *Buku Panduan Pembangunan Desa Wisata*. Jakarta Selatan: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, t.t.

"View of Pemberdayaan Ekonomi Komunitas Muslim Melalui Bank Sampah." Diakses 19 April 2022. http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jsq/article/view/4350/3280.

Wahed, Mohammad. "Pemetaan Potensi Ekonomi Sektoral dan Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pamekasan." *Ekonomi dan Bisnis* 5, no. 1 (30 Juni 2018): 1–16. https://doi.org/10.35590/jeb.v5i1.685.

Wahyurini, Endang Tri, dan Emmy Hamidah. "Pengembangan Ekonomi Desa melalui Kampung Garam (Studi Kasus Desa Bunder Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Madura)." *Jurnal Agrinika : Jurnal Agroteknologi dan Agribisnis* 4, no. 2 (29 September 2020): 155. https://doi.org/10.30737/agrinika.v4i2.1064.

Wartama, I. Nyoman Widnyana, dan Ni Putu Sawitri Nandari. "Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Melalui Bank Sampah Di Desa Sidakarya Denpasar Selatan." *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (23 Desember 2020): 44–48.

Lampiran 1.
KONDISI-KONDISI OBJEK KAJIAN

Kondisi Geografis Kabupaten Pamekasan

Pulau Madura terdapat empat kabupaten salah satunya adalah Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan merupakan sebuah kabupaten yang memiliki luas paling kecil daripada kabupaten lainnya. Pusat pemerintahan Pamekasan berada di Kecamatan Pamekasan. Kabupaten Pamekasan terletak di posisi yang strategis di wilayah madura di mana sebagai jalur perlintasan darat utama yang menghubungkan Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Sumenep.

Secara letak astronomis, Pamekasan berada di $6^{o}51'$ – $7^{o}31'$ Lintang Selatan dan $113^{o}19'$ – $113^{o}58'$ Bujur Timur. Batas-batas wilayah yaitu Laut Jawa sebagai batas Utara, Selat Madura sebagai batas Selatan, bagian barat bersebelahan dengan Kabupaten Sampang, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sumenep. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan, yaitu 79,230 Ha yang terdiri dari 13 kecamatan, 11 kelurahan, dan 189 desa.[176] Berikut gambar peta daerah kabupaten Pamekasan:

[176] "Kabupaten Pamekasan | BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur," diakses 26 September 2022, https://jatim.bpk.go.id/kabupaten-pamekasan/.

Gambar Peta Batas Administrasi Kabupaten Pamekasan

Sumber: Peta Kabupaten Pamekasan.

Tabel 1 Luas Wilayah di Kabupaten Pamekasan

No.	Kecamatan	Luas	%
1.	Tlanakan	4,810 Ha	6.07
2.	Pademawu	7,189 Ha	9.07
3.	Galis	3,186 Ha	4.02
4.	Larangan	4,086 Ha	5.16
5.	Pamekasan	2,647 Ha	3.34
6.	Proppo	7,149 Ha	9.02
7.	Palengaan	8,848 Ha	11.17
8.	Pagantenan	8,604 Ha	10.86
9.	Kadur	3,071 Ha	3.88
10.	Pakong	5,242 Ha	6.62
11.	Waru	7,003 Ha	8.84
12.	Batumarmar	9,707 Ha	12.25
13.	Pasean	7,688 Ha	9.70
Jumlah		79,230 Ha	100.00

Sumber: laporan akhir RPIJM Bidang Cipta Karya Kabupaten Pamekasan 2017-2021.

Wilayah bagiannya berada 6.312 M dari permukaan laut. Secara skala besar wilayah selatan Pamekasan merupakan dataran rendah, di wilayah tengah dataran tinggi, dan kemiringan tidak lebih 2% di bagian utara. Dataran tertinggi berada di Kecamatan Pagantenan mencapai 350 meter dari permukaan air laut dan dataran yang terendah berada di Kecamatan Galis mencapai 6 meter dari permukaan air laut.[177] Ketinggian wilayah yang bervariasi ini mengakibatkan setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Pamekasan memiliki karakter yang berbeda-beda, baik secara ekonomi maupun pontensi alam yang berbeda.

Pamekasan sebagai daerah tropis mempunyai dua musim, yaitu musim hujan yang terjadi pada periode Desember-April dengan Januari sebagai bulan terbasah dan musim kemarau terjadi di periode Mei-Oktober dengan bulan terkering adalah Agustus. Curah hujan yang berlangsung biasanya berkisar antara 1.200-1.700 mm per tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 80-120 hari hujan per tahun.

Terkadang terjadi perbedaan curah musim hujan dan kemarau di setiap wilayah Pamekasan sehingga menyebabkan setiap kecamatan yang ada memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga, baik dari mata pencaharian masyarakatnya maupun dari bidang potensi daerah masing-masing. Ketika terjadi musim kemarau yang panjang biasa masyarakat menggarap garam dan bertani tembakau yang mana merupakan salah satu komoditas unggulan dari Kabupaten Pamekasan. Adapun saat musim hujan petani biasa bercocok tanam seperti padi, jagung, dan singkong.

Kondisi Sosial dan Budaya Kabupaten Pamekasan

Sosial budaya merupakan segala sesuatu yang diciptakan manusia melalui akal pikiran dan budinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sosial dan budaya merupakan dua elemen yang selalu beriringan mengikuti perkembangan zaman. Budaya sebagai norma akan melahirkan perilaku yang diyakini dan dilakukan oleh masyarakat yang

[177] "Pemerintah Kabupaten Pamekasan," diakses 17 April 2022, https://pamekasankab.go.id/berita/73/objek-wisata-di-kabupaten-pamekasan.

menganutnya. Sosial budaya juga akan melahirkan perubahan sosial, hal itu mengingat bahwa pola pikir manusia bersifat dinamis. Namun, perubahan-perubahan yang diinginkan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya upaya perubahan dari diri masyarakat dalam sebuah tatanan kebudayaan yang sudah dianggap stabil. hal ini dapat dilihat dari beberapa sektor dalam sebuah klasifikasi manusia, yakni sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor politik pemerintahan.

1. Pendidikan

Pendidikan yang baik dan bermutu merupakan faktor yang paling menentukan dalam peningkatan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan menjadi simbol status sosial dan merupakan media yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Salah satu modal dasar pembangunan adalah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, peningkatan mutu sistem pendidikan akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan. Pendidikan memegang peranan yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas manusia baik secara intelektual, sosial, spiritual maupun profesional.

Salah satu yang menjadi indikator kemajuan pendidikan di suatu wilayah yakni Angka Partisipasi Murni (APM). Angka Partisipasi Murni dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), di tahun 2020 APM sekolah SD/MI/sederajat 97.66, sedangkan di periode sebelumnya 97.53, SMP/Mts/sederajat di tahun 2020 76.07, angka ini lebih besar dibandingkan periode sebelumnya 75.27, sedangkan ditingkatan SMA/SMK/sederajat di tahun 2020 sebesar 60.88 sedangkan di periode sebelumnya hanya 60.06.[178]

Hal ini berarti adanya peningkatan APM dalam setiap tahunnya, yang berarti ada sedikit kemajuan pendidikan dalam setiap tahunnya, meskipun luas wilayah Kabupaten Pamekasan menempati peringkat terendah di antara tiga kabupaten yang terdapat di Pulau Madura, namun di samping peningkatan APM juga sebaran jumlah perguruan tinggi negeri maupun swasta yang terdapat di Kabupaten Pamekasan ini menempati peringkat teratas daripada kabupaten lainnya. Oleh karena

[178] *Kabupaten Pamekasan Dalam Angka 2021* (BPS Kabupaten Pamekasan, t.t.), 107.

itu, iklim akademik yang paling menjanjikan berada di Kabupaten Pamekasan.

Iklim akademik tersebut seperti kegiatan pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Selain itu, keuntungan yang didapat oleh Kabupaten Pamekasan terkait iklim akademik yaitu tersedianya tenaga kerja—tenaga kerja prospektif yang dihasilkan dari adanya perguruan tinggi. Dengan kata lain, pengembangan pengetahuan dan reproduksi lebih terjamin dalam wilayah lokal pemerintah daerah. Hingga pada awal tahun 2017, terdapat 16 perguruan tinggi yang telah berdiri di Kabupaten Pamekasan. Dengan perkiraan jumlah mahasiswa sekitar 12.255 dan sekitar 400 tenaga pengajar atau dosen di dalamnya.[179]

Pada aspek sosial, keberadaan mahasiswa dari berbagai latar belakang akan memberikan pengaruh bagi lingkungan sekitar tempat tinggal mereka baik itu kebiasaan positif maupun negatif. Hal tersebut tentu membutuhkan perhatian serius agar tidak sampai menyebabkan gesekan-gesekan dengan budaya dan kebiasaan masyarakat tempat mereka tinggal.

2. Keagamaan

Identitas berbau keagamaan begitu terasa dan banyak ditemui dalam berbagai aktivitas dan kehidupan sosial masyarakat. Kentalnya simbol keagamaan dalam sistem sosial tidak lepas dari konteks historis Kabupaten Pamekasan. Hal ini dikarenakan dalam sejarah perjalanannya, Pamekasan pernah mengalami kondisi di mana terdapat beberapa agama yang diketahui pernah menjadi agama mayoritas dan dianut oleh masyarakat Pamekasan itu sendiri. Oleh karena itu, wajar apabila kemudian ditemui banyak tempat peribadatan yang beragam agamanya.[180]

Dari perspektif keberagamaan, masyarakat Pamekasan termasuk masyarakat yang majemuk. Di Kabupaten Pamekasan terdapat beberapa agama resmi yang diakui oleh pemerintah. Kebanyakan penduduk yang

---

[179] Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Pamekasan (Pamekasan: LPI UNAIR), 32.

[180] Abd Hannan, "Fanatisme dan Stigma Sosial Pesantren Miftahul Ulum Terhadap Kelompok Muhammadiyah di Pamekasan," (Tesis FISIP Universitas Airlangga, 2017), 78.

tinggal di Kabupaten Pamekasan adalah suku Madura dan beberapa di antaranya terdiri dari suku Jawa, masyarakat keturunan asing seperti Arab, China, dan India.[181]

Meskipun masyarakat Pamekasan mayoritas beragama Islam, tetapi agama lain di luar Islam cukup leluasa untuk beribadah dengan aman dan tenang. Kenyataan ini mencerminkan betapa tradisi sosial keagamaan masyarakat Pamekasan, sekalipun mereka dikenal memiliki fanatisme keislaman yang cukup tinggi, mereka juga memiliki sikap penghormatan cukup besar terhadap perbedaan. Toleransi dalam kehidupan beragama ini menimbulkan kesadaran masyarakat Pamekasan beragama Islam untuk senantiasa hidup berdampingan dengan damai dengan masyarakat non-Islam.

Kondisi sosial keagamaan masyarakat Pamekasan bisa kita lihat dari penerang agama, tempat ibadah, majelis taklim, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan Islam. Dari beberapa elemen tersebut, dalam realitanya tidak dapat berdiri sendiri bahkan bekerja sendiri-sendiri sesuai fungsi masing-masing. Di antara elemen satu dengan yang lain memiliki hubungan yang erat untuk mencapai tujuan yang sama.

Para penerang agama yang menjadi panutan yang selalu dihormati dan dilakukan semua perintahnya di dalam kehidupan beragama yang dapat diterima oleh masyarakat dengan baik karena mereka memiliki modal dasar keagamaan yang kokoh sehingga dapat memberikan pencerahan yang baik dalam membina masyarakat. Adapun tempat ibadah, majelis taklim, pondok pesantren, dan lembaga pendidikan Islam sebagai sarana penunjang keagamaan yang juga mendapat timbal balik dari masyarakat. Hubungan yang baik ini menyebabkan kehidupan beragama di Kabupaten Pamekasan menjadi semakin kuat dan juga dapat terhindar konflik yang bermotif agama.

---

[181] Abu Muslim, "Quo Vadis Aksi 22 Laskar Pembela Islam Menolak Tempat Prostitusi di Kabupaten Pamekasan Dalam Bingkai Social Movement," *Jurnal Ilmiah Spiritualis: Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf* 6, no. 2 (29 Desember 2020): 112, https://doi.org/10.53429/spiritualis.v6i2.128.

3. Politik Pemerintahan

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Kabupaten Pamekasan dipimpin oleh bupati dan wakil bupati, dan dibantu oleh seorang sekretaris daerah, 3 orang asisten, 5 orang staf ahli, 10 orang kepala bagian, 32 kepala dinas serta 13 orang camat. Untuk menunjang kinerja pemerintahan secara maksimal, Kabupaten Pamekasan bekerja sama dengan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pada kenyataannya, masyarakat Kabupaten Pamekasan dikenal lebih halus baik dari sikap, bahasa, dan tata krama daripada orang Madura Barat (Sampang dan Bangkalan). Hal ini karena Kabupaten Pamekasan dikenal sebagai daerah yang lebih subur. Selain itu, dibuktikan dari beberapa budaya yang ada di Kabupaten Pamekasan yang unik dan bagus serta dilengkapi dengan berbagai macam pesan kehidupan yang baik kepada masyarakat.

Sebagai salah satu kabupaten yang berada di bagian timur Pulau Madura, Pamekasan mempunyai bangunan sistem sosial kebudayaan yang hampir sama dengan daerah Madura pada umumnya. Hal itu terletak pada kesamaan dua aspek, yaitu bangunan struktur sosial setempat yang sama-sama mengandung nilai hierarki dan kultur masyarakat yang kental akan religiusitas. Namun di balik kesamaan tersebut, Kabupaten Pamekasan juga mempunyai beberapa nilai lokalitas yang tercatat sebagai kebudayaan murni Kabupaten Pamekasan itu sendiri.[182]

Secara genealogis, sistem hierarkis dalam kultur masyarakat Pamekasan tecermin jelas dalam peribahasa lokal, yakni *bhuppa', bhabhu', ghuru, rato* (bapak, ibu, guru, pemerintah). Secara indiksikalitas, bagian masyarakat Pamekasan peribahasa lokal tersebut mengandung dua arti, yakni sebagai representasi kuatnya cengkeraman tradisi hierarki dan menggambarkan standar kepatuhan masyarakat Pamekasan.[183]

Wujud konkret nilai kreativitas lokal Kabupaten Pamekasan dapat kita temukan dalam berbagai macam kesenian, di antaranya seperti

---

[182] Abd Hannan, "Hegemoni Religio-Kekuasaan dan Transformasi Sosial; Mobilisasi Jaringan Kekuasaan dan Keagamaan Kiai dalam Dinamika Sosio-Kultural Masyarakat Madura," *Jurnal Sosial Budaya*, 16, no. 1 (2019), 24.

[183] Abd Hannan, *Perempuan Madura, Gender, dan Pembangunan* (Yogyakarta: Elmatera, 2017), 7.

kerapan sapi, tari pecut, *sapeh sono'*.[184] Dari semua wujud kebudayaan tersebut, tradisi kerapan sapilah yang paling dikenal di kalangan masyarakat umum. Kerapan sapi (perlombaan pacuan sapi) merupakan lomba adu cepat dari sepasang sapi yang menarik kereta yang terbuat dari kayu (tempat joki berdiri guna mengendalikan laju sapi). Trek pacuan kerapan sapi biasanya berkisar 100 meter dan lombanya dapat berlangsung antara sepuluh detik hingga satu menit. Kerapan sapi diselenggarakan setiap tahun sekali pada bulan Agustus dan September dengan pertandingan final pada akhir bulan September atau Oktober di eks Kota Karesidenan Pamekasan untuk memperebutkan piala bergilir presiden.

Selain berupa kesenian daerah, wujud kearifan lokal Kabupaten Pamekasan juga dapat ditemukan pada produk makanan daerah. Salah satu makanan khas daerah Pamekasan yang paling terkenal yaitu *sate lala'* (sate lalat).[185] Dinamakan *sate lala'* bukan karena berbahan dasar lalat, melainkan dari daging kambing atau ayam yang dipotong dengan ukuran yang lebih kecil daripada ukuran sate pada umumnya. *Sate lala'* mudah kita jumpai di Kabupaten Pamekasan, terutama di Jalan Niaga yang merupakan sentral kuliner.

[184] "MODEL LOCAL CULTURE TOURISM BERBASIS TANEAN LANJHANG DESA LARANGAN LUAR PAMEKASAN | Mansur | PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah," 23–24, diakses 26 September 2022, https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/profit/article/view/1634.

[185] "MODEL LOCAL CULTURE TOURISM BERBASIS TANEAN LANJHANG DESA LARANGAN LUAR PAMEKASAN | Mansur | PROFIT: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah," 24.

Lampiran 2.
POTENSI-POTENSI SUMBER DAYA

Potensi Tumbuhan Pangan

Pertanian tanaman pangan di Kabupaten Pamekasan memiliki beberapa potensi tanaman pangan yang masih jarang dikelola dengan baik oleh masyarakat sekitar khususnya masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Seperti halnya potensi-potensi berikut:[186]

1. Padi pada setiap kecamatan di kabupaten Pamekasan cukup banyak, namun ada beberapa Kecamatan yang tidak memproduksi padi disebabkan faktor geografi yang kurang mendukung untuk tanaman padi, seperti di Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Kadur, dan Kecamatan Batumarmar, berikut ini kami akan menampilkan data statistik produksi padi pada tahun 2021:

Tabel Potensi Padi di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Padi (dalam Ton)**
	2021
(1)	(2)
Tlanakan	440
Pademawu	7.576
Galis	-
Larangan	-
Pamekasan	1.998
Proppo	9.307
Palengaan	8.075
Pegantenan	9.684
Kadur	-

[186] Ahmad Muhaimin dkk., 158.

Kecamatan *Subdistrict*	**Padi (dalam Ton)**
	2021
Pakong	2.026
Waru	8.219
Batu Marmar	-
Pasean	1.890
Kabupaten Pamekasan	**49.215**

Sumber/Source: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan-Rekapitulasi Petugas Statistik Pertanian (RKSP)/Food Crops, Horticulture, and Plantation Office of Pamekasan Regency-Recapitulation of Agricultural Statistics Officer (RKSP).

2. Jagung di berbagai Kabupaten Pamekasan memiliki rata rata yang sangat tinggi, dan hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Pamekasan memproduksi tanaman jagung tersebut, kita bisa lihat bersama-sama dalam data statistik bagaimana produksi jagung di setiap kecamatan:

Tabel Potensi Jagung di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	**Jagung (dalam Ton)**
	2021
(1)	(2)
Tlanakan	3.420
Pademawu	1.428
Galis	137
Larangan	7.947
Pamekasan	381
Proppo	1.809
Palengaan	11.308
Pegantenan	5.217
Kadur	11.071
Pakong	621
Waru	10.866
Batu Marmar	14.718
Pasean	13.029
Kabupaten Pamekasan	**84.193**

Sumber/Source: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan-Rekapitulasi Petugas Statistik Pertanian (RKSP)/Food Crops, Horticulture, and Plantation Office of Pamekasan Regency-Recapitulation of Agricultural Statistics Officer (RKSP).

3. Kacang tanah merupakan tanaman yang mudah kita temukan pada setiap sudut area kecamatan Pamekasan, kecuali pada Kecamatan Waru dikarenakan di sana tidak mendukungnya struktur tanah yang ada, kita bisa saksikan bersama pada tabel data produksi kacang tanah berikut ini:

Tabel Potensi Kacang Tanah di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	**Kacang Tanah (dalam Ton)**
	2021
(1)	(2)
Tlanakan	93
Pademawu	55
Galis	5
Larangan	75
Pamekasan	14
Proppo	132
Palengaan	73
Pegantenan	90
Kadur	51
Pakong	3
Waru	-
Batu Marmar	321
Pasean	617
Kabupaten Pamekasan	**1.529**

Sumber/Source: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan-Rekapitulasi Petugas Statistik Pertanian (RKSP)/Food Crops, Horticulture, and Plantation Office of Pamekasan Regency-Recapitulation of Agricultural Statistics Officer (RKSP).

4. Produksi kacang hijau lebih sedikit dibandingkan kacang tanah, tentunya ini menjadi perhatian besar kepada pemerintah dan juga masyarakat terkait hal tersebut, berikut ini data terkait produksi kacang hijau yang di beberapa kecamatan di Kabupaten Pamekasan:

Tabel Potensi Kacang Hijau di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Kacang Hijau (dalam Ton)**
	2021
(1)	(2)
Tlanakan	293
Pademawu	583
Galis	1
Larangan	151
Pamekasan	-
Proppo	2
Palengaan	17
Pegantenan	-
Kadur	100
Pakong	-
Waru	22
Batu Marmar	-
Pasean	387
Kabupaten Pamekasan	**1.550**

Sumber/Source: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan-Rekapitulasi Petugas Statistik Pertanian (RKSP)/Food Crops, Horticulture, and Plantation Office of Pamekasan Regency-Recapitulation of Agricultural Statistics Officer (RKSP).

5. Ubi kayu memiliki manfaat dan potensi yang luar biasa bagi kesehatan, bahkan biasanya masyarakat Madura khususnya di pedesaan mengganti nasi dengan ubi kayu tersebut, potensi ubi kayu di Pamekasan bisa dikatan cukup siginifikan dikarenakan faktor geografi dan minat masyarakat menurun, dan tumbuhnya tanaman ubi kayu hanya di beberapa kecamatan saja tidak secara Universal di Kabupaten Pamekasan, berikut ini data tanaman ubi kayu di Kabupaten Pamekasan:

Tabel Potensi Ubi Kayu di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Ubi Kayu (dalam Ton)**
	2021
(1)	(2)
Tlanakan	874

Kecamatan *Subdistrict*	Ubi Kayu (dalam Ton)
	2021
Pademawu	176
Galis	-
Larangan	1.234
Pamekasan	-
Proppo	2.675
Palengaan	4.971
Pegantenan	5.718
Kadur	739
Pakong	4.364
Waru	-
Batu Marmar	3.151
Pasean	1.212
Kabupaten Pamekasan	**25.309**

Sumber/Source: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan-Rekapitulasi Petugas Statistik Pertanian (RKSP)/Food Crops, Horticulture, and Plantation Office of Pamekasan Regency-Recapitulation of Agricultural Statistics Officer (RKSP).

6. Ubi jalar di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Rata-rata produksi tanaman ubi jalar berikut di Kabupaten Pamekasan (ton).

Tabel Potensi Ubi Jalar di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	Ubi Jalar
	2021
(1)	(2)
Tlanakan	356
Pademawu	-
Galis	-
Larangan	-
Pamekasan	356
Proppo	-

Kecamatan ***Subdistrict***	**Ubi Jalar**
	2021
Palengaan	-
Pegantenan	-
Kadur	-
Pakong	-
Waru	-
Batu Marmar	-
Pasean	-
Kabupaten Pamekasan	**712**

Sumber/Source: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pamekasan-Rekapitulasi Petugas Statistik Pertanian (RKSP)/Food Crops, Horticulture, and Plantation Office of Pamekasan Regency-Recapitulation of Agricultural Statistics Officer (RKSP).

Maka dari itu, perlu adanya sentuhan baik dari pemerintah maupun dari masyarakat sekitar sehingga nanti akan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Dengan adanya kebijakan pemerintah mengenai pertanian pangan di Kabupaten Pamekasan, akan lebih meningkatkan pengelolaan dan kualitas pertanian tersebut.

Potensi Agraria dalam Perkebunan

Perkebunan merupakan salah satu subbidang dari beberapa subbidang pertanian. Perkebunan adalah seluruh aktivitas yang mengusahakan tumbuhan atau tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem tertentu pula namun selaras dengan tanaman tersebut. Di Kabupaten Pamekasan, perkebunan yang ada sangat beraneka ragam. Bahkan, di setiap kecamatan memiliki ciri khas perkebunan sendiri seperti halnya perkebunan di bawah ini:[187]

1. Kelapa di Kabupaten Pamekasan potensi sangat signifikan, tercatat pada tahun 2020 dan 2021 potensi kelapa melonjak drastis, bahkan di setiap kecamatan yang ada di kabupaten. Baik kami akan menampilkan data terkait potensi kelapa tahun 2020 dan 2021.

[187] Ahmad Muhaimin dkk., 213.

Tabel Potensi Kelapa di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Kelapa/*Coconut* (dalam Ton)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	224	230
Pademawu	176	188
Galis	184	191
Larangan	325	326
Pamekasan	164	169
Proppo	282	283
Palengaan	498	500
Pegantenan	726	769
Kadur	793	793
Pakong	324	324
Waru	533	533
Batu Marmar	354	350
Pasean	104	100
Kabupaten Pamekasan	**4.687**	**4.756**

2. Alpukat atau nama Latinnya *Persea Americana* merupakan sejenis buah yang hidup pada musim tropis dan subtropis, peminat alpukat di Kabupaten Pamekasan sangatlah besar, namun produksinya bisa dikatakan stagnan atau menurun, berikut data terkait produksi alpukat di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Alpukat di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Alpukat/*Avocado* (dalam kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	21	24
Galis	-	-
Larangan	520	130
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-

Kecamatan ***Subdistrict***	**Alpukat/*Avocado* (dalam kuintal)**	
	2020	**2021**
Palengaan	1.226	126
Pegantenan	12.623	2.289
Kadur	327	323
Pakong	161	308
Waru	695	1.983
Batu Marmar	22	9
Pasean	80	262
Kabupaten Pamekasan	**15.675**	**5.453**

3. Anggur di Kabupaten Pamekasan memiliki potensi yang sangat sedikit, bahkan hanya di Pamekasan sendiri daerah secara teritorial yang tumbuh buah anggur seperti di Kecamatan Tlanakan, berikut ini data stastistik terhadap pertumbuhan buah anggur pada tahun 2020 dan 2021 di Kabupaten Pamekasan.

Tabel Potensi Anggur di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Anggur/*Grape* (dalam Kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	2	3
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	-	-
Kadur	-	-
Pakong	-	-
Waru	-	-
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**2**	3

4. Belimbing di Kabupaten Pamekasan masih sangat minim, bahkan masih *lose* terhadap pertumbuhan kelapa, bahkan ada beberapa kabupaten yang ada di Pamekasan yang tidak ada produksi belimbing seperti yang ada pada tabel berikut ini:

Tabel Potensi Belimbing di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Belimbing/*Star Fruit* (dalam Kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	29	62
Pademawu	-	291
Galis	46	42
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	9	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	-	11
Kadur	26	15
Pakong	255	119
Waru	798	180
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**1.163**	**720**

5. Durian di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pamekasan hanyalah sebagian saja yang bisa menanam durian dan biasanya haruslah di dataran tinggi, adapun daerah dataran rendah seperti pada data berikut ini di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, dan sekitarnya tidak dapat memproduksi buah durian dikarenakan sektor geografis yang kurang mendukung, berikut ini potensi perkebunan durian berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Durian di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Durian/*Durian* (dalam Kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan		
Pegantenan	6.144	9.663
Kadur	-	-
Pakong	497	973
Waru	206	206
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	6.847	10.842

6. Jambu air yang paling banyak produksinya adalah di Kecamatan Tlanakan, tercatat pada tahun 2021 produksi jambu air di daerah Tlanakan mencampai 2.619 Kuintal, dan posisi kedua dipegang oleh Pademawu dengan jumlah produksi sebanyak 844 Kuintal, berikut ini data pertumbuhan jambu air dalam Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Jambu Air di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Jambu Air/*Water Apple* (dalam Kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	4.455	2.619
Pademawu	-	844
Galis	170	102
Larangan	312	304
Pamekasan	-	-

Kecamatan *Subdistrict*	Jambu Air/*Water Apple* (dalam Kuintal)	
	2020	2021
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	-	73
Kadur	41	48
Pakong	86	128
Waru	-	-
Batu Marmar	-	-
Pasean	45	-
Kabupaten Pamekasan	**5.109**	**4.118**

7. Hanya beberapa daerah jambu biji dapat tumbuh, seperti di Kecamatan Propo pada tahun 2020 dapat memproduksi sebanyak 3.400 Kuintal, namun pada tahun 2021, kecamatan tersebut tidak memproduksi lagi, berikut ini data produksi jambu yang tercatat pada tahun 2020 dan tahun 2021:

Tabel Potensi Jambu Air di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	Jambu Biji/*Guava*(dalam Kuintal)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	601	504
Pademawu	-	301
Galis	54	3
Larangan	221	252
Pamekasan	85	-
Proppo	3.400	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	-	33
Kadur	30	57
Pakong	59	43
Waru	387	388
Batu Marmar	-	31
Pasean	-	57
Kabupaten Pamekasan	**4.837**	**1.669**

8. Tembakau merupakan salah satu penghasilan terbesar di Kabupaten Pamekasan, dan bahkan yang paling ditunggu oleh masyarakat khususnya pada musim kemarau, tembakau ini digadang-gadang sebagian potensi yang bisa mengangkat perekonomian masyarakat dikarenakan mayoritas petani yang ada di setiap kecamatan adalah petani tembakau, berikut ini data produksi tembakau yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 202 dan 2021.

Tabel Potensi Tembakau di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Tembakau/*Tobacco* (dalam Ton)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	914	1.883
Pademawu	3.190	3.064
Galis	1.190	1.082
Larangan	928	978
Pamekasan	1.267	1.228
Proppo	2.424	2.005
Palengaan	1.862	2.053
Pegantenan	1.709	1.702
Kadur	1.480	1.528
Pakong	1.195	1.195
Waru	2.828	1.617
Batu Marmar	2.990	2.449
Pasean	2.591	2.632
Kabupaten Pamekasan	**24.568**	**23.476**

9. Potensi jeruk silam terbesar ada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, di sana terdapat perkebunan jeruk silam yang dapat menghasilkan hingga 1.000 kuintal, bahkan dalam data 2021 jeruk silam yang didapatkan di Kecamatan Larangan sekitar 14.707 kuintal, biar lebih jelasnya mari kita perhatikan secara saksama data di bawah ini:

Tabel Potensi Jeruk Silam di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Jeruk Silam/*Orange* (dalam Kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	16	-
Larangan	14.708	14.707
Pamekasan	-	-
Proppo	52	62
Palengaan	-	-
Pegantenan	-	-
Kadur	452	528
Pakong	-	19
Waru	375	1.225
Batu Marmar	60	108
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**15.663**	**16.649**

10. Siapa yang tidak suka dengan rujak?, sudah pasti mangga merupakan salah satu buah yang harus ada ketika kita sedang rujakan. Nah di sini, mangga di Kabupaten Pamekasan salah satu buah yang hampir terdapat di setiap kecamatan di Kabupaten Pamekasan, namun dalam data statistik salah satu wilayah yang tidak memiliki tumbuhnya buah mangga adalah di Kecamatan Batumarmar, nah bisa kita lihat bersama-sama tabel berikut ini yang menunjukkan keberadaan potensi buah mangga di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Mangga di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Mangga/*Mango* (dalam Kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	5.353	7.786
Pademawu	35	11.790
Galis	6.417	10.739
Larangan	8.084	7.998
Pamekasan	60	-
Proppo	19.965	-
Palengaan	-	7.068
Pegantenan	-	9.483
Kadur	8.067	6.462
Pakong	194	11.513
Waru	18.300	18.300
Batu Marmar	-	-
Pasean	198	475
Kabupaten Pamekasan	**66.673**	**91.614**

11. Daerah Kecamatan Galis menunjukkan bahwa buah nangka tidak tumbuh di daerah tersebut, namun hal ini berkomparasi dengan Kecamatan Pademawu pada tahun 2021 dapat memproduksi sebanyak 2.396. Kita bisa saksikan bersama pertumbuhan buah nangka di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dan 2021 pada tabel berikut ini:

Tabel Potensi Nangka di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Nangka/*Jackfruit* (dalam Kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	703	204
Pademawu	785	2.396
Galis	-	-
Larangan	946	946
Pamekasan	1.717	102

Kecamatan *Subdistrict*	Nangka/*Jackfruit* (dalam Kuintal)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Proppo	391	41
Palengaan	1.199	286
Pegantenan	1.213	1.880
Kadur	769	1.294
Pakong	118	133
Waru	2.102	2.102
Batu Marmar	31	34
Pasean	955	557
Kabupaten Pamekasan	**10.929**	**9.976**

12. Kates (*bahasa Madura)* atau pepaya potensinya cukup siginifikan di berbagai Kecamatan di Kabupaten Pamekasan seperti di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Pasean, dan Kecamatan Batumarmar yang memiliki potensi yang ssangat minim. Berikut ini potensi perkebunan pepaya di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Pepaya di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	Pepaya/*Papaya* (dalam Kuintal)	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	703	204
Pademawu	785	2.396
Galis	-	-
Larangan	946	946
Pamekasan	1.717	102
Proppo	391	41
Palengaan	1.199	286
Pegantenan	1.213	1.880
Kadur	769	1.294

Kecamatan ***Subdistrict***	**Pepaya/*Papaya* (dalam Kuintal)**	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Pakong	118	133
Waru	2.102	2.102
Batu Marmar	31	34
Pasean	955	557
Kabupaten Pamekasan	**10.929**	**9.976**

13. Rambutan di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi perkebunan rambutan berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Rambutan di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Rambutan/*Rambutan***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	55	54
Pamekasan	-	-
Proppo	17	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	3.822	770
Kadur	-	15.168
Pakong	44	11.208
Waru	925	1.665
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**4.863**	**28.865**

Potensi Holtikultura

Subsektor hortikultura dalam pembangunan pertanian merupakan komponen penting yang terus bertumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu. Produk holtikultura buah-buahan yang dominan di ekspor, yaitu mangga dan pisang. Dan seperti yang kita ketahui pada potensi holtikultura di bawah, yaitu di Kabupaten Pamekasan, yang banyak ditanami oleh masyarakat yaitu cabai rawit, mangga, dan pisang.

1. Bawang daun di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura bawang daun berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Bawang Daun di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Bawang Daun/*Scallion***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	85
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	267	672
Kadur	-	-
Pakong	-	-
Waru	880	900
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**1.147**	1.657

2. Bawang merah di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holticultura bawang merah berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Bawang Merah di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Bawang Merah/*Shallot***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	135	135
Pademawu	765	1.743
Galis	1.200	1.470
Larangan	160	280
Pamekasan	-	-
Proppo	730	3.015
Palengaan	860	-
Pegantenan	300	3.379
Kadur	828	1.480
Pakong	220	204
Waru	22.632	19.732
Batu Marmar	150.952	133.472
Pasean	22.709	26.956
Kabupaten Pamekasan	**201.491**	**191.866**

3. Cabai besar di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura cabai besar berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Padi di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	**Cabai Besar/*Big Chili***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	6.060	3.080
Pademawu	134	60
Galis	104	-
Larangan	-	140
Pamekasan	-	-
Proppo	6.682	3.818
Palengaan	-	-
Pegantenan	100	670
Kadur	60	129
Pakong	833	437
Waru	-	-
Batu Marmar	534	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	14.507	8.334

4. Cabai rawit di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura cabai rawit berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Cabai Rawit di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	**Cabai Rawit/*Cayenne Pepper***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	11.405	4.080
Pademawu	109	36
Galis	103	-

Kecamatan ***Subdistrict***	**Cabai Rawit/*Cayenne Pepper***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Larangan	3.738	3.840
Pamekasan	-	-
Proppo	4.139	5.268
Palengaan	13.533	2.070
Pegantenan	28.396	22.284
Kadur	3.982	6.428
Pakong	490	100
Waru	20.860	5.470
Batu Marmar	30.141	4.946
Pasean	13.108	10.915
Kabupaten Pamekasan	**130.004**	**65.437**

3. Tomat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batu-marmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura tomat berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Tomat di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Tomat/*Tomato***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	74	9
Pademawu	-	-
Galis	386	500
Larangan	1.169	600
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	680	1.025
Kadur	147	383

Kecamatan *Subdistrict*	Tomat/*Tomato*	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Pakong	220	-
Waru	2.430	-
Batu Marmar	52	27
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**5.158**	**2.544**

4. Terong di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batu-marmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura terong berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Tereng di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	Terong/*Eggplant*	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	15
Pademawu	-	-
Galis	100	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	124	2.302
Palengaan	550	-
Pegantenan	1.736	504
Kadur	-	-
Pakong	-	-
Waru	135	125
Batu Marmar	48	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**2.693**	**2.946**

5. Kacang panjang di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura kacang panjang berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Kacang Panjang di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	**Kacang Panjang/*Long Beans***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	200	1.390
Palengaan	1.200	-
Pegantenan	1.376	1.454
Kadur	-	-
Pakong	-	-
Waru		-
Batu Marmar	-	-
Pasean	24	4
Kabupaten Pamekasan	**2.800**	**2.848**

6. Bayam di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura bayam berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Bayam di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Bayam/*Spinach***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	52	-
Pademawu	-	220
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	366	380
Proppo	3	-
Palengaan	24	-
Pegantenan	-	-
Kadur	39	70
Pakong	-	-
Waru	1.145	1.200
Batu Marmar	12	1
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**1.641**	**1.771**

7. Kangkung di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura kangkung berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Kangkung di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Kangkung/*Water Spinach***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	103	450
Pademawu	-	835
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	542	400

Kecamatan *Subdistrict*	Kangkung/*Water Spinach*	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Proppo	54	-
Palengaan	178	-
Pegantenan	-	270
Kadur	18	114
Pakong	-	-
Waru	2.125	880
Batu Marmar	15	4
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**3.035**	**2.953**

8. Buncis di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura buncis berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Buncis di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	Buncis/*Sting Beans*	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	6
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	600	924
Kadur	-	-
Pakong	-	-

Kecamatan *Subdistrict*	Buncis/*Sting Beans*	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Waru	-	-
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**600**	**930**

9. Ketimun air di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura ketimun air berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Ketimun di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	Ketimun/*Cucumber*	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	47	6.960
Palengaan	30	-
Pegantenan	2.602	1.655
Kadur	-	-
Pakong	-	-
Waru	-	-
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**2.679**	**8.615**

10. Labu siam di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura labu siam berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Labu Siam di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Labu Siam/*Chayote***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	-	-
Kadur	115	126
Pakong	-	-
Waru	-	-
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	115	126

11. Sawi Manila di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura sawi manila berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Sawi Manila di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Sawi/*Mustard Green***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	640
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	360
Proppo	2	-
Palengaan	27	-
Pegantenan	-	320
Kadur	-	-
Pakong	-	-
Waru	880	900
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**909**	**2.220**

12. Kubis di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batu-marmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura kubis berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Kubis di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Kubis/*Cabbage***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-

Kecamatan ***Subdistrict***	**Kubis/*Cabbage***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	-	-
Kadur	-	-
Pakong	-	-
Waru	205	-
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**205**	**-**

13. Melon di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura melon berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Melon di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Melon/*Melon***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	-	-
Larangan	680	340
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	65	-
Kadur	-	-
Pakong	300	-

Kecamatan *Subdistrict*	**Melon/*Melon***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Waru	-	-
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**1.045**	**340**

14. Semangka di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi holtikultura semangka berikut di Kabupaten Pamekasan (kuintal) pada tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Semangka di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	**Semangka/*Water Melon***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	-	-
Pademawu	-	-
Galis	-	300
Larangan	-	-
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	320	-
Kadur	9.412	8.835
Pakong	-	-
Waru	-	-
Batu Marmar	-	-
Pasean	-	-
Kabupaten Pamekasan	**9.732**	**9.135**

Potensi Perternakan

Peternakan adalah suatu kegiatan usaha dengan cara meningkatkan produksi ternak yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, di mana hal ini untuk mengoptimalkan biotik berupa hewan ternak. Peternakan juga merupakan pengusahaan/pembudidayaan/pemeliharaan ternak dengan pemberian fasilitas penunjang untuk perkembangan maupun pertumbuhan hewan ternak.

Peternakan di Kabupaten Pamekasan yang paling dominan yaitu ternak sapi. Bahkan, Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadikan empat kecamatan sebagai sentra peternakan sapi asli Madura. Meskipun potensi sapi paling dominan, potensi ternak lainnya juga dominan di Kabupaten Pamekasan sendiri seperti yang sudah diuraikan di bawah ini:

1. Sapi terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan sapi berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Sapi di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Sapi**	
	Jantan	**Betina**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	9.223	7.184
Pademawu	8.614	3.891
Galis	3.211	1.186
Larangan	8.823	3.063
Pamekasan	4.480	3.107
Proppo	5.898	11.505
Palengaan	2.960	14.930
Pegantenan	9.549	7.634
Kadur	7.178	6.496
Pakong	1.500	9.537
Waru	490	13.214

Kecamatan *Subdistrict*	Sapi	
	Jantan	**Betina**
(1)	(2)	(3)
Batu Marmar	9.389	14.625
Pasean	962	21.233
Kabupaten Pamekasan	**76.687**	**117.605**

2. Kambing terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan kambing berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Kambing di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	**Kambing**
(1)	(2)
Tlanakan	10.411
Pademawu	8.776
Galis	5.624
Larangan	7.713
Pamekasan	4.894
Proppo	4.218
Palengaan	2.806
Pegantenan	2.319
Kadur	3.025
Pakong	1.845
Waru	2.828
Batu Marmar	6.609
Pasean	5.365
Kabupaten Pamekasan	**66.433**

3. Domba terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan,

Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan domba berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Domba di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	**Domba**
(1)	(2)
Tlanakan	3.215
Pademawu	2.321
Galis	1.850
Larangan	2.744
Pamekasan	1.195
Proppo	1.906
Palengaan	1.946
Pegantenan	1.075
Kadur	1.220
Pakong	1.415
Waru	1.084
Batu Marmar	826
Pasean	1.325
Kabupaten Pamekasan	22.122

4. Kelinci terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan kelinci berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Kelinci di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	**Kelinci**
(1)	(2)
Tlanakan	435
Pademawu	235
Galis	816

Kecamatan	Kelinci
(1)	(2)
Larangan	395
Pamekasan	780
Proppo	161
Palengaan	217
Pegantenan	217
Kadur	116
Pakong	102
Waru	91
Batu Marmar	102
Pasean	102
Kabupaten Pamekasan	**3.765**

5. Ayam buras terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan ayam buras berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Ayam di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	Ayam Buras
(1)	(2)
Tlanakan	5.7101
Pademawu	100.682
Galis	34.361
Larangan	56.837
Pamekasan	91.631
Proppo	115.521
Palengaan	60.237
Pegantenan	80.881
Kadur	49.609

Kecamatan	Ayam Buras
(1)	(2)
Pakong	48.931
Waru	49.511
Batu Marmar	69.801
Pasean	51.135
Kabupaten Pamekasan	**866.238**

6. Ayam pedaging terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan ayam pedaging berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Ayam Pedaging di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	Ayam Pedaging
(1)	(2)
Tlanakan	13.505
Pademawu	50.505
Galis	67.007
Larangan	138.512
Pamekasan	38.010
Proppo	37.003
Palengaan	36.011
Pegantenan	18.008
Kadur	230.002
Pakong	13.509
Waru	19.002
Batu Marmar	15.503
Pasean	34.502
Kabupaten Pamekasan	**711.079**

7. Ayam petelur terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan ayam petelur berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Ayam Petelur di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	**Ayam Petelur**
(1)	(2)
Tlanakan	68.004
Pademawu	19.808
Galis	25.002
Larangan	89.010
Pamekasan	17.703
Proppo	17.815
Palengaan	16.505
Pegantenan	16.009
Kadur	140.007
Pakong	15.700
Waru	13.500
Batu Marmar	9.000
Pasean	9.500
Kabupaten Pamekasan	**457.563**

8. Itik terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan itik berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Itik di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	**Itik**
(1)	(2)
Tlanakan	2.137
Pademawu	8.188
Galis	5.626
Larangan	4.509
Pamekasan	8.190
Proppo	2.483
Palengaan	4.284
Pegantenan	1.120
Kadur	1.786
Pakong	7.201
Waru	1.485
Batu Marmar	1.378
Pasean	1.779
Kabupaten Pamekasan	50.166

9. Itik manila terdapat di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong, Kecamatan Waru, Kecamatan Batumarmar, dan Kecamatan Pasean. Potensi peternakan itik manila berikut di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2021.

Tabel Potensi Itik Manila di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	**Itik Manila**
(1)	(2)
Tlanakan	2.290
Pademawu	5.362
Galis	2.015
Larangan	2.602
Pamekasan	670
Proppo	1.099

Kecamatan	**Itik Manila**
(1)	(2)
Palengaan	2.590
Pegantenan	620
Kadur	240
Pakong	2.450
Waru	1.690
Batu Marmar	460
Pasean	440
Kabupaten Pamekasan	**22.528**

Potensi Kehutanan di Setiap Kecamatan

Hutan merupakan integritas ekosistem di mana meliputi hamparan lahan yang biasanya berisi sumber daya alam hayati yang didominasi dengan pepohonan. Kawasan di luar kawasan hutan yang tidak bertumbuhan pohon-pohon disebut atau ditetapkan sebagai kawasan hutan. Terkadang disebut dengan kawasan hutan, yaitu suatu teritorial tertentu yang ditetapkan oleh negara atau pemerintah untuk dijaga atau dilindungi sebagai hutan tetap (keadaan terjaga).

Di Kabupaten Pamekasan, kawasan hutan yang ada di wilayah ini memiliki dua jenis kawasan hutan di antaranya yaitu wilayah hutan produksi terbatas dan wilayah hutan rakyat. Kedua wilayah hutan ini tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Namun, kawasan atau wilayah yang dominan yaitu kawasan hutan rakyat. Perbedaan yang paling mencolok dari kedua kawasan ini adalah kawasan hutan rakyat lebih luas dan lebih umum diketahui daripada kawasan hutan produksi terbatas. Biasanya, kawasan hutan produksi terbatas lebih diperhatikan pengelolaannya. Penyebaran kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan rakyat sebagai berikut:

1. Kecamatan Batumarmar, Kecamatan Waru, dan Kecamatan Tlanakan merupakan kawasan dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT).
2. Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Pamekasan tersebar di seluruh kecamatan.

Potensi Perikanan

Perikanan merupakan segala kegiatan baik yang termasuk dalam memproduksinya yang berhubungan dengan ikan. Ikan tersebut melalui penangkapan (perikanan tangkap) dan budidaya, di mana ikan ini dikelola untuk memenuhi keperluan manusia akan jenggala (pangan) yang biasa digunakan sebagai sumber pangan dan nonpangan (ikan hias, pariwisata, dan yang lainnya).

Perikanan yang ada di Kabupaten Pamekasan, terdapat perikanan tangkap maupun budidaya perikanan. Di mana, jenis perikanan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar Kabupaten Pamekasan khususnya di kecamatan-kecamatan yang ada. Pada budidaya perikanan, masyarakat lebih dominan untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan pada budidaya perikanan lebih mudah dilakukan dan risiko yang diambil ebih minim daripada risiko pada perikanan tangkap seperti yang terdapat di bawah ini:

1. Perikanan tangkap atau yang biasa disebut dengan perikanan laut ada pada beberapa kawasan penghasil ikan di Kabupaten Pamekasan yaitu Kecamatan Tlanakan, Pademawu, Galis, Larangan, Kadur, Batumarmar, dan Pasean. Berikut produksi perikanan tangkap menurut Kecamatan dan Subsektor perikanan di Kabupaten Pamekasan (ton) tahun 2020 dan 2021.

Tabel Potensi Perikanan Tangkapan di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan ***Subdistrict***	**Perikanan Laut/*Marine Fisheries***	
	2020	**2021**
(1)	(2)	(3)
Tlanakan	14.981,33	12.877,33
Pademawu	3.390,50	2.657,89
Galis	488,25	636,88
Larangan	658,73	521,29
Pamekasan	-	-
Proppo	-	-
Palengaan	-	-
Pegantenan	-	-

Kecamatan *Subdistrict*	Perikanan Laut/*Marine Fisheries*	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
Kadur	90,95	66,79
Pakong	-	-
Waru	-	-
Batu Marmar	1.032,26	817,50
Pasean	1.950,28	2.987,12
Kabupaten Pamekasan	**22.592,30**	**20.564,80**

2. Budidaya perikanan terdiri dari:
   a. Budidaya ikan tambak dan kolam: ikan bandeng dan udang yang berada di Kecamatan Galis dan Pademawu.
   b. Garam merupakan komoditas unggulan Pamekasan yang kualitasnya sudah diakui pasar yang terdapat di Kecamatan Tlanakan, Pademawu, dan Galis.
   c. Rumput laut di Kabupaten Pamekasan terdapat di Kecamatan Pademawu, Kecamatan Pasean, Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Galis, dan Kecamatan Batumarmar.
   d. Jenis rumput laut yang dibudidayakan adalah jenis Eucheuma Cottoni, dan Spinosum.

Berikut produksi perikanan budidaya menurut tempat budidaya di Kabupaten Pamekasan (ton) tahun 2021 dalam triwulanan.

Tabel Budidaya Perikanan Kabupaten Pamekasan

Kecamatan *Subdistrict*	Triwulan I *Quarter I*	Triwulan II *Quarter II*	Triwulan III *Quarter III*	Triwulan IV *Quarter IV*	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tambak	29,34	26,74	26,08	29,21	111,37
Kolam Air Tawar	85,69	171,66	145,44	120,44	523,22
Laut	-	-	-	-	-
Jumlah/Total	115,03	198,39	171,51	149,65	634,59

Potensi Industri

Industri merupakan segala bentuk kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menghasilkan barang yang memiliki nilai jual atau nilai tambah yang lebih tinggi. Di mana dalam pengelolaannya yaitu mengolah bahan baku atau bahan mentah yang digunakan untuk menghasilkan nilai tambah tersebut dan tentunya dalam penggarapan dengan jumlah besar sehingga barang yang dihasilkan tersebut dapat diperoleh dengan harga seminim atau serendah mungkin, namun tetap dengan mutu yang tinggi.

Di kabupaten Pamekasan, memiliki dua jenis industri, yaitu industri kecil atau yang biasa disebut dengan industri rumah tangga dan industri menengah. Industri rumah tangga sudah tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Meskipun begitu, industri menengah tidak sedikit juga dilakukan dalam perindustrian di wilayah tersebut seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Industri kecil (industri rumah tangga), dengan lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan dan menjadi satu dengan rumah-rumah penduduk.
2. Industri menengah meliputi:
    a. Industri garam yodium di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, dan Kecamatan Galis.
    b. Industri air minum mineral di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Palengaan.
    c. Industri rokok di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Waru dan Kecamatan Proppo.
    d. Industri petis di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pasean.
    e. Industri batik di Kecamatan Tlanakan, Kecamatan Pademawu, Kecamatan Galis, Kecamatan Larangan, Kecamatan Pamekasan, Kecamatan Proppo, Kecamatan Palengaan, Kecamatan Pegantenan, Kecamatan Kadur, Kecamatan Pakong dan Kecamatan Waru.

Potensi Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu aktivitas khususnya perjalanan yang terencana, di mana seseorang maupun kelompok menuju suatu tempat untuk bepergian atau lebih tepatnya berlibur untuk memenuhi keinginannya. Sudah dibahas tuntas pada Bab III mengenai potensi pariwisata di Kabupaten Pamekasan. Dijelaskan juga bahwa terdapat berbagai macam pariwisata, baik pariwisata budaya, pariwisata alam maupun pariwisata buatan. Pengunjung yang datang pada wisata-wisata tersebut tidak hanya masyarakat sekitar teritorial Pamekasan saja, namun juga terdapat pengunjung dengan mulai dari turis lokal sampai mancanegara.

Dengan keindahan yang ada di pariwisata tersebut, pengunjung yang datang tidak hanya sekali dua kali bahkan beberapa kali datang untuk melihat keindahan yang dimiliki oleh pariwisata di Kabupaten Pamekasan ini. Ciri khas yang menonjol di masing-masing pariwisata dapat membuat pengunjung betah dan nyaman. Hal ini dikarenakan pengelolaan pariwisata dijaga dan dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat sekitar. Seperti yang dijelaskan di bawah ini:

1. Pariwisata budaya. Pariwisata budaya di sini diarahkan pengembangannya pada wisata terdiri atas:
   a. Wisata karapan sapi di Kecamatan Pamekasan.
   b. Sisa Pembangunan Candi di Desa Candi Burung Kecamatan Proppo.
   c. Wisata kontes sapi Sonok di Kecamatan Waru.
   d. Makam Ronggosukowati (Raja Islam I Pamekasan) di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan.
   e. Makam Syeikh Gozali di Desa Sotabar Kecamatan Pasean.
   f. Makam Ghung Seppo—Gatotkaca di Kelurahan Kolpajung Kecamatan Pamekasan.
   g. Makam Syekh Abdul Manan (Batu Ampar) terletak di Desa Pangbatok Kecamatan Proppo.
   h. Makam Joko Tarub di Desa Montok Kecamatan Larangan
   i. Vihara di Desa Polagan Kecamatan Galis.

2. Pariwisata alam
   Untuk wisata alam pengembangannya diarahkan pada:
   a. Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan yaitu wisata Api Tak Kunjung Padam.
   b. Desa Tanjung Kecamatan Pademawu yaitu wisata Pantai Jumiang.
   c. Kecamatan Batumarmar yaitu wisata Lembah Sembir.
   d. Desa Montok Kecamatan Larangan yaitu wisata Pantai Talang Siring.
   e. Desa Batu kerbuy Kecamatan Pasean yaitu wisata Pantai Batu Kerbuy.
3. Pariwisata buatan
   Untuk wisata buatan pengembangannya diarahkan di Kecamatan Pamekasan yaitu wisata Kolam Renang Tirta Basuki dan Wisata Kota.

Para Penulis

Fahrurrozi, M.E.I. lahir di Pamekasan pada tanggal 20 November 1984. Ia menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN Tobungan 1, selanjutnya di MTs Mambaul ulum bata-bata, dan kemudian di MA Mambaul Ulum Bata-bata. Melanjutkan Pendidikan S-1 di Universitas Madura dan S-2 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Sekarang beliau menjabat sebagai Kepala Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

Hallo, perkenalkan nama saya **Abd. Rohman Al Hadifi,** saya lahir di Pamekasan pada 10 Juli 2001, saya kuliah di kampus IAIN Madura dimulai tahun 2019, sebuah perjuangan awal saya dalam akademisi. Kemudian saya mengikuti organisasi bernama UKK FPM FEBI (dahulunya bernama KSEI JEBIS) dengan sebuah kemauan untuk mengembangkan diri. Berbagai pahit dan manis sudah dijalani dan sangatlah terasa kebersamaan yang kuat dalam diri untuk mengabdi di dalamnya. Pengalaman terbaik adalah ketika menjadi wakil dari FPM untuk berdiskusi dengan kampus lain di seluruh Indonesia, awal dibentuknya FPM pada 12 Agustus 2015, dan sekarang KSEI FPM FEBI

telah berumur 7 tahun. Sebuah masa yang cukup panjang dan hal tersebut tentunya di *support* doa oleh segenap keluarga besar FPM FEBI.

Progresivitas dalam organisasi tersebut tidak bisa diragukan lagi, dan semangat juang yang selalu dipupuk menjadikan organisasi ini terus membentangkan sayapnya. Semoga kebaikan tersebut tetap berjalan dan tetap tersambung dari generasi ke generasi.

"Menjadi sebuah pejuang dalam organisasi tidaklah dengan kata "siap". Perlunya loyalitas dan rasa kepemilikan tinggi. Semua rasa dan nilai tersebut akan engkau rasakan di dalam UKK FPM FEBI. **"Percaya dan Buktikanlah."**

Perkenalkan nama saya **Shaumil Badri,** merupakan anak pertama dari dua bersaudara yang lahir dari keluarga sederhana di Pamekasan, 18 November 2000. Saya mulai menempuh pendidikan perguruan tinggi di IAIN Madura mulai tahun 2019 yang sebelumnya sangat mendadak untuk melanjutkan pendidikan. Saya menjadi salah satu bagian di IAIN Madura tepatnya di Program Studi Ekonomi Syariah, kemudian berselang beberapa waktu juga diberikan kesempatan untuk bergabung di sebuah keluarga di salah satu organisasi, yaitu KSEI UKK FPM FEBI yang sebelumnya bernama KSEI JEBIS. Melalui organisasi tersebut banyak pengalaman yang sudah dilalui, mulai dari menjadi anggota sampai menjadi pengurus begitu banyak pengalaman luar biasa yang didapatkan, baik yang bersifat keilmuan maupun yang bersifat kekeluargaan serta yang bersifat sosial. Sebuah pemikiran yang selalu dijadikan acuan dalam melakukan sesuatu yaitu "Pokok Usaha, Hasil Motemmoh Budih"

Nama **Safrianto,** akrab disapa Sapri, entah darimana huruf F dan P berpapasan tanpa sapa. Lahir di Sumenep, 05 September 2000. Anak tercinta karena tidak ada saingan (tunggal) bertempat tinggal di Gladak Anyar, Pamekasan. Menempuh pendidikan bangku kuliah semenjak tahun 2019 di IAIN Madura prodi Ekonomi Syari'ah. Aktif dalam organisasi KSEI UKK FPM FEBI IAIN Madura. Banyak hal yang saya jumpai selama aktif di KSEI UKK FPM FEBI, mulai dari membangun relasi dengan ukhti di luar prodi Ekonomi Syariah bahkan sampai dengan KSEI-KSEI yang ada pada perguruan tinggi di luar Pulau Madura. Motto hidup "jika tumbuh tidak memberi manfaat minimal tidak merusak."

Nama saya **Firmansyah** kelahiran di Sampang, 14 Juni 2001. Saya tinggal di Dsn. Smaleng Ds. Ambat Tlanakan Pamekasan. Saat ini, saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Madura, prodi Ekonomi Syariah. Berpengalaman di organisasi UKK FPM FEBI IAIN Madura. Selama di KSEI, hal yang saya dapatkan yaitu dapat belajar banyak hal terutama pengalaman dan wawasan tentang desain grafis, berpengalaman dalam kepenulisan dan banyak hal lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Motto yang menjadi pegangan hidup saya ialah "Tak perlu pikirkan bagaimana kamu terjatuh, tapi pikirkan bagaimana kamu mampu terbangun."

Robiatul Adawiyah, akrab disapa Dewi. Ia lahir di Sampang pada 08 Agustus 2001. Ia telah menyelesaikan pendidikan formalnya mulai dari TK IT Tanwirul Islam, dilanjutkan dengan pendidikan dasar di MI Tanwirul Islam. Pendidikan yang lebih tinggi yakni SMP Al-Irsyad serta MA Tanwirul Islam. Saat ini, ia menempuh pendidikan di program studi Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Selain sebagai akademisi, dia juga aktif di beberapa organisasi internal salah satunya ialah Unit Kegiatan Khusus Forum Pengembangan Mahasiswa (UKK FPM FEBI) FEBI IAIN Madura yang saat ini diamanahi sebagai sekretaris departemen *Writing and Paper*. Ada banyak hal yang ia dapatkan, salah satunya ialah menekuni dalam bidang kepenulisan. Buku lain yang telah ditulis ialah buku *a Wonderfull Muslimah*, dan bagian penulis buku ekonomi dalam essay. Motto yang menjadi pegangan dalam hidupnya ialah "berbuat baiklah, karena setiap kebaikan yang dilakukan pasti akan memperoleh hasilnya!"

Fitriyana Agustin, lahir di Pamekasan 27 Agustus 2000. Dia menyelesaikan pendidikan formalnya mulai dari TK PKK Polagan Dua, dilanjutkan dengan pendidikan dasar di SDN Polagan II. Pendidikan yang lebih tinggi yakni SMPN 2 Larangan serta MAN 2 Pamekasan juga pernah dia arungi pendidikannya. Saat ini dia menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura. Selain sebagai akademisi, dia juga aktif di beberapa organisasi untuk mengembangkan *soft skill*-nya salah satunya KSEI UKK FPM (Forum Pengembangan Mahasiswa) FEBI IAIN Madura dengan visi membumikan ajaran Islam pada bidang ekonomi. Sejak mulai kuliah hingga saat ini, bidang *public speaking* dan kepenulisan menjadi kegemaran dalam mengikuti berbagai kompetisi dengan target juara yang bisa didapatkannya. Meskipun pada umumnya dia mengikuti

untuk menambah pengalaman saja, akan tetapi dia bisa mendapatkan juara baik dalam ranah regional, nasional, dan internasional melalui *conferences* yang diadakan oleh kampus dengan penerbitan jurnal-jurnal yang ada. Puji syukur *alhamdulillah*, dengan apa yang dia capai bisa mengantarkannya menjadi Penerima Beasiswa Bank Indonesia dan diamanahi sebagai Sekretaris Umum KSEI UKK FPM FEBI IAIN Madura.

Faridatur Rosyidah, akrab disapa Farda. Lahir di Pamekasan, 28 Oktober 2000. Farda merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dan berasal dari Pademawu, Pamekasan. Mulai tahun 2019, ia menempuh pendidikan di IAIN Madura prodi Ekonomi Syariah. Farda juga aktif di organisasi KSEI UKK FPM FEBI IAIN Madura. Banyak hal baru yang diperoleh selama aktif di KSEI UKK FPM FEBI, mulai dari pengalaman yang bersifat akademisi hingga pengalaman yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas. “Jika kamu berbuat baik, maka sesungguhnya kamu berbuat baik terhadap dirimu sendiri, adalah motto hidup Farda yang selalu ia tanamkan dalam dirinya sebagai prinsip.

Anisatul Jannah, lahir di Pamekasan 09 Januari 2000. Pendidikan yang ia tempuh mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Ummul Quro Pangaporan, lalu pada tingkat Sekolah Dasar (SD) ia tempuh di SDN Plakpak IV. Berbeda halnya pada tingkat pendidikan yang ia tempuh berikutnya, ia melanjutkan pendidikannya di sebuah pondok pesantren yang bernama Al-Mujtama’ yang bertempat di Desa. Plakpak, Kec. Pegantenan, Kab. Pamekasan. Sekolah Menegah Pertama (SMP) ia tempuh di SMP Al-Mujtama’ serta tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ia tempuh di Madrasah Aliyah (MA) AL-Mujtama’ dan pada

saat ini, ia sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura semester 6 dengan Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Selain berfokus pada bidang akademisi, ia juga ikut menjadi Sekretaris Umum 2 dalam sebuah organisasi yang Bernama UKK Forum Pengembangan Mahasiswa (FPM) FEBI IAIN Madura yang tergabung dalam Forum Silaturrahim Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) yang mana oganisasi ini selaras dengan program studi yang ia tempuh. Sebagaimana ia menyatakan, "Banyak pengalaman serta ilmu yang didapat selama mengikuti organisasi UKK FPM FEBI ini yang pada awalnya Bernama KSEI JEBIS IAIN Madura. Dengan karakteristiknya yang tak asing didengar yaitu "Ukhuwah, Dakwah, Ilmiah" menjadi ujung tombak dalam membumikan ajaran Islam di bidang ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam visi FoSSEI. Dengan jargon yang dikumandangkan "Ekonom Rabbani...BISA!" diharapkan benar-benar mampu mencetak jiwa kader yang mumpuni dalam bidang ekonomi Islam serta memiliki jiwa atau karakteristik Islam yang baik.

Nama **Novi Daniyatun Nikmah,** akrab dipanggil Novi. Ia dilahirkan di Pamekasan pada tanggal 4 November 2000, anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Darwoto dan Ibu Nurul Hasiya, bertempat tinggal di Jalan Jalmak, Pamekasan. Sejak tahun 2019, ia menempuh pendidikan di IAIN Madura prodi Ekonomi Syariah. Ia aktif di beberapa organisasi, salah satunya KSEI UKK FPM FEBI IAIN Madura. Banyak hal baru yang ia peroleh selama aktif di KSEI UKK FPM FEBI, salah satunya bisa bisa menulis buku ini. Motto hidupnya adalah "Hidup adalah kumpulan keyakinan dan perjuangan."

Hai, namaku **Nur Aisatus Sholehah**. Panggil saja Iis supaya lebih akrab, hehe. Aku tinggal di Jl. Ngaporan Jaya Kowel, Pamekasan. Saat ini, aku menempuh pendidikan S-1 di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Madura, prodi Perbankan Syariah. Bicara hobi, aku suka mengisi waktu luang dengan berbisnis. Kenapa menulis? Karena menurutku, dengan menulis aku dapat menambah wawasan. Aku pernah menulis sebuah buku ilmiah yang berjudul "Tanya Jawab Zakat". Berpengalaman di organisasi UKK FPM FEBI IAIN Madura. Selama di KSEI, hal yang saya dapatkan banyak banget. Di antaranya menambah pengalaman (sangat pasti), wawasan serta mendapatkan hal mengenai bagaimana menjadi pribadi yang seharusnya ada pada diri saya sendiri. Yang paling utama nih, dapat belajar mengenai suatu bisnis dari bisnis yang kecil sampai bisnis besar. Buktinya? Yukk kepoin Instagram @ fpmfebi.store. Motto yang selalu menjadi pegangan hidup ialah "Jika kamu tak dapat melakukan hal yang besar, lakukan dari hal kecil namun dengan cara yang hebat."

Nuri Firdausiyah, akrab disapa Firda. Lahir di Pamekasan, 30 Juni 2001. Firda merupakan anak 4 dari lima bersaudara dan berasal dari Duko Timur, Larangan, Pamekasan. Mulai tahun 2019, ia menempuh pendidikan di IAIN Madura prodi Akuntansi Syariah. Saya aktif di organisasi KSEI UKK FPM FEBI IAIN Madura. Banyak hal baru yang diperoleh selama aktif di KSEI UKK FPM FEBI, mulai dari relasi, pengalaman, ilmu yang bersifat akademisi hingga pengalaman yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas. "Hidup adalah perjuangan, maka teruslah berproses sampai dunia dalam genggaman" adalah motto hidup saya yang selalu ia tanamkan dalam dirinya sebagai prinsip hidup.

Laily Yatul Ulien Nikmah R., seorang yang berdomisili di Pamekasan, Madura, Jawa Timur, dengan nama sapaan Ulin. Lahir di Pamekasan pada 01 Juni 2000. Dan Sekarang, tengah menyelesaikan studinya yakni Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN MADURA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Anak pertama dari keluarga sederhana yang menginginkan agar hidupnya selalu bermanfaat baik di keluarga, masyarakat maupun negara. Sehingga menjadi orang yang beruntung adalah impiannya, berguna bagi masyarakat adalah harapannya, dan masuk surga adalah tujuan hidupnya. Ia juga aktif di UKK FOM FEBI sebagai sekretaris departemen HRD, ada banyak hal yang ia dapatkan dalam prosesnya di UKK FPM FEBI, salah satunya ialah menjadi wanita yang dewasa dan berkarakter.

EKONOMI HIJAU

Potensi dan Strategi

Secara umum ekonomi diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan kehidupan umat, namun dalam praktiknya masih menyisakan persoalan yang mendasar seperti merusak lingkungan dengan alasan ekonomi. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih literasi bagi segenap pegiat ekonomi.

Melalui buku ini, diharapkan para pembaca dapat mempunyai gambaran tentang potensi dan strategi ekonomi hijau. Pada umumnya, dengan menggunakan ilustrasi studi ilmiah yang nyata. Bagi mahasiswa, buku ini dapat menjadi referensi konseptual untuk menambah khazanah keilmuannya dengan harapan dapat dipraktikkan ketika terjun pada dunia bisnis yang bisa mengembangkan ekonomi yang ramah lingkungan di tingkat daerah pada umumnya, dan di Pamekasan pada khususnya. Penulis berharap buku ini dapat menjadi inspirasi bagi semua pihak.

Penulis mengakui bahwa buku ini jauh dari kesempurnaan, baik dari kedalaman materi serta ulasan dan cakupan topiknya. Oleh karena itu, penulis senantiasa membuka diri dalam menerima saran dan kritik dari berbagai pihak.

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA

PRENADA

IAIN MADURA

BUSSINES & ECONOMICS

ISBN 978-602-383-177-7

9 786023 831777